10.2

AAJALAH



BER

3 edisi per tahun dalam 17 bahasa

Membahas Sosiologi bersama Alain Caillé

Sari Hanafi

Protes dan Gerakan Ngai-Ling Sum Michalis Lianos Jorge Rojas Hernández Gunhild Hansen-Rojas Rima Majed

Media dan Kapitalisme Digital Marlen van den Ecker Marisol Sandoval Sebastian Sevignani Mark Andrejevic Jack Linchuan Qiu Tanner Mirrlees Mandy Tröger

Perspektif Teoretis

Francis Nyamnjoh

Sosiologi dari Filipina Louie Benedict R. Ignacio John Andrew G. Evangelista Filomin C. Gutierrez Phoebe Zoe Maria U. Sanchez

COVID-19: Pandemi dan Krisis

Geoffrey Pleyers Klaus Dörre Sari Hanafi

Seksi Terbuka

- > Ruang Perkotaan Berbasis Gender di Bangladesh
-) Internasionalisme Buruh dan Sirkulasi Modal secara Bebas
- › Portugal Menghadapi Kelompok Ekstrem Kanan



/OLUME 10 / EDISI 2 / AGUSTUS 2020 https://globaldialogue.isa-sociology.org/





Editorial

andemi dan krisis COVID-19 mendominasi diskusi-diskusi dan perkembangan situasi di banyak negara di seluruh dunia. Apa yang disebut dengan hotspot atau kesenjangan antara negara-negara Utara Global dan Selatan menunjukkkan betapa masalah-masalah ketimpangan itu penting. Bukan hanya pelayanan kesehatan yang akan menjadi masalah di tahun-tahun mendatang tetapi juga perkembangan keberhasilan ekonomi, sosial dan politik yang mengikutinya. Di beberapa negara, krisis ekonomi sama dengan krisis sosial mendalam yang sedang berlangsung, dan/atau demokrasi terancam oleh politik restriktif. Melalui edisi ini Dialog Global memulai serangkaian penerbitan tentang pandemi dan maknanya bagi masyarakat dan sosiologi serta mengundang para penulis dari berbagai negara dan wilayah untuk menyumbangkan wawasan-wawasan mereka. Untuk memulai seri ini, tiga penulis membagikan refleksi mereka tentang COVID-19 dan efek-efeknya.

Pada seksi 'Membahas Sosiologi' Sari Hanafi melakukan wawancara dengan Alain Caillé, salah satu pendiri gerakan dan manifesto konvivialis. Caillé mengkritik sudut pandang neoliberal, menjelaskan akar "Konvivialisme," dan menunjukkan mengapa dan bagaimana fungsinya sebagai "penanda kosong" (*empty signifier*) yang menyatukan orangorang yang berharap dan berusaha untuk menciptakan "dunia pasca-neoliberal."

Dalam tahun-tahun terakhir kita telah menyaksikan begitu banyak protes yang menentang kecenderungan-kecenderungan anti-demokrasi, pembangunan-pembangunan neoliberal, dan efek dari ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang didorong oleh pasar. Bentuk-bentuk gerakan-gerakan dan sosial protes baru telah bermunculan dan menantang politik kaum mapan (*the establishment*) di banyak wilayah di dunia. Simposium pertama kami—dengan kontribusi-kontribusi dari Ngai-Ling Sum, Michalis Lianos, Jorge Rojas Hernández, Gunhild Hansen-Rojas, dan Rima Majed—menyoroti situasi di Hong Kong, Prancis, Cile, Lebanon, dan Irak.

Simposium kedua menyoroti bagaimana media dan komunikasi bersama-sama dengan dorongan untuk mencari keuntungan membentuk masyarakat kita. Artikel-artikel yang disusun oleh Marlen van den Ecker dan Sebastian Sevignani membahas berbagai aspek-aspek dan efekefek yang berbeda dari digitalisasi dan marketisasi komunikasi—dari para pengguna media sosial yang bertindak sebagai buruh tanpa bayaran serta peran data dalam akumulasi dan kepemilikan kapitalis hingga para pekerja digital baru di Tiongkok dan restrukturisasi sistem-sistem media—serta menunjukkan bagaimana proses-proses ini berjalan seiring dengan transformasi kapitalisme di berbagai belahan dunia.

Seksi tentang 'Perspektif Teoritis' juga membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Francis Nyamnjoh merefleksikan gagasan Afrika Barat dan Tengah tentang manusia yang melekat dalam ontologi "ketidaklengkapan dan penggabungan dalam proses menjadi manusia" serta menunjukkan bagaimana ini dipengaruhi oleh penggunaan teknologi.

Pada seksi kami yang menaruh fokus pada sosiologi negara atau wilayah tertentu, Filomin Gutierrez telah mengambil tanggung jawab untuk mengundang rekan-rekan dari Filipina guna menyajikan isu-isu dan temuan-temuan sosiologis yang penting. Hasilnya adalah koleksi bahan yang mengesankan dari studi perkotaan, sosiologi publik dan banyak lagi.

Artikel-artikel yang dimuat pada Seksi Terbuka membahas topik-topik sosiologis penting seperti penggenderan ruang terbuka, internasionalisme tenaga kerja, kapitalisme keuangan, dan reaksi terhadap populisme sayap kanan.

Brigitte Aulenbacher dan Klaus Dörre, editor Global Dialogue

- Dialog Global dapat diperoleh dalam 17 bahasa di <u>ISA website</u>.
- Naskah harap dikirim ke globaldialogue.isa@gmail.com.



GLOBAL DIALOGUE



Dewan Redaksi

Editor: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

Asisten Editor: Johanna Grubner, Christine Schickert.

Rekan Editor: Aparna Sundar.

Editor Pelaksana: Lola Busuttil, August Bagà.

Konsultan: Michael Burawoy.

Konsultan media: Juan Lejárraga.

Editor Konsultasi:

Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

Editor Wilayah

Dunia Arab: (*Tunisia*) Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem; (*Aljazair*) Souraya Mouloudji Garroudji; (*Maroko*) Abdelhadi Al Halhouli, Saida Zine; (*Lebanon*) Sari Hanafi.

Argentina: Magdalena Lemus, Pilar Pi Puig, Martín

Bangladesh: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, US Rokeya Akhter, Juwel Rana, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Muhaimin Chowdhury, Helal Uddin, Md. Eunus Ali, Mostafizur Rahman, Jhilik Saha, Maria Sardar, Tahmid UI Islam.

Brasil: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

Prancis/Spanyol: Lola Busuttil.

India: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Pragya Sharma, Manish Yaday.

Indonesia: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditva Pradana Setiadi.

Iran: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhamad Mutallebi, Faezeh Khajehzade.

Jepang: Satomi Yamamoto.

Kazakhstan: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul.

Polandia: Justyna Kościńska, Magdalena Kamela, Aleksandra Lubińska, Adam Müller, Jonathan Scovil, Aleksandra Biernacka, Jakub Barszczewski, Agnieszka Szypulska, Iga Łazińska, Aleksandra Senn, Sara Herczyńska, Zofia Penza-Gabler, Iwona Bojadżijewa, Weronika Peek.

Romania: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Diana Alexandra Dumitrescu, Iulian Gabor, Bianca Mihăilă, Alexandra Mosor, Mioara Paraschiv, Maria Stoicescu.

Rusia: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

Taiwan: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Po-Shung Hong, Yu-Min Huang, Bun-Ki Lin, Yu-Chia Chen.

Turki: Gül Çorbacıoğlu, İrmak Evren.



Di tahun-tahun terakhir, banyak negara di seluruh dunia telah menyaksikan peningkatan gerakan sosial dan demonstrasi massa. **Protes dan gerakan** ini, yang paling sering diungkapkan di jalan-jalan, mengangkat isu dan tuntutan berbeda terhadap kecenderungan anti-demokrasi, perkembangan neoliberal, dan akibat dari ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang digerakkan oleh pasar. Simposium ini mencakup empat kajian yang mencerminkan bentuk spesifik dari gerakan sosial dan protes ini di Lebanon, Irak, Prancis, Cile, dan Hong Kong.



Seksi ini menyajikan wawasan mengenai **sosiologi dari Filipina**. Para anggota Masyarakat Sosiologi Filipina (PSS) membahas penelitian sosiologi mereka dengan menitikberatkan isu seperti urbanisasi dan tata kelola, gerakan LGBT, kekerasan dalam perang melawan narkoba, mempraktikkan sosiologi publik di kalangan kaum miskin, dan marginalisasi wilayah Mindanao.



Mulai edisi ini, Dialog Global mengawali rangkaian tulisan mengenai **COVID-19** untuk membahas makna dan konsekuensi pandemi bagi negara dan wilayah yang berbeda, bagi masyarakat secara keseluruhan, dan bagi sosiologi. Dalam seksi ini tiga orang sosiolog menyajikan wawasan mereka mengenai tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi sosiologi di hari-hari ini.



Global Dialogue dapat terselenggara berkat dana hibah dari SAGE Publications.

Dalam Edisi Ini

Editorial	2	PERSPEKTIF TEORETIS	
		TIK sebagai <i>Juju</i> : Inspirasi Afrika	
) MEMBAHAS SOSIOLOGI		oleh Francis Nyamnjoh, Afrika Selatan	3
Manifesto Konvivialis: Ideologi Politik Baru.			
Wawancara dengan Alain Caillé		SOSIOLOGI DARI FILIPINA	
oleh Sari Hanafi, Lebanon	5		
		Mempraktikkan Sosiologi di Filipina	3
DECEMBED AND CHED ALL AND		oleh Filomin C. Gutierrez, Filipina	
PROTES DAN GERAKAN		Studi Perkotaan di Filipina: Sosiologi sebagai Jangkar	3
Perkembangan Global dan Gerakan Lokal	•	oleh Louie Benedict R. Ignacio, Filipina	
oleh Johanna Grubner, Austria Protes Hong Kong 2019-20: Suatu Pandangan	8	Navigasi Konflik melalui Lensa Queer	39
Neo-Foucauldian		oleh John Andrew G. Evangelista, Filipina	
oleh Ngai-Ling Sum, Inggris Raya	9	Narasi Sumbang Perang Filipina Melawan Narkoba oleh Filomin C. Gutierrez, Filipina	4:
Politik Eksperiensial dan Rompi Kuning		Memberlakukan Sosiologi Publik di Filipina	
oleh Michalis Lianos, Prancis	12	oleh Phoebe Zoe Maria U. Sanchez, Filipina	4:
Kebangkitan Sosial Melawan Ketidaksetaraan Neoliberal		Mengarusutamakan Mindanao dalam Sosiologi Filipina	
oleh Jorge Rojas Hernández dan Gunhild Hansen-		oleh Mario Joyo Aguja, Filipina	4
Rojas, Cile	15	olen mano Joyo Aguja, i mpina	
Memahami Pemberontakan Oktober di Irak dan Lebanon			
oleh Rima Majed, Lebanon	18	COVID-19: PANDEMI DAN KRISIS	
		Sosiologi Global dalam Pandemi	
) KAPITALISME DIGITAL		oleh Geoffrey Pleyers, Belgia	4
Madia dan Kamunikasi dalam Kanitaliama Digitali		COVID 19: Pelajaran Pertama dari Pandemi Saat Ini	
Media dan Komunikasi dalam Kapitalisme Digital: Perspektif Kritis		oleh Klaus Dörre, Jerman	49
oleh Marlen van den Ecker dan Sebastian Sevignani,		Sosiologi dalam Dunia Pasca-Corona	_
Jerman	20	oleh Sari Hanafi, Lebanon	5:
Eksploitasi Digital: Menghubungkan Komunikasi dan Kerja			
oleh Marisol Sandoval, Inggris Raya dan Sebastian		SEKSI TERBUKA	
Sevignani, Jerman	22	Ruang Perkotaan Berbasis Gender di Bangladesh	
Mengautomasikan Kapitalisme		oleh Lutfun Nahar Lata, Australia	5
oleh Mark Andrejevic, Australia	25	Internasionalisme Buruh dan Sirkulasi Modal secara Bebas	
Temporalitas dan Pembentukan Kelas Buruh Digital Tiongkok		oleh Raquel Varela, Portugal	5
oleh Jack Linchuan Qiu, Hong Kong	27	Portugal Menghadapi Kelompok Ekstrem Kanan	
Persaingan AS-Tiongkok? Teknologi Digital dan Industri Budaya		oleh Elísio Estanque, Portugal	5
oleh Tanner Mirrlees, Kanada	29		
Pasar Bebas untuk Kebebasan Pers Pasca-Sosialisme?			
oleh Mandy Tröger, Jerman	31		
olen manuy mogel, Jennan	<u> </u>		

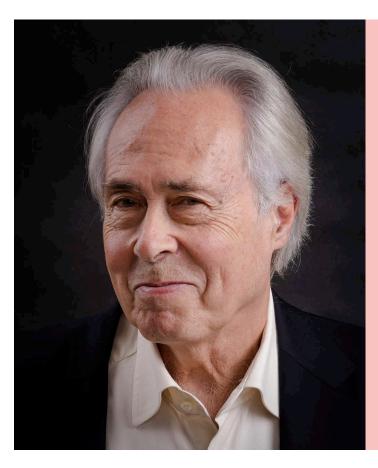
Orang-orang muda kian sadar betapa dekatnya malapetaka ekologis ini, namun tidak dapat melihat dengan jelas bahwa kita tidak akan bisa menghadapinya tanpa mempertanyakan hegemoni neoliberalisme dan tanpa mengembuskan nyawa baru kepada imajinasi demokratis.

Alain Caillé

> Manifesto Konvivialis:

Ideologi Politik Baru

Wawancara dengan Alain Caillé



Alain Caillé adalah Profesor Emeritus Sosiologi di Universitas Paris Ouest Nanterre La Défense dan editor La Revue du MAUSS (Gerakan Anti-Utilitarian di Ilmu Sosial). Ia dikenal karena kritik radikalnya terhadap ekonomi dan utilitarianisme kontemporer dalam ilmu-ilmu sosial. Ia merupakan pencetus Manifesto Konvivialis. Dalam peluncuran versi kedua manifesto ini (Internationale convivialiste, Second Manifeste convivialiste, Pour un monde post-néolibéral, Februari 2020), Sari Hanafi, Presiden Asosiasi Sosiologi International (ISA) melakukan wawancara ini dengannya.

Alain Caillé. Kredit: Alain Caillé.

SH: Dapatkah Anda memperkenalkan Manifesto Konvivialis kepada pembaca kami?

AC: Sebelum membicarakan isinya, perlu diperhatikan bahwa Manifesto Konvivialis Kedua ini ditandatangani oleh hampir tiga ratus cendekiawan (ekonom, filsuf, sosiolog, aktivis komunitas) dan seniman dari 33 negara berbeda. Mereka membentuk embrio dari semacam Konvivialis Internasional (nama yang telah dipilih untuk mewakili para penulis kolektif dari Manifesto). Perkumpulan Internasional, sepenuhnya informal, tanpa kantor, tanpa organisasi (hanya itikad baik) dan tanpa pendanaan, tapi aktif dalam memperluas jangkauan manifesto keluar lingkup 300 penandatangan awalnya, hingga para cendekiawan, aktivis, dan seniman lain dan, di

atas segalanya, memantik pergeseran yang menentukan dalam pendapat umum dunia. Selama beberapa dekade, kita hidup di bawah pengaruh, di bawah hegemoni, sebagaimana Gramsci istilahkan, dari ideologi neoliberal yang mencegah kita untuk membayangkan sebuah dunia di luar dunia kita sendiri, yang sepenuhnya menyerah kepada norma kapitalisme rente dan spekulatif. Dengan sendirinya, hal ini memunculkan ketimpangan-ketimpangan yang membingungkan, yang semakin hari semakin mengosongkan nilai-nilai demokrasi. Kecuali di negara-negara yang tengah berusaha melengserkan diktatornya, "keyakinan" terhadap nilai-nilai ini kian tergerus, lebih-lebih di antara kawula muda. Hal ini tentu saja merupakan suatu bencana. Demokrasi di manamana di seluruh dunia kini berada di bawah ancaman, se-

bagaimana halnya di Eropa pada tahun 1930-an. Dengan itu, semuanya yang merupakan bagian pikiran kritis, dimulai dengan sosiologi, tengah terancam menghilang.

SH: Mengapa ideologi neoliberal begitu berkuasa?

AC: la disokong, tentu saja, oleh sumber daya material, ekonomi, finansial, militer, polisi, media, dan terkadang kriminal yang berskala sangat besar. Akan tetapi, ada juga suatu faktor lain yang lebih jarang diperhatikan namun penting, yang merupakan raison d'être dari konvivialisme: hingga hari ini, tidak ada ideologi alternatif, tidak ada seperangkat ide, konsep, teori atau nilai yang kurang-lebih koheren yang dapat menghimpun mereka yang jumlahnya tak terhitung, yang mendambakan sesuatu di luar dunia yang dikelola semata dengan logika finansial dan spekulatif. Sebuah dunia, yang sebagaimana kita ketahui dengan baik, sedang berada di tepian bencana iklim serta lingkungan yang tak bisa diperbaiki. Di negara-negara kaya, orang-orang muda kian sadar dengan betapa dekatnya malapetaka ekologis ini, namun mereka tidak melihat, atau tidak dapat melihat dengan jelas, bahwa kita tidak akan bisa menghadapinya tanpa mempertanyakan hegemoni neoliberalisme dan tanpa mengembuskan nyawa baru kepada imajinasi demokratis.

Dengan cara yang ideal-tipikal, mari kita katakan saja bahwa ideologi neoliberal ditata berdasarkan enam proposisi berikut:

1) Tidak ada masyarakat, hanya ada individu. 2) Ketamakan itu baik. 3) Semakin kaya suatu masyarakat, semakin baik masyarakat bersangkutan, karena semua akan diuntungkan dengan efek *trickle-down* (menetes ke bawah). 4) Satu-satunya modus koordinasi yang didambakan di antara subjek-subjek manusia adalah pasar bebas, termasuk pasar finansial serta spekulatif yang meregulasi dirinya sendiri. 5) Tidak ada batas-batas. Semakin banyak pasti berarti semakin baik. 6) Tidak ada alternatif. Yang mengherankan adalah bahwa tidak ada di antara proposisi ini yang mempunyai konsistensi teoretis maupun empiris nyata. Meskipun demikian, kita tak yakin dapat melawan mereka dengan apa.

SH: Bagaimana Anda menjelaskan hal ini?

AC: Jikalau kita tetap tidak berdaya di hadapan neoliberalisme, itu karena ideologi-ideologi politik besar yang kita warisi: liberalisme, sosialisme, komunisme, anarkisme (dan yang kita kombinasikan sesuai dengan keinginan kita) tidak dapat menangani lagi persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Setidaknya terdapat tiga alasan untuk ini: 1) Semua ideologi ini, setidaknya varian utamanya, didasarkan pada premis bahwa manusia pertama dan utamanya merupakan makhluk yang membutuhkan, dan konflik di antara mereka disebabkan oleh kelangkaan material, yang berujung pada deduksi pemikiran bahwa hal pertama yang paling penting ialah memproduksi lebih banyak lagi. 2) "Jalan keluar" ini bisa masuk akal sepanjang alam tampak tak ada habis-habisnya dan dapat dieksploitasi selamanya (sepanjang kita tidak terancam stagnasi sekuler [suatu kondisi di kala dalam ekonomi berbasis pasar terjadi pertumbuhan yang tak berarti] sebagaimana didiagnosis oleh banyak ekonom). Kita sekarang tahu bahwa kenyataannya tidaklah demikian. 3) Dalam memandang kita sebagai makhluk yang membutuhkan, ideologi-ideologi ini mengabaikan sumber konflik lain, yang sekurangnya sama pentingnya dengan kelangkaan material, yaitu keinginan akan pengakuan. Akibatnya, mereka tidak mampu memperlihatkan kepada kita tentang cara-cara bagaimana kebudayaan serta agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai (coexist), baik di antara negara-negara maupun dalam suatu negara-belum lagi menyangkut hubungan antara lelaki dan perempuan.

Istilah "konvivialisme" karenanya dapat dilihat setidaknya sebagai penanda kosong (*empty signifier*) (sejajar dengan *mana* dalam pengertian Lévi-Strauss...) yang melambangkan harapan untuk ideologi politik baru di mana semua yang ingin membangun suatu dunia pasca-neoliberal dapat menautkan dirinya, dan masing-masing dari mereka meletakkan aspirasi serta kepentingan mereka dalam istilah ini.

SH: Namun apakah istilah "konvivialisme" merupakan pilihan terminologis paling tepat untuk menamakan ideologi politik baru ini?

AC: Apakah ini merupakan kata yang tepat? Dan apakah neoliberalisme merupakan persoalan sesungguhnya? Apakah ia merupakan kata yang tepat? Dalam bahasa Inggris dan Prancis, konvivialitas ialah seni menyantap makanan bersama teman-teman dan meluangkan waktu yang menyenangkan bersama-sama. Kata konvivialitas karenanya mempunyai suatu konotasi yang agak "menyenangkan" (nice), yang menjauhkan sebagian kalangan yang berpotensi menjadi pendukung. Namun, kami tidak dapat memikirkan istilah yang lebih baik untuk suatu filosofi hidup bersama (konvivialitas) yang dapat membantu kami untuk menanyakan bagaimana orang-orang dapat dan perlu bekerja sama dengan "saling beroposisi tanpa menyembelih satu sama lain" (sebagaimana kata-kata Mauss). Apakah ini merupakan persoalan yang tepat? Beberapa ilmuwan yang kami hubungi menolak untuk menandatangani dan mengatakan bahwa persoalan pokok hari ini bukanlah hegemoni neoliberalisme melainkan kebangkitan populisme. Populisme memang merupakan suatu dampak dari hegemoni neoliberal, merupakan sisinya yang lain, kalau dapat kita katakan begitu. Seseorang hanya perlu membaca ulang The Great Transformation karya Karl Polanyi untuk dapat diyakinkan mengenai hal ini.

SH: Apa asas-asas dasar konvivialisme?

AC: "Konvivialisme" bukan sekadar suatu penanda kosong, suatu simbol harapan. Bagi saya, saya lega dengan kenyata-an bahwa sosok cendekiawan yang sangat beragam—yaitu mereka yang merupakan sumber inspirasi liberal atau sosialis bagi sebagian, inspirasi komunis atau anarkis untuk yang lain, belum lagi mereka yang mempunyai tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda-beda-dapat menyepakati lima nilai atau prinsip paripurna yang tidak dapat saya rinci di sini: asas-asas alam bersama, kemanusiaan bersama, sosialitas bersama, individuasi yang sah, serta oposisi kreatif ("untuk bekerja sama dengan saling beroposisi tanpa menyembelih satu sama lain"). Kelima asas ini membentangkan ruang aksiologis bersama yang membatasi ranah dari pilihan politik sah yang dimungkinkan.

Masing-masing saling memperkuat. Namun kesemuanya diletakkan dalam keutamaan yang dapat dikatakan kategoris: yakni kefasihan yang mutlak yang menentang pemborosan dan kepongahan. Kemanusiaan tidak punya banyak waktu untuk belajar bagaimana mengendalikan kecenderungannya untuk pongah. Barangkali tugas mendesak dari sosiologi ialah menolongnya untuk mempelajari hal tersebut.

SH: Apakah sosiologi Anda merupakan panggilan untuk menautkan sosiologi dengan filsafat moral?

AC: Di antaranya, ya. Saya tidak dapat memperlakukan karya klasik sosiologi, Marx, Tocqueville, Weber, Durkheim, dan lain-lain selain sebagai karya filsuf moral dan politik, kendati dalam kategori yang agak khusus. Filsuf yang, berbeda dengan Hobbes atau Rousseau (yang bilang: "Mari kita kesampingkan semua fakta"), peduli terhadap fakta dan kesejarahannya. Mereka juga peduli terhadap antropologi. Bagaimana kita dapat memahami masa kini tanpa melihat apa yang masih tersisa dari bentuk sosial di masa silam? Karenanya ketertarikan saya dengan Marcel Mauss, yang memperlihatkan kepada kita bagaimana masyarakat awal mula menata diri untuk mendistribusikan pengakuan kepada anggota-anggotanya sesuai dengan pemberian atau partisipasi para anggota dalam apa yang disebut oleh tradisi fenomenologi sebagai donasi. Suatu bidang dimana mana merupakan bentuk pengungkapan yang dikenal terbaik. Tanpa adanya dimensi filsafat moral ini, karya klasik tidak akan berbicara kepada kita dan tidak akan menarik perhatian kita. Suatu sosiologi yang ingin membatasi dirinya pada keinginan untuk menemukan fakta sebuah tugas yang tak berujung (fakta yang mana? bagaimana? mengapa?)—akan menjadi kering dan membuat dirinya menjadi tidak berarti.

SH: Di antara para penggerak moral terdapat otoritas keagamaan. Apakah Anda berencana untuk berdiskusi/ berkolaborasi dengan mereka?

AC: Keyakinan saya adalah bahwa satu-satunya kesempatan kita untuk menghindari bencana-ekologis, ekonomis, finansial, sosial, politik dan moral-yang mengancam kita, ialah kesadaran global akan betapa mendesak dan urgennya isu-isu yang tengah diperjuangkan. Terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kapitalisme finansial dan spekulatif yang sekarang dominan (Anda tentu sudah menangkap bahwa saya tidak mengatakan apa pun tentang kapitalisme pada umumnya...) kita mesti berhasil memobilisasi pendapat umum mayoritas di sebanyak mungkin negara. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini akan mudah atau bahwa kita mempunyai peluang besar untuk berhasil, namun sudah jelas bahwa kita tak akan berhasil tanpa dukungan otoritas keagamaan. Inilah mengapa Manifesto Kedua mengutip cukup panjang pernyataan dari sebuah deklarasi, Human Fraternity for World Peace and Living Together, yang ditandatangani bersama pada 4 Februari 2019 oleh Paus Francis atas nama umat Kristen dan oleh Imam Besar al-Azhar (Mesir), Ahmad al-Tayyeb, atas nama umat Muslim. Dan saya tidak melihat alasan mengapa otoritas moral Protestan, Buddha, Yahudi, dan yang lainnya tak dapat dihubungkan dengannya. Mungkin kita perlu mencoba untuk selekasnya mendirikan

sesuatu seperti Majelis Dunia untuk Kemanusiaan Bersama, melibatkan perwakilan dari masyarakat sipil, kawula filsafat, apa yang dinamakan ilmu "pasti", ilmu-ilmu humaniora serta sosial, dan bagian dari berbagai arus etis, spiritual, dan religius yang menautkan dirinya dengan asas-asas konvivialisme. Buat saya, nampaknya ISA (Asosiasi Sosiologi Internasional) dapat memainkan peranan penting di sini.

SH: Sudahkah refleksi dalam manifesto ini dicermati faedah/validitasnya untuk negara-negara Selatan Global? Sudahkah penelitian dilakukan di negara-negara tersebut?

AC: Saya akan menjawab, ya dan tidak. Ya, karena banyak dari penandatangan datang dari apa yang Anda katakan sebagai negara-negara Selatan Global dan karena sejumlah kawan dari Selatan sudah terlibat dengan inisiatif konvivialisme sejak Manifesto (2013) pertama. Dan tidak, sayangnya, karena kebanyakan dari kerja penulisan dan penyusunannya dilakukan di Utara. Langkah yang penting untuk diambil sekarang adalah pengambilalihan dan pengayaan dari refleksi konvivialis oleh mereka yang di Selatan. Terjemahan kini tengah dilakukan ke bahasa Portugis dan Spanyol (selain Inggris, Jerman, Italia, dan Jepang), dan teman-teman diharapkan akan membawanya ke Argentina, Brasil, Meksiko tetapi juga, saya harap, India, Afrika, dan lain-lain. Terjemahan ke bahasa Arab akan sangat penting untuk berbagai alasan. Namun, intinya begini. Saya akan mengatakan bahwa Manifesto Kedua meletakkan dasar untuk konsensus pasca-neoliberal dalam isu-isu ekologis, ekonomi, dan politik penting. Ini sudah bagus. Tetapi, masih diperlukan banyak kerja untuk mengintegrasikan semua perdebatan yang dibawa oleh perspektif pascakolonial, gender, subaltern, serta budaya. Ini akan menjadi Manifesto Konvivialis Ketiga (yang akan membutuhkan pembaruan lagi pada akhirnya), atau apa yang dapat kita katakan sebagai Suplemen untuk Manifesto-manifesto Konvivialis. Dan di sini kontribusi dari negara-negara Selatan tak bisa digantikan.

SH: Apakah Anda optimistis dengan penyebaran konvivialisme?

AC: Saya melihat Manifesto Konvivialis Kedua meletakkan dasar dari filsafat politik yang sekarang sangat kita butuhkan. Namun filsafat politik tidak dengan sendirinya berujung pada suatu kebijakan. Untuk melangkah lebih jauh, kini diperlukan "para wirausahawan politik" untuk membawanya dan memperlihatkan di setiap negara secara konkret apa yang hampir setiap orang (karyawan biasa, pekerja prekariat, pedagang kecil serta wirausahawan, penduduk yang terpisah, dll.) bisa dapatkan dari konvivialisme. Jika, dalam setiap kategori sosial ini, lebih banyak orang mulai berpikir kepada dirinya sendiri dan saling berkata "saya adalah seorang konvivialis," kita akan memiliki peluang untuk menghindari malapetaka yang menanti kita.

SH: Terima kasih, Alain. Saya berharap yang terbaik untuk Manifesto Konvivialis Anda.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada: Alain Caillé <<u>alaincaille90@gmail.com</u>> Sari Hanafi <<u>sh41@aub.edu.lb</u>>

Perkembangan Global dan Gerakan Lokal

oleh Johanna Grubner, Universitas Johannes Kepler, Austria dan Asisten Editor Dialog Global

ebelum berjangkitnya Covid-19 dan diterap-kannya karantina wilayah pada ruang gerak dan hak berkumpul, banyak negara di seluruh dunia menyaksikan adanya peningkatan protes sosial yang berwujud pawai dan demonstrasi. Protes-protes ini, terutama yang diekspresikan di jalanan, mengangkat isu dan tuntutan yang berbeda-beda. Simposium ini mencakup lima bagian yang mencerminkan bentuk-bentuk spesifik gerakan sosial tersebut di Lebanon, Irak, Prancis, Cile, dan Hong Kong.

Simposium diawali dengan sebuah artikel oleh Ngai-Ling Sum, yang mengkaji protes-protes yang berlangsung di jalanan Hong Kong pada bulan Juni 2019. Sum menafsirkan protes tersebut dari suatu sudut pandang Foucauldian dan memperlihatkan bagaimana, dalam kondisi otoriter yang *illiberal* [tanpa kebebasan], protes tersebut berkembang menjadi suatu gerakan sosial, bagaimana pergulatan tersebut dinyatakan penguasa melalui peningkatan penerapan kontrol dengan jalan penggunaan kekerasan polisi secara tidak proporsional, dan bagaimana biopolitik afirmatif dari para pemberontak garis depan memuncak dengan perlindungan nyawa dari (ancaman) maut.

Pada bulan November 2018, protes oleh kaum Rompi Kuning muncul di seluruh Prancis, yang memprakarsai suatu struktur dan praktik gerakan sosial yang baru. Dalam artikelnya, Michalis Lianos memberikan kita suatu wawas-

an mengenai gerakan spontan dan non-partisan ini yang menantang pemahaman sosiologis kita mengenai organisasi, arsitektur, dan keberhasilan tindakan politik kolektif dan refleksivitas.

Setelah 40 tahun politik neoliberal dan protes berkepanjangan di Cile, suatu kesadaran emansipatif berkembang di kalangan orang Cile, yang memantik protes yang masif dan kreatif pada bulan Oktober 2019. Jorge Rojas Hernández and Gunhild Hansen-Rojas menggambarkan krisis sosial dalam negara yang diakibatkan oleh neoliberalisme, kesempatan historis unik yang dihadapi Cile, dan protes-protes sosial yang mendorong munculnya seruan untuk diadakannya referendum mengenai penyusunan suatu konstitusi yang baru.

Kami mengakhiri simposium ini dengan kajian Rima Majed terhadap gerakan yang terjadi pada bulan Oktober 2019 di Irak dan Lebanon. Majed menganalisis gerakan-gerakan ini dalam artian proses revolusioner dalam sistem politik yang dikenal sebagai consociational democracy [demokrasi dalam masyarakat yang sangat terkotak-kotak karena keragaman ideologi, kelas, etnisitas, agama, bahasa, wilayah]. Dalam pencarian "kita" yang telah hilang, para aktor sosial harus tetap menempatkan fokus sosial dan politik mereka pada tuntutan akan keadilan sosial-ekonomi seraya menolak sistem pembagian kekuasaan sektarian.

Protes Hong Kong 2019-20:

Suatu Pandangan Neo-Foucauldian

oleh **Ngai-Ling Sum**, Universitas Lancaster, Inggris Raya



Para demonstran melindungi diri mereka dengan payung terhadap gas air mata polisi di Hong Kong, 2019. Foto oleh Joe Lee.

rotes Hong Kong pada Juni 2019 dipicu oleh RUU Ekstradisi yang, jika disahkan, akan memungkinkan pemulangan para warga atau pengunjung Hong Kong ke Tiongkok daratan untuk menjalani tuntutan pidana yang menggunakan sistem rule by law [memerintah di atas hukum] (dan bukan rule of law [tak seorangpun berada di atas hukum]). Ini memicu ketakutan warga setempat terhadap hilangnya "otonomi tingkat tinggi" Hong Kong yang ada di dalam kerangka Satu-Negara-Dua-Sistem. Yang terakhir ini dijamin oleh Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris tahun 1984 dan Undang-Undang Dasar Tiongkok 1990 ketika Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok daratan sebagai Daerah Administratif Khusus (SAR) pada tahun 1997. Di bawah kerangka ini, Hong Kong memperoleh kekuasaan eksekutif dan legislatif, peradilan independen, serta hak atas seorang Kepala Eksekutif yang ditunjuk oleh pemerintah pusat berdasarkan pemilihan atau konsultasi yang diadakan di tingkat lokal.

Sejak tahun 2003, ketakutan akan hilangnya otonomi ini semakin meningkat dengan semakin merambahnya denyut

kehidupan Satu Negara di negara Tiongkok daratan yang berdaulat. Contohnya mencakup peluncuran legislasi pro-Tiongkok yang dimulai dengan Pasal 23 dari RUU anti-subversi pada tahun 2003 hingga RUU Lagu Kebangsaan [Tiongkok] pada tahun 2019. Langkah-langkah ini disertai dengan dikuranginya unsur-unsur demokrasi Hong Kong, seperti penolakan pemilihan Kepala Eksekutif secara langsung pada tahun 2015 dan diskualifikasi enam legislator pro-demokrasi dari jabatan yang dipegang pada tahun 2017. Perambahan seperti itu oleh denyut kehidupan Satu-Negara semakin ditekankan dengan dipercepatnya peluncuran RUU Ekstradisi 2019. Bahkan pemerintahan SAR, dengan dukungan dari pemerintah pusat Tiongkok, melangkahi pengawasan legislatif yang lazim dilakukan pada tahap komite dan membawa RUU tersebut langsung ke legislatif pro-Tiongkok untuk memperoleh persetujuan. Menghadapi urgensi seperti itu, pertama-pertama satu juta, dan kemudian dua juta orang berpartisipasi dalam demostrasi damai, masing-masing pada tanggal 9 dan 16 Juni. Karena lambatnya tanggapan-tanggapan resmi dan adanya tindakan brutal polisi, protes-protes tersebut berlangsung terus secara teratur. Para pemrotes memiliki lima tuntutan,

yaitu: pencabutan RUU Ekstradisi; penghentian penggambaran demonstran sebagai "perusuh"; pemberian amnesti untuk semua pemrotes yang ditangkap; dilakukannya penyelidikan independen terhadap kebrutalan polisi; dan pemberian hak pilih universal untuk pemilihan Kepala Eksekutif dan Dewan Legislatif Hong Kong. RUU itu akhirnya ditarik kembali pada tanggal 4 September 2019. Namun, karena kebrutalan polisi yang berulang dan penolakan Ketua Eksekutif untuk memenuhi empat tuntutan lainnya dari para pemrotes (lihat Tabel 1), perlawanan berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Dalam menganalisis protes ini sebagai suatu gerakan sosial, makalah ini menerapkan perspektif neo-Foucauldian yang berfokus pada biopolitik kehidupan/kematian yang berdaulat. Bagi Foucault, penguasa yang berdaulat melihat dirinya memiliki hak untuk memerintah suatu wilayah dan terlibat dalam biopolitik kehidupan/kematian untuk mempertahankan keamanan/keselamatannya sendiri. Tingkat kedaulatan tersebut berbeda-beda di masyarakat modern dan hal tersebut lebih terlihat dalam konteks otoriter iliberal dibandingkan dengan yang demokratis. Dengan dimulainya denyut kehidupan Satu-Negara di Hong Kong, pemerintahan SAR terlibat dalam pemerintahan bersama dengan rezim satu partai Tiongkok daratan dalam menjaga stabilitas/keamanan Hong Kong. Para pemrotes Hong Kong terpinggirkan dari kekuasaan-bersama otoriter ini dan hanya punya sedikit ruang untuk bermanuver. Biopolitik perlawanan mereka dengan demikian mengandalkan para pemberontak garis depan yang mempersenjatai nyawa mereka sampai (nyaris) mati; dan para pendukung di belakang yang menegaskan perlindungan bagi kehidupan para pemberontak dari ancaman (mendekati) kematian.

› Biopolitik pemberontak: Mempersenjatai hidup sampai (nyaris) mati

Dalam menghadapi meningkatnya denyut kehidupan Satu-Negara yang berdaulat di Tiongkok daratan dan terpicunya protes 2019 akibat hal tersebut, polisi (dan hukum) memainkan peran berdaulat dalam biopolitik [dengan cara]: a) melemahkan keberlangsungan protes di jalanan; b) menimbulkan rasa takut melalui penangkapan, penuntutan, dan persidangan; dan c) mencederai secara fisik melalui kekerasan yang tidak proporsional. Dengan sikap pemerintah pusat Tiongkok yang mengutuk demonstran sebagai "mirip teroris," dan sikap Kepala Eksekutif Hong Kong yang tidak menanggapi lima tuntutan mereka (lihat Tabel 1), protes telah berubah dari cara-cara yang damai menjadi yang lebih memaksakan/menggunakan cara-cara kekerasan (lihat Tabel 2). Polisi anti huru hara, dengan dukungan Ketua Eksekutif, telah bereaksi

Tabel 1: Lima Tuntutan Pemrotes Hongkong, 2019

Cabut Rancangan Undang-Undang Ekstradisi

Hentikan penyebutan para demonstran sebagai perusuh

Keluarkan amnesti bagi semua pemrotes yang ditangkap

Lakukan penyelidikan independen terhadap kebrutalan polisi

Berikan hak pilih pada seluruh warga untuk pemilihan Kepala Eksekutif dan Dewan Legislatif Hong Kong

Tabel 2: Bentuk Protes dengan Cara Damai dan dengan Cara Paksa

Sifat Protes	Contoh
Cara Damai	Demonstrasi, rantai manusia, menyanyikan lagu/berkumpul di tempat umum, membuat poster/ pertanyaan, Tembok/Dinding Lennon, advokasi Internasional, dsb.
Cara Paksa	Kaleng semprot, obor laser, bentrokan di jalan, bom bensin, barikade, pelecehan terhadap pribadi/publik, pelemparan batu bata, pembakaran gerai komersial pro-Tiongkok, pendudukan universitas, dst.

lebih keras dengan menggunakan gas air mata, penangkapan sewenang-wenang/paksa, pemukulan brutal, water cannon kimiawi, dan bahkan tembakan-tembakan senjata api. Mereka telah menyusupkan mata-mata dan menyebut pemrotes sebagai "kecoak-kecoak" yang dapat dibasmi untuk menjaga keamanan. Kondisi ini merosot ke dalam skenario "kekerasan yang menghasilkan lebih banyak kekerasan" dan para pemrotes mulai mengalami ketakutan/keputusasaan baik bersifat pribadi maupun publik.

Para pemrotes garis depan melawan dengan mempersenjatai diri untuk melindungi nyawa mereka dalam menghadapi kekerasan polisi yang tidak proporsional maupun rasa takut mereka akan masa depan-mereka sendiri, dan masa depan Hong Kong. Penolakan mereka untuk dipindahkan memberikan suatu lahan yang subur bagi pertumbuhan identitas Hong Kong. Beberapa pemberontak siap untuk mengorbankan nyawa mereka karena mereka ingin mempertahankan/ menyelamatkan kehidupan otonom Hong Kong sebagaimana diatur dalam [kerangka] Dua-Sistem. Dalam pertempuran laksana zona-perang melawan polisi, beberapa orang bahkan telah menaruh surat-surat wasiat mereka (dan catatan-catatan yang tidak terkait bunuh diri) dalam ransel-ransel mereka. Refleksi-refleksi pribadi tersebut termasuk "Menyerahkan hidup demi Masyarakat Hong Kong," "Membela Hong Kong dengan Darahku," dan "Mati demi Kebebasan," Cara-cara mempersenjatai hidup ini dalam biopolitik pemberontak Hong Kong dibingkai dengan penuh semangat dalam arti harapan/ ketakutan, kejutan, kemarahan, air mata, darah, dan (nyaris) kematian. Perlawanan melibatkan biopolitik trauma psikologis, pengorbanan diri, ketakutan akan cedera fisik, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemenjaraan, penghilangan, dan bunuh diri.

› Biopolitik afirmatif: Perlindungan hidup dari (nyaris) kematian

Biopolitik pemberontak para pemrotes mengundang upaya afirmatif untuk melindungi kehidupan. Para protagonis yang berasal dari *Gerakan Payung* tahun 2014 sebelumnya mengetahui bahwa para pemimpin [gerakan] dapat dituntut dan dipenjara. Pengalaman ini memberi sumbangan pada gerakan saat ini yang bekerja tanpa seorang pemimpin formal. Gerakan ini menggunakan strategi tanpa pemimpin dan menerapkan taktik "menjadi air" dan saling membantu. Hal ini difasilitasi oleh penggunaan aplikasi-aplikasi Internet seperti Telegram dan Airdrop untuk berbagi informasi dan



Demonstrasi massa di Hong Kong pada tahun 2019. Foto oleh Virginia Pak.

mengoordinasikan aksi-aksi/berbagai keputusan di antara mereka sendiri.

Gerakan ini didanai dari sumbangan simpatisan tanpa ikatan (cloud funding) dan diperkuat oleh kelompok-kelompok yang saling membantu lintas pekerjaan, generasi, gender dan ras. Para pendukung ini berkumpul untuk melindungi nyawa para pemberontak dari (nyaris) kematian. Satu contohnya adalah kampanye Lindungi Anak-anak yang dimulai oleh kelompok "rambut perak" (warga usia lanjut) untuk mewaspadai dan melindungi anak-anak muda yang berada di garis depan. Beberapa orang memilih untuk berdiri di antara polisi anti huru-hara dan orang-orang di garis depan; sementara yang lain memegang plakat dengan pernyataan seperti "Jangan Tembak Anak-Anak Kami." Aksi-aksi perisai kehidupan ini juga ditopang oleh rantai pasokan biopolitik yang menyediakan sumbangan, makanan, air, masker wajah (untuk perlindungan identitas/keselamatan), payung, perlindungan data, transportasi gratis, bantuan medis, perawatan sosial, penasehat hukum, dan rumah-rumah terbuka untuk menampung orang-orang garis depan.

Biopolitik afirmatif lainnya termasuk: a) membangun rantai manusia sepanjang tiga puluh mil di kedua sisi Pelabuhan Hong Kong untuk melambangkan keinginan akan kebebasan; b) menyelenggarakan perkabungan umum bagi mereka yang meninggal untuk memfasilitasi penyembuhan jiwa komunal sekaligus pembaharuan komitmen; c) menyelesaikan dan merekam lagu-lagu baru seperti *Glory to Hong Kong* dalam waktu lima hari untuk mendorong semangat juang dan menyatukan gerakan; dan d) mendirikan serikat-serikat buruh baru dan dukungan-dukungan untuk pemilihan umum guna mengkonsolidasikan energi protes jalanan. Praktik-praktik peningkatan denyut kehidupan yang serupa dapat ditemukan secara (lintas-)lokal dan (lintas-)nasional.

Para penyokong Hong Kong bergandengan tangan dengan diaspora/para pendukung untuk melakukan advokasi internasional dan diplomasi antar-masyarakat yang menargetkan komunitas-komunitas lokal, legislatif nasional, media global, dan organisasi-organisasi internasional untuk "Berdiri bersama Hong Kong" dalam perjuangan ini.

Catatan Penutup

Makalah ini menggunakan pendekatan neo-Foucauldian untuk mengupas protes Hong Kong tahun 2019-20. Mengingat hal itu terjadi dalam kondisi-kondisi yang otoriter iliberal dari kekuasaan berdaulat-bersama antara pemerintah SAR Hong Kong dan rezim satu partai Tiongkok daratan, perspektif biopolitik berdaulat penting dalam memahami protes ini. Ini menyoroti peristiwa pada tahun 2019 ketika makin digulirkannya kehidupan Satu-Negara di Hong Kong disertai oleh penolakan dari beberapa warga negara Dua-Sistem untuk menyerahkan "otonomi tingkat tinggi" mereka. Perjuangan Satu-Negara-Dua-Sistem ini diungkapkan melalui semakin meningkatnya penegasan kontrol kedaulatan dengan menggunakan kekerasan polisi secara tidak proporsional. Ini ditanggapi para pemrotes dengan biopolitik pemberontakan hidup/mati yang berdampingan dengan tindakan-tindakan biopolitik afirmatif dari pendukung dalam perjuangan politik penggeseran di Hong Kong ini.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Ngai-Ling Sum <n.sum@lancaster.ac.uk>

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada Brigitte Aulenbacher, Bob Jessop, Virginia Pak, Joe Lee dan Lancaster Stands With Hong Kong Group atas dukungan mereka dalam penulisan makalah ini dan penyediaan foto-foto.

Politik Eksperiensial dan Rompi Kuning¹

oleh Michalis Lianos, Universitas Rouen, Perancis



Kehadiran sejumlah besar polisi pada demonstrasi di Paris pada tahun 2019. Foto oleh Michalis Lianos.

erakan "Rompi Kuning" tiba-tiba muncul tanpa diduga. Masyarakat Prancis sangat tidak menyadari potensi dari gerakan semacam itu. Sudah diketahui khalayak umum bahwa lembaga-lembaga politik dan media yang mapan cenderung tidak berpihak pada gerakan ini. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan karena kelas bawah kulit putih selama ini dipandang sebagai pembatas yang tumpul di antara minoritas-minoritas ras yang tersegregasi dan berbagai lapisan kelas menengah. Yang mengejutkan adalah bahwa gerakan spontan dan non-partisan muncul dan menerobos arsitektur stratifikasi politik yang mapan dalam masyarakat pascaindustri. Ini tentu terkait dengan konjungtur yang langka dari partai politik baru ("La République En Marche") yang sekaligus memenang-

kan pemilihan presiden dan parlemen di Prancis, dan seorang Presiden yang belum pernah terpilih untuk jabatan manapun sebelumnya. Harapan untuk perbaikan tinggi dan demikian pula kekecewaan yang mengikutinya.

Gerakan ini muncul di ruang publik nasional pada 17 November 2018. Dua minggu kemudian ia menjadi berita utama global. Selama waktu itu, transformasi yang spektakuler telah berlangsung. Dari percikan awal terkait dengan pajak bahan bakar, para Rompi Kuning dengan cepat bergerak maju mempertanyakan seluruh arsitektur politik masyarakat kontemporer. Mereka sekarang menuntut ditetapkannya referendum yang diprakarsai warga sebagai alat untuk memberikan kontrol sepenuhnya kepada "rakyat" atas keputusan penting di semua bidang



Seorang demonstran menyatakan sikapnya, Paris, 2019. Foto oleh Michalis Lianos.

pemerintahan. Pada saat yang sama, mereka menyatakan bahwa mereka adalah "rakyat" dan bahwa mereka telah dihina dan diam-diam hidup hampir dalam kemiskinan, tidak dipandang oleh "elit," bahkan ketika mereka telah hadir di tengah jantung masyarakat Prancis. Perasaan berkaitan dengan legitimasi sosial itu terutama diperkuat oleh representasi diri mereka sebagai "apolitis" dan "cinta damai" karena sebagian besar dari mereka tidak pernah berpartisipasi dalam demonstrasi sebelumnya dan bersikap acuh tak acuh atau memusuhi partai politik. Oleh karena itu mereka terkejut dan tersinggung ketika berhadapan dengan penindasan dengan kekerasan, sebab mereka menganggap diri mereka sebagai warga negara yang taat hukum yang untuk pertama kali menggunakan hak mereka untuk protes.

Selain dari signifikansi gerakan protes mereka, para Rompi Kuning telah memulai tahap baru dalam struktur dan praktik gerakan sosial. Berbagai aspek orisinal mereka menantang serangkaian asumsi tentang sifat, organisasi, dan keberhasilan aksi politik kolektif. Secara singkat saya akan menyentuh lima poin yang berjenjang untuk menggambarkan minat sosiologis dari inovasi-inovasi itu:

1. Penolakan semua hubungan dengan partai politik dan gerakan-gerakan yang terkait dengannya

Bagian yang paling mengesankan dari fenomena ini adalah spontanitasnya. Para Rompi Kuning tidak berkumpul dalam suatu pendekatan atau teori politik tertentu. Mereka bahkan tidak memiliki suatu perspektif politik bersama yang longgar. Walau begitu, mereka secara naluriah merasa bahwa semua struktur politik yang telah "diformat" tidak dapat dipercaya. Siapapun yang memegang atau mencari kekuasaan, di mata mereka adalah korup, dapat melakukan korupsi atau, paling tidak, tertarik untuk mengutamakan kepentingannya sendiri, dan bukan kepentingan "rakyat". Ini bukan mau mengatakan bahwa mereka bergerak menuju "populisme." Sebaliknya, mereka tidak hanya mengecam otoriterisme tetapi juga hirarki di antara gerakan. Mereka segera menjadi komunitas individu-individu yang erat, sebuah "keluarga" sebagaimana mereka sering menyebut diri mereka, orang-orang yang dengan cemburu menjaga hak mereka untuk memutuskan secara terpisah setiap masalah ketika mereka setuju atau tidak. Mereka secara spontan menghindari kerangka atau platform sosiopolitik tertentu.

2. Keragaman Ideologi

Gerakan-gerakan sosial dikenal karena kerawanan mereka terhadap homogenitas ideologi. Sementara ketegangan dan antagonisme selalu muncul dalam sebuah gerakan, biasanya hampir diterima begitu saja, bahwa ketegangan-ketegangan itu akan berputar-putar di sekitar kendali untuk mempersatukan kerangka ideologis dan tindakan-tindakan yang menjadi konsekuensinya. Para Rompi Kuning sekali lagi merupakan pengecualian yang mencolok dari hukum homogenitas itu. Mereka tidak hanya tidak bertemu dalam ideologi politik tertentu tetapi pada waktu yang sama mereka berhasil membangun fondasi pluralis untuk tuntutan mereka. Hal itu menjadi mungkin karena mereka dengan tegas menjauhkan partai politik dari gerakan mereka dan karena mereka secara spontan menerima hidup berdampingan satu sama lain, walaupun mereka sering sangat berbeda pendapat tentang isu-isu spesifik. Penjelasan bersifat eksperiensial. Mereka berada "dalam masalah yang sama" dan yang penting adalah persamaan dari tujuan mereka dan keinginan untuk mengubah kondisi itu. Penjelasan mereka untuk kondisi itu mungkin beragam tetapi mereka selalu berhadapan dengan sistem di mana yang kuat tidak cukup menghormati "rakyat" untuk menjamin kehidupan yang layak bagi mereka.

3. Arsitektur dan Otonomi Neuronal

Gerakan ini mengorganisasikan diri di sekitar sebagian kelompok-kelompok yang tumpang tindih yang muncul baik secara daring atau secara spasial. Setiap peserta terlibat dalam diskusi-diskusi, debat-debat, pertemuan-pertemuan, dan aksi-aksi protes baik melalui satu atau lebih kelompok daring, atau satu atau lebih diskusi sampai tuntas (roundabout). Perkembangan struktur neuronal ini yang meliputi Prancis secara keseluruhan (termasuk wilayah kolonialnya yang terpencil) adalah sifat vital dari para Rompi Kuning. Kesadaran mereka tentang otonomi individu yang ditawarkan oleh Internet tercermin dalam pilihan mereka terhadap diskusi sampai tuntas sebagai titik konvergensi komunitas. Premis konseptual dalam kedua kasus itu adalah bahwa titik persimpangan yang otonom menjamin bahwa hanya jaringanlah yang memegang kekuasaan. Tidak ada atasan yang memerintah dan tidak ada bawahan yang melaksanakan.

4. Demokrasi Langsung

Secara alamiah, karakteristik-karakteristik ini membentuk fondasi simbolis yang diarahkan pada pemerintahan di mana partisipasi yang konstan dan setara dipandang sebagai prasyarat daripada sebuah tujuan utopis. Secara mengesankan, suatu gerakan para pengunjuk rasa yang berpendidikan menengah, kelas bawah, baru pertama kali melakukan protes, segera menegaskan bahwa sistem partisipasi dan keputusan yang representatif sudah usang dan berbahaya. Mereka menggunakan dua cara yang kuat untuk mengekspresikan pernyataan itu. Pertama, mereka melarang representasi gerakan oleh siapapun di tingkat mana pun. Mereka hanya memilih "jurubicara-jurubicara" hasil diskusi tuntas berdasarkan kasus per kasus, meskipun ada tekanan besar dari semua lembaga politik untuk meminta mereka memilih wakil-wakil yang tetap. Tidak pernah ada orang yang bisa berbicara atas nama para Rompi Kuning, dan upaya apapun untuk melakukannya sama dengan mengkhianati gerakan. Kedua, mereka memutuskan bahwa seluruh struktur politik masyarakat kontemporer harus berubah. Mereka menuntut diterapkannya referendum yang diprakarsai warga di setiap bidang. Mereka akan memutuskan, dan para "elit" hanya akan melaksanakan keputusan mereka.

5. Toleransi terhadap Ketidakpastian

Kita hari ini (23 Februari, 2020) berada di minggu ke-67 dari gerakan kaum Rompi Kuning. Tidak diragukan lagi ini adalah gerakan paling lama dari protes politik yang mencakup semua bidang dalam sejarah saat ini. Para Rompi Kuning tidak pernah memiliki sebuah utopia spesifik yang mereka kejar dan rencana politik khusus untuk diimplementasikan. Sebaliknya, mereka tetap terbuka secara timbal balik tentang prioritas dan gagasan pluralis mereka. Itu memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat refleksivitas kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka fokus pada kemajuan menuju perubahan politik secara keseluruhan, daripada merebut bagian kekuasaan dalam sistem yang mapan. Dengan melakukan itu, mereka tidak keberatan dengan ketidakpastian dari hasilnya. Seperti yang biasanya mereka katakan ketika saya mewawancarai mereka, "Kita harus melanjutkan. Kami akan melihat apa yang dihasilkan gerakan ini."

Meskipun tidak banyak, beberapa pertemuan, pawai, dan protes para Rompi Kuning berlanjut di berbagai tempat di seluruh Prancis. Semua orang bertanya-tanya apa dampak jangka panjang dari gerakan itu. Bagaimanapun juga, satu kesimpulan dapat ditarik dengan aman. Para Rompi Kuning telah membuktikan bahwa sebuah tingkatan baru refleksivitas politik kolektif dimungkinkan. Mereka telah membangun hubungan baru antara pengalaman individu, komunitas, dan pemerintahan sebagai prasyarat demokrasi langsung berskala besar.

1. Artikel ini didasarkan pada penelitian empiris yang ekstensif sejak Gerakan Rompi Kuning dimulai. Untuk analisis lebih lanjut silahkan melihat di <u>sini</u>, <u>sini</u>, atau <u>sini</u>.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Michalis Lianos michalis.lianos@univ-rouen.fr

> Kebangkitan Sosial

Melawan Ketidaksetaraan Neoliberal

oleh **Jorge Rojas Hernández**, Pusat Studi Air bagi Pertanian dan Pertambangan (CRHIAM), Cile, dan **Gunhild Hansen-Rojas**, Universidad de Concepción, Cile



Memukul pot dan panci untuk menarik perhatian merupakan bagian dari protes di Cile. Foto oleh Diego Correa/flickr.com. Hak tertentu dilindungi.

rotes sosial saat ini di Cile (estallido social) secara kreatif disertai dengan grafiti, mural, musik, puisi, lagu, pertemuan-pertemuan dan debat kolektif. Ketidakpuasan orang Cile yang terakumulasi secara historis diekpresikan melalui suatu bentuk estetika baru. Ketidakpuasan, kesewenang-wenangan sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial selama berpuluh-puluh tahun telah dicela dalam slogan-slogan seperti: "Cile telah bangkit!", "....hingga martabat manusia menjadi keseharian kita!", "Cile akan mengubur neoliberalisme!",

"Aku sudah kehilangan rasa takutku!", "Tidak ada lagi kesewenang-wenangan!", "Hilangkan dana pensiun privat!", "Pasar tidak melindungi hak-hak sosial!", "Kita tidak sedang berperang!", "Konstitusi baru!", "Tidak akan ada kesepakatan politik tanpa kami perempuan!", "Kami butuh demokrasi baru!", "Pendidikan gratis untuk semua!", "Hak atas air yang gratis dan publik!", "Ketakutan terbesarku adalah ketika segalanya akan tetap sama!", "Normalitas adalah masalahnya!", "hak untuk hidup damai!"

› Kebangkitan yang Menyakitkan

Pada 18 Oktober 2019 Cile berubah. Kemarahan yang terpendam telah dilepaskan dengan cara yang masif dan kreatif. Saat ini, setelah protes berkelanjutan berlangsung selama empat bulan, semangat republikan baru sudah bisa dirasakan, dan sudah tidak bisa diubah kembali. Setelah 40 tahun, orang Cile menjadi sadar akan dampak negatif dari keberlangsungan model neoliberal yang bersifat merkantilis dan tidak diatur, yaitu: ketidaksetaraan sosial, privatisasi pelayanan dasar, pensiun, pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya alam. Pemerintah menanggapinya dengan menggunakan kekerasan polisi. Lebih dari 400 orang kehilangan penglihatan mereka karena penggunaan senjata api, para perempuan telah diperkosa. Penyiksaan dan penangkapan ribuan orang secara sewenang-wenang telah berlangsung. Komisioner PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia dan organisasi internasional lain telah mengkonfirmasi bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia secara besar-besaran telah berlangsung dan telah menyerukan kepada pemerintah Cile untuk bertindak secara proaktif.

Kebangkitan masyarakat Cile tidaklah berlangsung secara spontan, melainkan merupakan hasil dari sebuah proses kompleks yang terbangun dari berbagai pengalaman negatif dan ketidakpuasan sosial. Setelah 40 tahun, sistem neoliberal telah mengalami kejenuhan dan telah memuncak menjadi krisis, menyingkap secara terbuka kerusakan tak terpulihkan yang akan sangat mempersulit negara untuk dapat bangkit kembali. Melalui protes dan derasnya aliran informasi baru, suatu kesadaran emansipatoris baru sedang berkembang di kalangan warga Cile.

› Ketidaksetaraan sosial dan ekologis dan gerakan sosial

Ketidaksetaraan sosial dan struktural di Cile tumbuh lebih cepat daripada janji-janji pasar: upah rendah, pensiun yang tidak manusiawi, privatisasi sistem kesehatan dan pendidikan dan disertai kenaikan biaya, kerentanan pekerjaan, pelayanan dasar yang terlalu mahal dan diprivatisasi, biaya hidup yang sangat tinggi, dan pemusatan kekayaan secara ekstrem. Di samping itu, generasi muda mengalami kesulitan untuk bisa masuk dalam pasar kerja, masih adanya diskriminasi terhadap perempuan, dan hak-hak masyarakat adat masih belum diakui. Sedikitnya

partisipasi publik, masalah lingkungan dan kerentanan terhadap perubahan iklim, maupun kelangkaan air dan sumber daya telah menghasilkan masalah tambahan yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar.

Kebijakan privatisasi dan individualisasi menghilangkan makna dan menghasilkan ketidakpastian terhadap masa depan. Hasilnya adalah protes dan kemunculan gerakan sosial baru: pada tahun 2006 dapat disaksikan "protes pinguin"—gerakan siswa sekolah menengah yang menuntut perbaikan sistem pendidikan publik. Gerakan siswa besar-besaran dan berpengaruh yang menuntut pendidikan gratis di tingkat universitas mulai terbentuk tahun 2011. Kedua gerakan itu memperoleh dukungan besar dari sejalan dengan publik. Di tahun 2018, gerakan "No+APF" yang melawan sistem privatisasi pensiun mulai muncul. Gerakan etnik dan terutama representasi dari komunitas Mapuche menuntut pengakuan terhadap mereka dalam konstitusi, pengembalian tanah mereka, dan otonomi tertentu sebagai minoritas etnik. Ada pula gerakan protes dan gerakan lingkungan baru melawan pembangunan megaproyek yang berdampak pada hilangnya ekosistem dan habitat. Megaproyek Hidro-Aysen di Patagonia menjadi simbol terpenting gerakan ini. Ditambah lagi, protes warga terhadap kebijakan lingkungan bisa dilihat di apa yang dinamakan wilayah-wilayah yang ditinggalkan (zonas de sacrificio) di kotamadya Quintero, Puchuncaví, dan Coronel, yang sangat terkontaminasi oleh tingkat kepadatan industrial yang sangat tinggi dan memiliki angka penyakit yang sangat tinggi. 2019 merupakan pula tahun gerakan perempuan terhadap pelecehan seksual dan untuk kesetaraan gender. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa masyarakat Cile secara bertahap telah tergerak, menyadari sisi-sisi gelap dari model yang selama ini disanjung, dan telah mulai mengorganisir secara proaktif dari bawah.

Reformasi sosial dan kontrak/pakta sosial

Dalam situasi ini, Cile membutuhkan reformasi sosial besar-besaran untuk bisa menjadi negara kesejahteraan yang bisa memberi kompensasi untuk kekurangan yang ada dan memenuhi tuntutan para pelaku protes. Suatu himpunan dari berbagai macam organisasi sosial, Mesa de Unidad Social, telah menuntut suatu pakta sosial dengan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dengan slogan "tanpa keadilan sosial tidak akan ada perdamaian." Pada 22 Desember 2019, mayoritas kotamadya di Cile berhasil menyelenggarakan suatu survei warga terkait masalah-masalah mendesak yang dihadapi masyarakat, di mana lebih dari 2.5 juta penduduk Cile berpartisipasi aktif dengan hasil sebagai berikut: 91.3% menginginkan suatu konstitusi baru; 89.9% bersedia berpartisipasi dalam suatu referendum pada bulan April 2020; sebagai besar mendukung suatu majelis konstituante yang dipilih secara demokratis. Referendum juga telah menunjukkan adanya tiga prioritas penting: pensiun yang lebih baik, sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan jaminan akses ke sistem pendidikan publik yang diperbaiki. Karena itu, suatu pakta sosial akan menjadi kontribusi penting bagi penyelesaian krisis model neoliberal yang sedang dihadapi.

Tuntutan-tuntutan sosial ini telah menjadi bagian dari demokrasi abad ke-20, tetapi sebagian telah dihilangkan oleh strategi neoliberal global. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam perkembangan dan diskusi global, capaian-capaian historis dari negara kesejahteraan tersebut harus diperjuangkan kembali di abad ke-21 dan diintegrasikan ke dalam kebijakan terkini untuk menjamin kualitas hidup rakyat, bertindak melawan populisme sayap kanan, dan mengamankan pembangunan negara-negara.

> Krisis legimitasi negara dan partai politik

Krisis sosial menunjukkan kelemahan negara yang dibentuk oleh neoliberalisme. Neoliberalisme selalu menyerukan peran minimal negara dan privatisasi dan individualisasi masyarakat. Konsekuensi merusak dari doktrin ini bisa dirasakan saat ini. Pemerintahan konservatif Cile merasa kewalahan dan bereaksi dengan kekerasan, deklarasi negara dalam keadaan darurat dan penindasan, tanpa secara jelas membedakan antara protes damai warga demokratis secara besar-besaran dan penjarahan, pembakaran, atau tindakan kekerasan destruktif yang dilakukan kelompok kecil yang terpisah.

Dalam konteks ini, *Centro de Estudios Públicos*, mempublikasikan pada Desember 2019 hasil survei mengenai kepercayaan masyarakat Cile terhadap institusi-institusinya, dengan hasil sebagai berikut: hanya 5% yang percaya pada pemerintah, 3% pada parlemen, 2% pada partai politik, dan 8% pada pengadilan. Sebagai besar rakyat menolak kekerasan sebagai bentuk protes, maupun kekerasan oleh polisi. 67% menyerukan konstitusi baru, 56% percaya bahwa konstitusi baru adalah instrumen penting untuk

menyelesaikan masalah-masalah kini. 87% mendukung pemimpin yang bisa mempromosikan dialog dan konsensus sosial dan politik. Menurut responden, tiga masalah berikut sangat penting untuk diselesaikan oleh pemerintah: 64% menyebutkan isu pensiun, 46% kesehatan, dan 38% pendidikan. Survei ini menggarisbawahi legitimasi demokrasi sebagai sebuah sistem politik.

) Untuk konstitusi baru dan demokrasi yang diperbaharui

Pada 15 November 2019, protes sosial yang kuat dan permanen mendorong pemerintah dan oposisi bersepakat untuk referendum pada 25 Oktober 2020 untuk membentuk konstitusi baru. Para wakil yang akan merumuskan konstitusi baru ini akan dipilih pada 11 April 2021 dan harus memenuhi tiga kriteria penting: adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya afiliasi dengan partai politik, dan representasi minoritas masyarakat adat.

Dengan plebisit ini dan strategi terkait untuk masa depan, Cile memiliki kesempatan historis yang unik untuk menyelesaikan masalah politik dan sosial yang ada secara damai dan demokratis dengan partisipasi semua aktor sosial. Namun satu hambatan potensial adalah penolakan dari sektor konservatif untuk mendukung proses ini karena keinginan mereka untuk mencegah konstitusi baru, modernisasi institusi dan pensiun, sistem kesehatan dan pendidikan, dan dengan demikian mempertahankan struktur pasar dan kekuasaan yang ada. Diharapkan pada akhirnya tuntutan gerakan warga akan tercermin dalam suatu proses yang damai dan demokratis, serta keberhasilan suatu peblisit yang melibatkan partisipasi luas semua sektor.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada: Jorge Rojas Hernández < jrojas@udec.cl > Gunhild Hansen-Rojas < hansen-rojas@udec.cl >

) Memahami

Pemberontakan Oktober di Irak dan Lebanon

oleh **Rima Majed**, American University of Beirut, Lebanon, dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Angkatan Bersenjata dan Resolusi Konflik (RC01), Rasisme, Nasionalisme, Indigeneitas dan Etnisitas (RC05), Sosiologi Politik (RC18), Perempuan, Gender dan Masyarakat (RC32), Kelas Sosial dan Gerakan Sosial (RC47), Gerakan Sosial, Aksi Kolektif dan Perubahan Sosial (RC48)



Karena virus corona dunia berubah, dan bersama itu teori dan analisis sosiologi berubah pula. Sumber: Creative Commons.

unia menyaksikan meletusnya mobilisasi massa di Irak dan Lebanon pada Oktober 2019 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaikan kebakaran besar, protes menyebar dengan cepat di kedua negara dan dalam beberapa hari menarik ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan pengunjuk rasa. Inti dari tuntutan para pengunjuk rasa adalah masalah pengangguran, perpajakan yang tidak adil, korupsi yang meluas, kurangnya layanan dasar seperti air dan listrik, dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Meskipun ini bukan pertama kalinya tuntutan seperti itu disuarakan di jalan-jalan, ditilik dari ruang lingkup dan besarannya protes Oktober 2019 jelas berbeda dengan gerakan sebelumnya. Di Lebanon, seperti di Irak, pemberontakan ini dengan cepat dijuluki "revolusi"—menandai perbedaan besar dengan gelombang-gelombang mobilisasi sebelumnya seperti protes yang terjadi di 2011 dan 2015 di kedua negara.

Walaupun pemberontakan-pemberontakan ini mungkin tidak termasuk dalam apa yang dalam kamus gerakan sosial didefinisikan sebagai "revolusi"—karena mereka belum menggulingkan rezim secara keseluruhan—namun gerakan ini perlu dipandang sebagai sebuah proses yang revolusioner, ketimbang sebagai peristiwa yang berhasil atau gagal. Faktanya, pemberontakan Oktober 2019 di Irak dan Lebanon terjadi dalam konteks siklus mobilisasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade di mana pada tahun 2015 para aktivis telah berhasil membentuk titik balik yang penting dengan memobilisasi ge-

rakan anti-rezim berdasarkan tuntutan sosial-ekonomi, di luar lensa politik identitas yang terlalu dibesar-besarkan. Selain itu, "ledakan sosial" revolusioner ini dengan jelas meletus dalam konteks "gelombang kedua pemberontakan Arab" yang telah dimulai pada akhir 2018 di Sudan dan Aljazair dan berhasil menggulingkan dua diktator.

Namun, apa yang membuat kasus-kasus Irak dan Lebanon sebanding, dan berbeda dengan kasus-kasus di kawasan Arab lainnya sejak 2011, adalah sistem politik yang hendak ditumbangkan oleh para demonstran di kedua negara ini. Sementara revolusi di dunia Arab semuanya terjadi di negara-negara dengan rezim atau monarki otoriter, Lebanon dan Irak adalah kasus-kasus di mana pemberontakan meletus di dalam sistem politik yang dikenal sebagai demokrasi konsosiasional—suatu pengaturan pembagian kekuasaan berbasis identitas (sektarian dan etnis) di mana rezim tidak memiliki seorang "kepala" yang jelas untuk digulingkan. Hal ini—bersama dengan neoliberalisme, klientelisme sektarian (dikenal sebagai muhasasa), dan warisan perang saudara dan kekerasan—membuat arah pemberontakan ini lebih sulit untuk ditelaah.

Sekretarianisme versus Nasionalisme: Kerancuan?

Sejak Oktober 2019, lapangan utama Lebanon dan Irak telah dipenuhi dengan pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan, sebuah

langkah simbolik yang sering diadopsi oleh para pengunjuk rasa di negara-negara tersebut untuk menyatakan penolakan terhadap pemisahan sektarian dan etnis, dan untuk menyoroti adanya "ko-eksistensi" dan "persatuan nasional" walaupun terdapat keanekaragaman. Namun, apakah nasionalisme harus berlawanan dengan sektarianisme?

Selama beberapa dekade literatur tentang sektarianisme dan nasionalisme menunjukkan bahwa dua fenomena ini tidak selalu berlawanan, karena nasionalisme sering digunakan dengan konotasi sektarian. Misalnya, nasionalisme Arab sering dikaitkan dengan nuansa Sunni, sementara nasionalisme Lebanon secara historis dikaitkan dengan suatu konotasi Kristen. Namun, di tingkat kemasyarakatan ide nasionalisme sering digunakan sebagai tanda penolakan terhadap sektarianisme. Pemberontakan di Irak dan Lebanon jelas berhadapan dengan masalah sektarianisme dalam mana hasrat terhadap suatu "bangsa yang dibayangkan" menjadi jalan keluarnya.

Di Irak, gerakan ini dimulai pada awal Oktober setelah seruan untuk mobilisasi oleh sebuah kelompok yang bernama Nazel Akhod Haqqi (Saya Memobilisasi untuk Mengambil Hak-hak saya). Slogan-slogan utama di lapangan-lapangan di Irak adalah "rakyat ingin menggulingkan rezim" yang menggemakan lagu terkenal dari tahun 2011, dan juga "kami ingin tanah air". Dalam menuntut sebuah "tanah air" atau "negara" atau "bangsa", para pengunjuk rasa mengisyaratkan keinginan terhadap negara yang mampu melayani warganya dan memberikan rasa memiliki yang melampaui fragmentasi sektarian dan etnis.

Di Lebanon dapat diamati proses membayangkan kembali sebuah "bangsa" yang serupa. Sementara pemberontakan dimulai menyusul keputusan pemerintah untuk mengenakan pajak baru-termasuk pajak untuk panggilan WhatsApp-lapangan-lapangan kota dengan cepat diisi dengan bendera nasional, dan lagu kebangsaan Lebanon terdengar berulang kali. walaupun slogan-slogan utama mencakup pula slogan terkenal "rakyat ingin menggulingkan rezim," namun kemudian ditambah slogan yang dibuat secara khusus, yakni "Semua Berarti Semua," yang mengacu pada penolakan terhadap sistem pembagian kekuasaan sektarian dan mengecam semua pemimpin, terlepas dari afiliasi sektarian mereka. Seperti halnya di Irak, penolakan terhadap sektarianisme dinyatakan melalui keinginan untuk menyingkirkan semua pemimpin sektarian dan membangun "negara" dan "bangsa" yang melindungi warganya dan memperlakukan mereka secara setara dan adil.

Sementara banyak yang percaya bahwa tingkat korupsi dan ketidaksetaraan di kedua negara adalah hasil dari sistem sektarian, pendekatan ini mengabaikan peran penting sistem ekonomi (neoliberalisme) dalam menciptakan krisis yang menyebabkan pemberontakan ini. Tantangan utama bagi gerakan di Irak dan Lebanon masa kini adalah untuk melawan dua pilar rezim sektarian-neoliberal mereka secara bersamaan: menjaga fokus pada permintaan keadilan sosial-ekonomi dan negara kesejahteraan, sambil menolak pula sistem pembagian kekuasaan berdasar pengelompokan sektarian.

› Neoliberalisme dan ketidakpuasan: Mencari "kita" yang hilang

Neoliberalisme tumbuh subur di Lebanon pasca-perang (pasca-1990) dan Irak pasca-invasi (pasca-2003). Mundurnya negara dan meningkatnya klienisme sektarian digabungkan dengan budaya politik neoliberal yang pertama-tama dan terutama berfokus pada individualisme. Budaya politik ini tidak hanya membentuk negara dan masyarakat pada umumnya, tetapi juga tercermin pada sifat aktivisme dan perbedaan pendapat yang muncul.

Sementara banyak aktivis telah aktif dalam gerakan sosial dan kampanye selama beberapa dekade terakhir, terlihat bahwa beberapa di antara inisiatif terbesar dan paling efektif masih berkisar di pusaran individu. Misalnya, salah satu kampanye pemilihan umum utama yang tumbuh dari mobilisasi 2015 di Lebanon adalah Beirut Madinati (Beirut, Kotaku). Alih-alih menekankan pada "kita" yang bersifat kolektif yang memikirkan kembali kota sebagai ruang bersama untuk semua warga dan menentang logika individualisme tentang neoliberalisme, nama tersebut malah menekankan pada hubungan individu dengan kota. Demikian pula, setelah keruntuhan keuangan pada tahun 2019, para aktivis pemberontakan Lebanon menyemprotkan grafiti di jendela-jendela bank dengan ujaran "Kembalikan Uang Saya" dan bukannya "kembalikan uang kami." Sementara kemarahan kolektif terhadap bank nampak jelas, budaya politik yang membentuk aktivisme masih merupakan produk dari sistem yang sedang dilawannya.

Banyak kampanye juga menekankan pendekatan berbasis hukum dan hak-hak rakyat yang tampaknya masih terlepas dari realitas di Lebanon dan Irak. Di kedua negara, sistem hukum dan peradilan sangat lemah dan korup, dan rakyat kurang percaya pada keduanya. Oleh karena itu, bahasa "hak" dan "kewajiban" tidak menempati ruang sentral dalam imajinasi politik rakyat di kedua negara tersebut. Namun, beberapa gerakan dan kampanye politik terkemuka justru memusatkan "hak" individu sebagai lokus aktivisme mereka. Beberapa contoh mencakup kampanye di Irak yang telah disebutkan sebelumnya: "Saya Memobilisasi untuk Mengambil Hak Saya"; atau kelompok politik yang sangat aktif dalam pemberontakan Lebanon yang disebut "Li Haqqi" (Untuk Hak Saya). Penekanan pada hak-hak individu ini merujuk pada kerinduan akan negara-bangsa modern yang dikhayalkan, di mana lembaga-lembaga negara dapat mempertahankan hakhak individu secara setara, meskipun dilanda korupsi dan klienisme sektarian.

Konsekuensi lebih lanjut dari sistem sektarian-neoliberal di Irak dan Lebanon adalah tidak adanya organisasi atau serikat politik yang mewakili alternatif politik yang dapat berfungsi sebagai perancah bagi transisi pemberontakan ke dalam sistem politik baru. Dengan penyebaran COVID-19 saat ini, kemunculan dan pengorganisasian suatu "kita" yang hilang menjadi prioritas untuk mengalahkan suatu sistem yang jelas-jelas tidak dapat melindungi masyarakat, baik dari bencana ekonomi, maupun dari pandemi kesehatan.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Rima Majed <m138@aub.edu.lb>

Media dan Komunikasi dalam Kapitalisme Digital:

Perspektif Kritis

oleh **Marlen van den Ecker**, Universitas Friedrich Schiller Jena, Jerman dan **Sebastian Sevignani**, Universitas Friedrich Schiller Jena dan Universitas Paderborn, Jerman



Dalam kapitalisme digital pengguna sering berfungsi sebagai pekerja tak berbayar. Foto oleh Alex Kotliarskyi/unsplash.com.

eknologi media kontemporer berkembang dan digunakan untuk berkomunikasi dalam kondisi sosial yang kerap kali dijuluki "kapitalisme digital." Berbeda dengan diagnosis "pascaindustri," "informasi," atau bahkan "masyarakat berpengetahuan global," "kapitalisme digital" menyatakan bahwa perubahan sosial secara simultan memperlihatkan keberlanjutan penting yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial dasar dari eksploitasi ekonomi, alienasi budaya, dan dominasi politik.

Kapitalisme digital beroperasi secara berbeda di berba-

gai penjuru dunia: sementara di satu sisi dunia kapitalisme digital mendorong pembentukan kelas-kelas kreatif dan pengetahuan serta memacu konsumerisme, di sisi lain jutaan orang mencari nafkah dengan mengekstraksi bahan mentah yang diperlukan atau merakit komponen-komponen dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Namun dalam keragaman ada pula kesatuan: para pengguna berperan sebagai kelas baru yang dieksploitasi oleh platform media sosial atau produsen media digital. Teknologi pengawasan (surveillance) mengancam hak-hak pribadi warga negara. Kepentingan yang didorong oleh modal mencegah potensi demokratis dan subversif dari media akar rumput yang diorganisasi secara mandiri.

Dengan semakin meningkatnya relevansi teknologi media digital, sosiologi media kritis dan komunikasi menawarkan wawasan bagi pemahaman kita tentang perubahan sosial secara luas dan bahkan memainkan peran sebagai perintis bagi disiplin ilmu kita. Hal tersebut berkontribusi pada sosiologi industri dan kerja ketika menjelaskan gelombang baru rasionalisasi, (de-)kualifikasi, dan reorganisasi aktivitas kerja serta rantai nilai. Sosiologi media kritis dan komunikasi berinteraksi dengan sosiologi ekonomi dan konsumen saat menyelidiki peran penting data besar (big data), algoritme, iklan bersasaran, dan platform digital sebagai pasar baru. Sosiologi media kritis dan komunikasi bekerjasama dengan sosiologi budaya dan politik, menyelaraskan ranahnya dengan industri budaya digital dan transformasi ruang publik kontemporer. Dan sosiologi media kritis dan komunikasi merangsang perkembangan teori sosial, di kala bidang tersebut menguak kekaburan hubungan antara komunikasi dan tenaga kerja dalam fenomena digital seperti "prosuming" [produksi oleh konsumen].

Wawasan kritis yang disajikan dalam artikel-artikel di simposium ini diharapkan membuka jalan bagi inisiatif baru untuk menelusuri ulang isu-isu ini hingga ke akar-akarnya.

Berhubung penelitian sosial kritis yang telah ada nampaknya tidak banyak membahas media dan komunikasi, dan, di sisi lain, penelitian komunikasi sering mengabaikan masalah eksploitasi melalui kerja digital, Marisol Sandoval dan Sebastian Sevignani menghubungkan komunikasi dan kerja dengan berpikir melalui "eksploitasi digital." Sering kali diabaikan bahwa produksi budaya media global kontemporer tergantung pada komunikasi dan kerja sama—yang dikendalikan dan dikelola oleh *Big Tech*. Sebagai pengguna platform media sosial, kita berfungsi sebagai pekerja digital yang tidak dibayar untuk perusahaan-perusahaan ini, di kala mereka meraup laba dari jejak data para pengguna.

Cendekiawan Australia Mark Andrejevic turut memanfaatkan logika model-model bisnis berbasis data. Artikelnya membahas kecenderungan meningkatnya data yang dihasilkan secara otomatis dan peran kepemilikan dan akumulasi kapitalis. Alih-alih bertanya apakah sistem-sistem otomatis harus digunakan, Andrejevic mempertanyakan bagaimana sistem-sistem tersebut telah dirancang sejauh ini.

Dengan menulis dari Hong Kong, Jack Linchuan Qiu membahas kemungkinan pembentukan kelas pekerja digital baru. Contoh Tiongkok menunjukkan bahwa teknologi pengawasan (surveillance) pemerintah memang kuasa melakukan kontrol sosial terhadap ruang publik. Namun Qiu menunjukkan bahwa, ketika berfokus pada pola temporal yang berbeda, kelas pekerja digital dapat menampilkan potensi subversif saat mereka terlibat dalam aksi-aksi disruptif kolektif seperti aksi memperlambat kerja, sabotase, atau pemogokan. Perjuangan kelas pekerja digital adalah untuk mendorong cara-cara baru demi mendapatkan kedaulatan temporal.

Bahkan meskipun secara umum dibingkai seperti ini, rekan kami Tanner Mirrlees dari Kanada meragukan bahwa Tiongkok adalah pesaing serius bagi AS. Ia menggarisbawahi bahwa AS tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar: teknologi digital dan industri budayanya juga jauh melampaui pesaingnya, Tiongkok, dalam hal ukuran, jangkauan, dan laba pada saat ini.

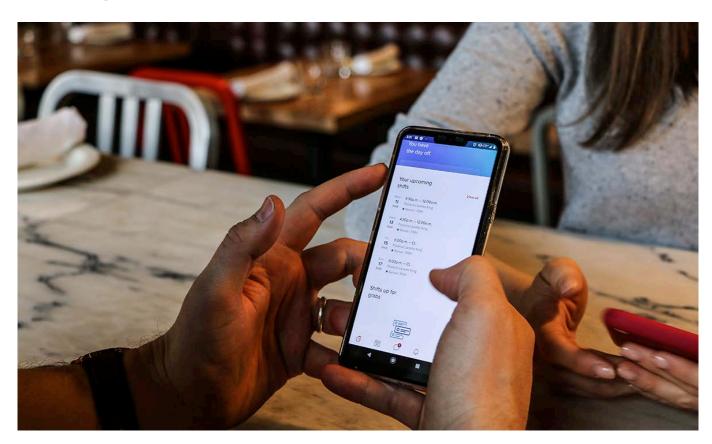
Artikel terakhir, yang disediakan oleh rekan kami Mandy Tröger, mengajarkan kepada kita pelajaran sejarah tentang transformasi pascasosialis sistem media setelah reunifikasi Jerman. Pada musim semi 1990, inisiatif yang tak terhitung jumlahnya di Republik Demokratik Jerman untuk menciptakan pers Jerman Timur yang bebas dan demokratis dengan cepat digilas oleh segelintir kelompok politik dan ekonomi Jerman Barat yang membangun struktur pasar untuk kepentingan mereka. Ini menjadi contoh utama bagaimana, sepanjang sejarah, infrastruktur media dengan potensi demokrasi telah berulang kali tergusur oleh kepentingan ekonomi swasta.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Marlen van den Ecker <<u>marlen.van.den.ecker@uni-jena.de</u>>
Sebastian Sevignani <<u>sebastian.sevignani@uni-jena.de</u>>

> Eksploitasi Digital:

Menghubungkan Komunikasi dan Kerja

oleh **Marisol Sandoval**, City, Universitas London, Inggris Raya, dan **Sebastian Sevignani**, Universitas Paderborn dan Universitas Jena, Jerman



Dalam menganalisis media dan komunikasi peran kerja sering diabaikan. Foto oleh 7shifts/unsplash.com. Creative Commons.

edia kritis dan sosiologi komunikasi sedang menghadapi suatu dilema teoretis dan praktis: Sementara untuk teori sosial kritis, yang diilhami oleh pemikiran Marxis dan Marxian, kegiatan produktif merupakan kunci untuk memahami momentum transformasi sosial, komunikasi dan media cenderung tetap menjadi isu-isu marginal. Penelitian komunikasi kritis, di sisi lain, menganalisis ideologi dan efek-efek media tetapi sering mengabaikan [aspek] kerja (labour). Tampaknya pemikiran Jürgen Ha-

bermas yang berpengaruh yang membedakan antara tindakan instrumental dan tindakan komunikatif sebagai dua bidang kehidupan sosial yang terpisah menghantui tidak hanya sosiologi media dan studi komunikasi arus utama tetapi juga membatasi tradisi kritis. Ini menciptakan keterbatasan serius untuk memahami media dan komunikasi di era digitalisasi. Karena itu kami mengusulkan pendekatan integratif yang dibangun pada tradisi penelitian humanis kritis. Kami mengusulkan tiga cara di mana komunikasi dan kerja secara praktis dan teoretis saling terkait.

) Kondisi Kerja di Media

Cara pertama, dan mungkin cara yang paling jelas untuk menghubungkan komunikasi dan kerja adalah dengan menganggap serius kondisi kerja yang menopang budaya media kontemporer dalam skala global. Setelah para kritikus dengan tepat menggambarkan pekerjaan sebagai titik buta (blind spot) dari penelitian media dan komunikasi, banyak penelitian selama dekade terakhir telah menyelidiki kondisi kerja di berbagai profesi sektor media dan budaya termasuk jurnalisme, desain, mode, media, dan seni. Studi-studi ini mendokumentasikan bahwa, di balik etika meritokrasi, keremajaan, keterbukaan, kreativitas, otonomi, dan realisasi-diri yang melingkupi industri-industri ini, ada ketidaksetaraan struktural pada ras, kelas, dan gender, kontrak-kontrak yang rawan (precarious), kerja yang tidak berbayar, dan budaya jam kerja yang panjang, stres dalam pekerjaan, kecemasan, kecenderungan menyalahkan diri sendiri, persaingan, dan individualisme.

Pandangan lebih jauh sepanjang rantai pasok produksi budaya global mengungkapkan adanya lapisan kedua yang lebih dalam tentang bagaimana budaya media terkait secara struktural dengan produksi fisik. Budaya media kontemporer tidak akan terbayangkan tanpa kerja dari ribuan pekerja industri yang merakit komputer dan produk-produk elektronik di pabrik-pabrik di seluruh dunia. Penelitian terhadap pekerjaan di bidang manufaktur elektronik secara kuat menunjukkan bahwa budaya digital modern secara struktural ditopang oleh industri yang melanggengkan kondisi kerja yang menyerupai masa-masa awal kapitalisme industri. Meskipun ada skandal-skandal-seperti serangkaian bunuh diri pekerja di Foxcoon pemasok Apple pada tahun 2010—kenyataan sehari-hari para pekerja ini sebagian besar tetap tersembunyi di balik permukaan ramping dari gadget-gadget modern dan kampanye-kampanye iklan yang menekankan ringannya [produk] dan inovasi. Dengan melihat, misalnya, pada [kedudukan] para jurnalis, desainer, dan seniman sebagai pekerja, sambil juga membingkai manufaktur elektronik sebagai kerja industri dan komunikasi, menunjukkan bahwa media, seni, dan komunikasi tidak pernah menjadi sekadar fenomena superstruktur tetapi sangat terintegrasi ke dalam ekonomi kapitalis dan struktur eksploitasi.

) Berkomunikasi untuk berproduksi

Kedua, dapat dikatakan bahwa untuk berproduksi, seseorang harus berkomunikasi dan bekerja sama. Setiap produksi terjadi di dalam hubungan produksi yang komunikatif dan termediasi. Di sini sosiologi media dan komunikasi berinteraksi dengan sosiologi kerja dan penelitian-penelitian tentang bagaimana kerja diorganisasikan dan dikendalikan. Teknologi-teknologi komunikasi dan media (baru), seperti surel, telepon pintar, dan platform digital yang menciptakan budaya yang-selalu-daring, berkontribusi pada penambahan jumlah total jam kerja, dan mengintegrasikan bentuk-bentuk kerja baru yang seringkali tidak berbayar ke dalam rantai nilai. Hal-hal tersebut juga mengintensifkan kerja dengan menjadikan pembagian dan komposisi ulang di tempat kerja maupun antarperusahaan lebih efisien dan fleksibel demi kepentingan dinamis dari modal. Untuk angkatan-angkatan kerja tertentu, aplikasi media seperti Slack mendukung perubahan ke arah bentuk kerja yang semakin otonom, berorientasi dialog, dan eksploratif yang mengalihkan tugas manajemen tradisional kepada pekerja pengetahuan dan proyek. Berbagai bentuk aplikasi umpan balik dan alat-alat evaluasi yang algoritmik kemudian digunakan untuk memastikan bahwa kerja kooperatif dan komunikatif yang "otonom" seperti itu masih dapat dikendalikan dan diarahkan oleh mereka yang menguasai alat produksi komunikasi.

) Komunikasi sebagai produksi

Pilihan ketiga untuk menghubungkan komunikasi dan kerja agak kontra-intuitif: Komunikasi itu sendiri dapat dilihat sebagai pekerjaan dan produksi. Ini menjadi masuk akal jika kita membayangkan komunikasi memiliki struktur yang sama dengan kerja dan jika kita mengintegrasikan keduanya ke dalam kerangka yang sama sebagai aktivitas objektifikasi. Manusia secara kooperatif menggunakan alat dan bahan (mentah) untuk menghasilkan objek dan dengan demikian-menghadapi kedaulatan dunia materi yang terkadang resisten—hal-hal tersebut mengembangkan dan memperbaiki subjektivitasnya. Ini adalah titik awal antropologi Marxis yang menganggap manusia sebagai makhluk sosial yang aktif, melakukan objektifikasi, merampas, dan belajar. Alih-alih melakukan obyektifikasi kemampuan seseorang menjadi objek material, komunikasi melibatkan kerja yang menggunakan tanda-tanda dan simbol-simbol dengan memakai alat komunikasi (Raymond Williams), yaitu, tanda-tanda lain, simbol-simbol lain, dan media lain, untuk memproduksikan informasi. Kata informasi yang berasal dari bahasa Latin—"in-formare," yang berarti membentuk atau mengesankan dan menginformasikan seseorang-mengungkapkan ini dengan sempurna. Tanda-tanda yang diobyektifikasikan atau makna-makna yang dikodekan (dari Stuart Hall dan Kajian Budaya Inggris) harus dirampas atau diterjemahkan (decoded), dan ini memiliki efek: Alih-alih menstrukturkan dunia materi, komunikasi menstrukturkan pengaturan psikis komunikator sendiri dan subyek-subyek lain. Orang hanya dapat berkomunikasi dengan bekerja dengan tanda-tanda dan setiap interaksi, baik itu yang paling langsung, maupun yang sebenarnya dimediasi oleh dunia material-simbolis ini.

Bayangkanlah misalnya para pengguna yang terpikat pada taman-taman berdinding dari platform media sosial yang dimonopoli, seperti Facebook, Instagram, Weibo, Snapchat, TikTok, dan lainnya. Dalam kerangka [pemikiran] baru yang diusulkan [di atas], mereka secara aktif berkomunikasi tetapi sekaligus prosumen yang dieksploitasi. Objektifikasi komunikasi mereka terus meninggalkan jejak data yang diperhitungkan oleh modal media sosial dalam model bisnis mereka yang berbasis pengawasan (surveillance). Tanpa aktivitas komunikasi dari pengguna Internet dan perampasan obyektifikasi mereka, tidak akan ada komoditas untuk dapat dijual ke industri periklanan dan tidak ada keuntungan bagi media sosial komersial. Dalam hubungan sosial yang tidak setara dan eksploitatif di antara kerja/komunikasi dan modal ini, modal [selalu] berusaha untuk mendorong kita menggunakan media digital secara lebih keras dan lebih intensif; mereka mengarahkan dan menyalurkan aktivitas komunikasi kita kepada periklanan dan konsumerisme. Aktivitas pengguna dengan demikian diserap menjadi modal; Modal (media sosial) menjadi aktivitas komunikatif "mati" yang dikendalikan oleh kelas-kelas sosial yang kaya untuk selanjutnya mengeksploitasi orang-orang lain.

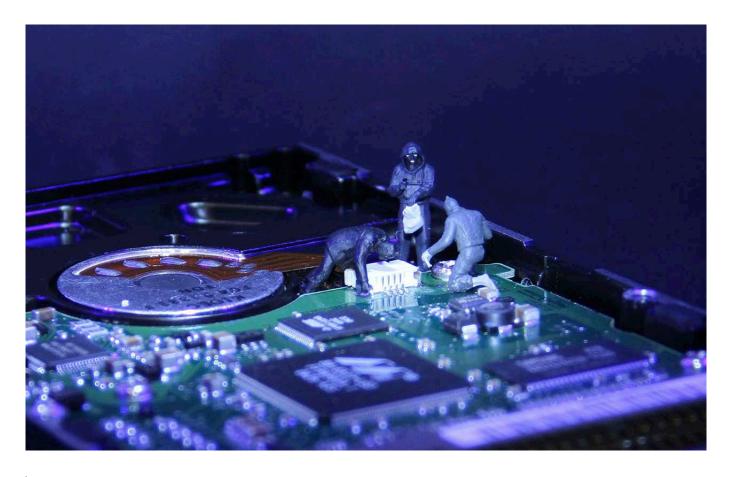
Namun, kepentingan laba di balik modal media sosial tidak hanya mengeksploitasi komunikasi dan mereproduksi hubungan sosial yang tidak setara demi kepentingan mereka sendiri; ini juga merembet ke bentuk alienasi digital yang lebih umum. Di zaman data besar (big data) dan algoritma, yang diajarkan oleh aktivitas komunikasi kita, adalah hal yang sulit untuk mempertahankan dan bahkan membayangkan suatu bentuk informasi yang secara merdeka dan manusiawi dapat ditentukan sendiri tanpa benar-benar menantang ekonomi politik yang mendasari kapitalisme digital. Perampasan obyektifikasi-obyektifikasi komunikasi dan alienasi dari aktivitas komunikasi telah mulai menjadikan kita sebagai objek, bukan subjek, dari era digital.

Dengan memperluas analisis budaya media di luar konten dan efek media, pendekatan integratif humanis yang kami usulkan membuat kita berada pada posisi yang lebih baik untuk memahami kompleksitas kapitalisme komunikasi dan untuk mengkritik ketimpangan distribusi dalam kerja budaya global. Hal ini juga memungkinkan kita untuk memperhatikan momen-momen solidaritas yang mungkin muncul dari pengalaman eksploitasi dan alienasi yang lazim dalam modal media global. Menyelidiki cara-cara di mana komunikasi dan kerja yang dibentuk oleh kontradiksi kapitalisme global dan bagaimana hal-hal tersebut dapat memberi sumbangan bagi transformasinya tetap merupakan suatu tugas berkelanjutan bagi sosiologi media dan komunikasi yang kritis.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada: Marisol Sandoval <<u>marisol.sandoval.1@city.ac.uk</u>> Sebastian Sevignani <<u>sebastian.sevignani@uni-jena.de</u>>

Mengautomasikan Kapitalisme

oleh Mark Andrejevic, Universitas Monash, Australia



Automasi: menciptakan suatu dunia material yang ditujukan untuk melayani manusia? Foto oleh Franck V./unsplash.com. Creative Commons.

■de "automasi" dalam dunia yang abstrak, terlepas dari hubungan-hubungan sosial, mengundang khayalan mengenai suatu dunia materi yang diabdi-■kan pada pelayanan kepada manusia, seperti: rumah-rumah yang, tanpa diminta, menyediakan kebutuhan kita, pabrik-pabrik yang bekerja untuk kita, ruang-ruang yang menyambut kita dengan membukakan pintu, memainkan musik, bahkan menangkap kita ketika kita terjatuh. Namun, dalam situasi hubungan sosial kontemporer, bentuk konkret automasi tampak seperti distopia, yang cenderung menyerupai penjelmaan alienasi. Kita tahu bahwa aktivitas kita sendiri saat ini, yang disaring melalui sistem-sistem terautomasi, membentuk lingkungan informasi kita-musik yang mengalir melalui platform kita, berita yang membanjir melalui dinding media sosial kita, hasil yang kita peroleh dari laman pencari-meskipun kita tidak tahu bagaimana

caranya. Kita juga tahu bahwa sistem terautomasi, dalam banyak kasus, menilai kinerja kita di tempat kerja, kelayakan kita untuk memperoleh kredit, dan peluang hidup kita.

Automasi akan memainkan peran makin penting di bidang kemasyarakatan karena infrastruktur interaktif yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Ini menghasilkan sedemikian banyak data, secara otomatis, sehingga satu-satunya cara untuk memanfaatkan data ini adalah dengan mengolahnya—juga secara otomatis. Di kala informasi digital mengkonfigurasi ulang dunia kita, maka automasi perlu menyertainya.

Dengan demikian pertanyaan penting yang dihadapi peneliti media adalah seperti apa bentuk yang akan dihasilkan melalui automasi sebagai hasil penyesuaian dengan prioritas modal. Inilah pertanyaan yang perlu diajukan tentang interak-

tivitas [suatu cara berkomunikasi antara media dan pengguna] di kala pada suatu waktu, belum lama berselang, sempat didengungkan bahwa interaktivitas, pada umumnya, adalah pelopor demokrasi dan pemberdayaan massa.

Inilah pertanyaan yang kini perlu kita ajukan untuk menjawab "janji" automasi—yang, bukan secara kebetulan, menggantikan interaktivitas, sebuah istilah yang penggunaannya sempat memuncak di sekitar awal milenium ini, tapi kini telah memudar. Ini bukanlah pertanyaan baru—ini adalah sebuah kritik terhadap ekonomi politik, yang secara terus menerus membayangi kritik terhadap kapitalisme. Jika imbas dari [skandal] Cambridge Analytica dan serangan balik terhadap "kapitalisme pengawasan" ini diharapkan akan berdampak konstruktif, hal tersebut harus berbentuk fokus pada pemulihan pengaturan kekuasaan ekonomi-politik—dan, dalam konteks media, pada sistem terautomasi yang membentuk lingkungan informasi kita. Pertanyaannya bukanlah apakah automasi akan diterapkan, melainkan dengan cara bagaimana.

Untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan keterikatan pada logika automasi di bawah kondisi kepemilikan dan akumulasi kapital. Mengingat cepatnya perkembangan teknologi, salah satu pendekatan yang potensial produktif adalah untuk mengenali logika yang membentuk cara-cara yang tak terhitung jumlahnya melalui mana automasi akan digunakan untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan meningkatkan kontrol. Keuntungan dari pendekatan seperti itu adalah bahwa cara itu menelusuri hubungan antara perkembangan terkini dan mengidentifikasi tren dan kecenderungan di masa mendatang. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk mengantisipasi, ketimbang untuk bereaksi: untuk bisa membayangkan kemungkinan membentuk teknologi berdasarkan prioritas yang disepakati bersama, ketimbang untuk menyerahkan kontrol pada generasi penerus para Zuckerberg dan Bezos.

Kita dapat mulai dengan mengidentifikasi tiga kecenderungan automasi yang saling berkaitan dengan kondisi kini dan mempertimbangkan implikasinya: *preemption* (langkah mendahului), *framelessness* (ketiadaan bingkai), dan *operationalism* (operasionalisme).

Preemption merujuk pada manajemen risiko dan kesempatan berdasar janji prediktif dari pengumpulan dan penambangan data secara automasi. Logika ini menjadi semakin familier: Amazon membayangkan kemungkinan untuk mengirimkan produknya kepada kita sebelum kita tahu apakah kita menginginkannya (mendahului hasrat/ preempting desire); kebijakan prediktif kepolisian membayangkan kemungkinan menggagalkan kejahatan pada saat akan dilakukan. Sistem keamanan terautomasi menjanjikan bisa mendeteksi suatu pukulan pada saat dilayangkan namun belum mengenai sasarannya. Waktu perseribu detik antara dua momen tersebut menandai interval dari preemption terautomasi: momen di kala sistem nantinya mungkin bisa merespon sebelum pukulan didaratkan.

Preemption, dalam semua konteks ini, tergantung pada sensorisasi dan pengumpulan data terautomasi. Memahami hasrat konsumen dan niatan penjahat sebelum mereka sendiri mengetahuinya berarti belajar sebanyak mungkin mengenai mereka melalui sensor yang melekat serta pengumpulan

data kolektif yang komprehensif. Dengan demikian preemption tidak dapat dipisahkan dari pemantauan spektrum penuh yang berada di mana-mana: mengumpulkan apapun dan menyimpannya untuk selamanya.

Framelessness menggambarkan sekaligus upaya (yang tidak mungkin) untuk menggandakan dunia dalam bentuk digital (artinya, untuk tidak menyisakan apapun, tidak ada apapun di luar bingkai) dan pemanfaatan ulang data untuk keperluan lain secara berkelanjutan. Kita menemukan bahwa kerangka konvensional relevansi data kita terganggu ketika kita diberitahu bahwa penjelajah web (browser) yang digunakan untuk mengisi lamaran pekerjaan merupakan prediktor yang lebih baik mengenai kinerja dalam pekerjaan di masa depan daripada apapun yang dicantumkan dalam formulir, atau bahwa tulisan tangan kita, atau jumlah panggilan telpon kepada ibu kita barangkali akan menunjukkan tingkat kelayakan kita untuk memperoleh kredit. Dalam konteks demikian penjelasan naratif tersisihkan, karena mereka berusaha menerapkan ulang suatu kerangka dengan mendeskripsikan mengapa suatu variabel tertentu mungkin relevan. Namun mereka tertinggal di belakang mesin korelasi, yang membayangkan dapat membuangnya secara keseluruhan. Sebagaimana dijelaskan Chris Anderson dalam belasungkawanya bagi penjelasan: "Muncul di setiap teori tentang perilaku manusia, dari linguistik hingga ke sosiologi. Lupakan taksonomi, ontologi, dan psikologi. Siapa yang tahu mengapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan? Intinya adalah mereka melakukan itu dan kita bisa menelusuri dan mengukurnya dengan tingkat keyakinan yang tidak ada presedennya. Dengan data yang cukup, angka akan berbicara."

Mengikuti karya Harun Farocki tentang gambaran "operatif" ("operative" images) kita bisa mendeskripsikan ini sebagai "operasionalisme" (operationalism): informasi yang tidak perlu ditafsirkan lagi karena informasi tersebut bertindak. Artinya, informasi menghasilkan suatu luaran tanpa perlu interpretasi: siapapun yang menggunakan penjelajah web yang benar atau kapitalisasi yang tepat akan memperoleh pekerjaan atau pinjaman. Siapapun yang cocok dengan pola bisa ditangkap, dipromosikan, atau dijadikan sasaran.

Logika ini—preemption, framelessness, dan operationalism berlaku lintas spektrum proses terautomasi, mulai dari targeted ads (iklan untuk khalayak tertentu) hingga serangan drone yang khas—dari penjualan hingga ke ke pembunuhan. Logika ini mengidentifikasi bahwa lokasi kekuasaan berada di tangan mereka yang memiliki akses terhadap data dan kekuasaan untuk memprosesnya. Pengumpulan data secara otomatis ini mempersyaratkan proses terautomasi dan menfasilitasi respon terautomasi. Pada waktu yang bersamaan, logika semacam itu menandai suatu ruang perlawanan: tantangan yang berasal dari keterbatasan kita yang tidak dapat dikurangi. Tujuan kekuasaan adalah untuk mengaburkan fakta bahwa ambisi framelessness itu bersifat agung dan tidak dimungkinkan—yang berarti bahwa kita tidak akan pernah bisa menyempurnakan preemption ataupun mengesampingkan penjelasan.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada: Mark Andrejevic </br>
<Mark.Andrejevic@monash.edu>

> Temporalitas

dan Pembentukan Kelas Buruh Digital Tiongkok

oleh Jack Linchuan Qiu, The Chinese University of Hong Kong



Teknologi digital telah hadir di mana-mana. Teknologi digital dapat digunakan untuk mengendalikan tetapi juga untuk melawan. Foto oleh Owen Winkel/unsplash.com. Creative Commons.

erkat bantuan platform media digital, layanan berbasis lokasi, dan kecerdasan buatan (AI), pemerintah Tiongkok secara dramatis telah memperketat kendali sosial atas pergerakan spasial rakyatnya dan perubahan geografi kota-kota dan daerah pedesaannya. Akan tetapi artikel ini berpendapat bahwa bila kita menggeser perhatian dari spasialitas ke temporalitas sambil memeriksa proses pembentukan dan peniadaan kelas buruh digital Tiongkok, kita bisa melihat bahwa Beijing sebenarnya mulai kehilangan kendali. Kelas di sini dipahami dalam pengertian Marxis yang secara umum merujuk pada "waktu revolusi" dan pengertian Weberian yang bicara tentang "waktu konsumsi."

Revolusi dan konsumsi merupakan dua moda temporalitas yang berlawanan; yang pertama bersifat disruptif, kolektif, antikapitalis, memandang ke depan, heroik dan hiperhistoris—yang saya istilahkan sebagai "spiky time" (waktu yang bergelombang), meminjam istilah Richard Florida dalam buku "The World is Spiky" (Dunia itu Bergelombang); yang kedua adalah berkelanjutan, individualistik, neoliberal, kekinian, profan, dan ahistoris—yang disebut "waktu rata," memakai tesis Thomas Friedman dalam buku "The World is Flat" (Dunia itu Rata). Saya memilih berfokus pada penduduk kelas buruh Tiongkok karena, bila dibandingkan kelompok-kelompok sosial lain, mereka cenderung mendiami temporalitas yang beragam. Karena itu mereka layaknya museum komprehensif berisi tatanan-tatanan temporal yang hidup bersama sembari

mempunyai konflik internal, yang memungkinkan pengamatan yang dinamis terhadap interaksi antara waktu bergelombang dan waktu rata

Waktu bergelombang dan waktu rata membentuk dua kutub dari suatu medan magnetik yang dipenuhi dengan berbagai temporalitas yang, menurut kerangka teori Raymond William, menjadi bagian dari yang residual, yang dominan dan yang sedang bangkit. Sementara waktu rata itu dominan di kalangan kebanyakan buruh yang hidup sehari-harinya semakin bersifat digital, waktu bergelombang dalam momentum-momentum yang sedikit-banyak terfragmentasi mengendap-endap di antara yang residual dan/atau muncul sebagai daya perubahan, melubangi permukaan waktu rata, alias "waktu abadi" (timeless time) à la Manuel Castells. Sementara waktu bergelombang membantu perlawanan kolektif dan pembentukan kelas buruh digital menjadi kelas bagi dirinya, waktu rata menghalangi formasi kelas dengan mendorong buruh untuk hidup dalam kondisi yang terasing, memimpikan mimpi orang lain, dan lupa bahwa identitas mereka sebenarnya bisa mengarah pada sesuatu yang unik: solidaritas kelas buruh.

Yang bergelombang dan yang rata juga mirip. Di Tiongkok, keduanya bertentangan dengan linearitas temporal yang merupakan ciri rezim-rezim masa lalu, apakah Konfusian (memuja kemunduran), Buddhis (reinkarnasi sirkular), atau Modernis (progresif tapi mudah ditebak). Waktu rata tidak regresif tapi

juga tidak progresif atau sirkular, sementara waktu bergelombang ditentukan oleh tepian-tepiannya yang tak rata yang merupakan akibat dari tabrakan antara kemajuan dan kemunduran, yang tercipta lewat apa yang disebut Stuart Hall sebagai "politik tanpa jaminan."

Baik waktu bergelombang maupun waktu rata sama-sama kuat karena sinkron. Coba pikirkan pemogokan nasional para supir truk melawan Yunmanman (platform transportasi untuk truk jarak jauh di Tiongkok) pada tahun 2018, mirip dengan perlawanan terhadap Uber di kota-kota di Barat tetapi dalam kasus ini terjadi pada skala nasional; atau festival belanja daring tahunan "Singles Day" (Hari Jomblo) setiap tanggal 11 November, ketika para konsumen di Tiongkok dari berbagai kelas sosial berbelanja daring secara spektakuler. Para buruh bisa berada pada waktu rata selama 360 hari dalam setahun namun menghabiskan lima hari yang tersisa dalam waktu bergelombang, biasanya karena sebab-sebab struktural yang memicu tindakan agen.

Vektor kunci yang membedakan kedua makna waktu tersebut—bergelombang atau rata, Konfusian atau Buddhis atau Modernis—adalah yang disebut Judy Wajcman sebagai "kedaulatan temporal" (temporal sovereignty), yaitu siapa yang memegang kuasa tertinggi untuk menentukan temporalitas. Apa unit terkecil dari waktu? Bagaimana unit-unit itu berhubungan satu sama lain? Apa itu totalitas temporal yang bermakna?

Sementara makna-makna tradisional dari waktu seperti pada Konfusian mengandaikan kuasa-kuasa transandental, temporalitas Modernis diwujudkan dalam konteks Tiongkok melalui statisme, apakah itu sosialisme-negara atau kapitalisme-negara. Partai Komunis Tiongkok adalah bentuk paling nyata dari kuasa temporal Modernis. Meski demikian baik waktu bergelombang maupun waktu rata menentang rezim temporal bentukan negara, sehingga menciptakan ruang kosong untuk diisi oleh aktor-aktor nonnegara: korporasi di waktu rata, dan para aktivis di waktu bergelombang.

Temporalitas, tentu saja, tak pernah statis, terutama di Tiongkok saat ini yang ditandai oleh sekularisasi, individualisasi, dan mobilitas yang semakin meningkat. Meskipun ada kebaruan tertentu yang dibawa oleh telpon pintar dan kafekafe Internet, dalam kenyataan terdapat lebih banyak kontinuitas historis daripada patahan, bila kita pertimbangkan pengalaman kolektif kelas buruh Tiongkok sejak awal abad ke dua puluh.

Biasanya para buruh harus mengikuti arus waktu apapun yang ditentukan oleh majikan mereka-waktu industrial di pabrik mereka; waktu rata perusahaan yang menjalankan media sosial mereka. Tetapi sesekali, ketika terjadi kecelakaan kerja, ketika kemarahan kolektif bangkit melawan manajemen yang sewenang-wenang, ketika wabah virus corona menghentikan roda ekonomi, bahaya eksistensial yang mengancam para buruh digital Tiongkok membangkitkan makna waktu alternatif di mana tak ada orang lain selain para buruh itu sendiri yang punya kuasa temporal. Pelambatan kerja. Penghentian kerja. Sabotase. Pemogokan liar. Perjuangan kelas di era digital ini berkaitan dengan pembentukan rezim waktu alternatif yang dimiliki buruh sendiri: waktu bergelombang

Munculnya waktu rata merupakan fenomena global. Pabrik-pabrik konten yang digerakkan kecerdasan buatan meng-

hasilkan berita bohong, memasarkan meme nasionalistik secara viral, menghasilkan apa yang oleh Adam Greenfield disebut "keseharian pascamanusia" (posthuman everyday). Waktu rata itu bermakna ganda: bagi konsumen itu semestinya berarti "alami," yang ditetapkan berdasar rumus sains data dan Wall Street. Bagi perusahaan TI, waktu yang sama, begitu tertangkap, dimiliki secara pribadi oleh korporasi, yang memanipulasi dan melakukan monetisasi atas waktu sebagai bahan mentah bagi akumulasi modal.

Tetapi ada yang tidak biasa ketika tren global ini mulai berakar di Tiongkok, yaitu mundurnya peran negara secara tak terduga. Tiongkok termasuk salah satu mesin negara paling kuat di dunia dalam hal melakukan nasionalisasi terhadap waktu, bukan hanya melalui sekolah dan media massa tetapi juga mobilisasi politik rutin selama dan sesudah era Mao. Sejak Deng Xiaoping melakukan reformasi pasar tahun 1992, Partai Komunis Tiongkok tetap memainkan peran sentral dalam tata ruang melalui pembangunan infrastruktur berskala besar yang telah mulai menjangkau seberang Eurasia, Afrika, dan benua Amerika. Meskipun demikian, di bawah Xi Jinping, para pejabat anehnya gagal mengendalikan temporalitas.

Negara partai tersebut sudah mencoba. Akan tetapi meski negara telah berusaha, kuasa tertinggi untuk memanipulasi temporalitas telah bergeser secara pasti dari penguasa publik ke korporasi swasta. Bagi para buruh, tidak ada kampanye yang diprakarsai negara yang dapat menyamai festival belanja "Hari Jomblo." Waktu negara hanya ada dalam status yang hampir residual. Setiap hari di jam tayang utama TV, penayangan ritualistik dari Xi Jinping, sosok laksana dewa itu, kelihatan sepele–satu bidikan kamera ke arah kerumunan orang yang bertepuk tangan untuk Xi bisa berlangsung selama beberapa menit–menandakan bahwa waktu negara Modernis telah terkikis, terserap oleh waktu rata.

Bagi para buruh Tiongkok, 2004 menandai kembalinya waktu revolusioner di era Internet. Tiga perlawanan, di provinsi Shaanxi, Sichuan, dan Guangdong, menerabas pembatasan informasi yang dibuat oleh pemerintah setempat dengan memakai forum daring dan weblog. Sejak itu, telah menjadi lazim bagi para buruh pemberontak yang dibekali media digital untuk mengklaim sukses, untuk sebagian ataupun sepenuhnya, melawan majikan mereka dan sensor yang otoriter, seperti terlihat misalnya dalam pemogokan Honda Locks tahun 2010, pemogokan pabrik sepatu Yue Yuan tahun 2014, dan perlawanan Jasic tahun 2018.

Saya akan menutup dengan merujuk pada konsep Giorgio Agamben, "waktu mesianik" lawan "waktu kronologis," pasangan konsep temporalitas yang sejajar dengan perbandingan antara waktu bergelombang dan waktu rata. Agamben menulis: "waktu mesianik tidak berada di luar waktu kronologis; mudahnya, [waktu mesianistik] itu merupakan satu bagian (una porzione) dari waktu kronologis, satu bagian yang mengalami proses kontraksi yang mentransformasikannya secara total." Bagi para buruh digital Tiongkok, waktu mesianik sudah tiba. Dengan meluasnya penggunaan media digital dan berkuasanya waktu rata, asal muasal waktu revolusioner sering tidak kasat mata. Akan tetapi waktu bergelombang dilipat di dalam waktu rata. Tepat pada saat-saat lengah itulah revolusi terjadi, sewaktu-waktu.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Jack Linchuan Qiu <jacklqiu@gmail.com>

Persaingan AS-Tiongkok? Teknologi Digital dan Industri Budaya

oleh Tanner Mirrlees, Universitas Tech Ontario, Kanada



Apakah dominasi ekonomi dan budaya Amerika Serikat telah berakhir? Sumber: Wikimedia Creative Commons.

ejak berakhirnya Perang Dingin sampai Perang melawan Teror global yang dipimpin AS terhenti karena Resesi Besar, AS adalah imperium terbesar di dunia dan tanpa pesaing. Namun saat ini, Presiden AS Donald Trump, ahli strategi kebijakan luar negeri AS, dan bahkan publik dalam survei oleh Pew Research Center melihat Tiongkok sebagai ancaman terhadap cengkeraman AS pada tatanan dunia. Tajuk utama berita seperti "AS vs Tiongkok: Era Baru Kompetisi Kekuasaan Besar, namun Tanpa Batas" (New York Times) dan "Saat persaingan AS-Tiongkok memanas, harihari tidak berpihak bagi Asia Tenggara akan segera berakhir" (South China Morning Post) membingkai AS dan Tiongkok sebagai "pesaing". Namun benarkah mereka pesaing? Imperium AS telah sejak lama ditopang oleh tiga pilar kekuasaan struktural: kekuatan ekonomi global, supremasi militer, dan popularitas teknologi dan budaya. Sementara ekonomi dan militer Tiongkok tumbuh dengan cepat, dan kampanye "kekuasaan lunak" (soft power) Tiongkok sedang lepas landas, Tiongkok belum menjadi pesaing yang sesungguhnya. Pada tahun 2019, imperium AS bertahan dan mengungguli Tiongkok dalam bidang ekonomi dan militer, terutama dalam kerangka teknologi digital dan industri budaya.

Menurut daftar perusahaan publik dunia terbesar Forbes Global 2000, sebanyak 575 perusahaan bermarkas di AS,

sementara Tiongkok hanya menaungi 309 perusahaan. Dari 20 perusahaan terbesar dunia, sepuluh berasal dari AS dan lima dari Tiongkok. Dolar, dan bukan renminbi, menjadi cadangan dunia dan mata uang yang paling sering dipakai, dan nominal PDB AS berkisar sekitar \$19,39 triliun, yang besarnya jauh lebih signifikan daripada Tiongkok yang berjumlah \$12,24 triliun. Anggaran pertahanan AS sebesar \$684,6 milyar mengungguli Tiongkok yang pengeluarannya \$185 milyar, dan kekayaan dari anggaran perang ini mengalir ke kotak simpanan Boeing, Lockheed Martin, dan General Dynamics, yang merupakan produser dan pengekspor senjata terbesar di dunia. Dari pangkalan udara militer Daegu di Korea Selatan sampai Spangdahlem di Jerman, ratusan pangkalan militer AS malang melintang di berbagai negara; baru-baru ini, AS menjangkau wilayah Indo Pasifik untuk secara fisik mengepung dan membatasi Tiongkok. Sebagai perbandingan, jejak militer global Tiongkok sangat kecil dengan hanya satu pangkalan di Djibouti, yang berjarak sangat jauh dari AS.

Kekuasaan ekonomi dan kekuatan militer global AS diperbesar dengan teknologi digital dan industri budaya, yang ukuran, jangkauan, keuntungan dan kekuatannya jauh lebih besar daripada Tiongkok. Pertimbangkan hal-hal berikut: 65 dari 154 perusahaan teknologi terbesar di dunia adalah perusahaan AS sedangkan perusahaan Tiongkok hanya 20.

Delapan dari sepuluh yang terbesar adalah perusahaan AS (Apple, Microsoft, Alphabet-Google, Intel, IBM, Facebook, Cisco Systems, dan Oracle) dan hanya ada satu perusahaan Tiongkok (Tencent Holdings). Dua perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia berbasis di AS yaitu AT&T dan Verizon. Ketiga terbesar adalah China Mobile. Silicon Valley juga merupakan markas bagi 14 dari 20 laman yang paling sering diakses di dunia termasuk mesin pencari Google yang memonopoli, jejaring sosial yang memiliki kekuatan super seperti Facebook, platform berbagi video seperti YouTube, maupun micro blogging (Twitter), ensiklopedia (Wikipedia), hiburan streaming (Netflix), surel (Outlook dan Yahoo), berbagi foto (Instagram), forum diskusi (Reddit), dan situs pornografi (Pornhub dan Xvideos) digital. Internet Tiongkok sedang tumbuh, namun mereka hanya memiliki dua situs yang paling sering diakses di dunia (Baidu dan qq.com).

"Lima besar" studio Hollywood-Walt Disney Studios dan 20th Century Studios (dimiliki oleh Walt Disney Company), Warner Bros (dimiliki oleh AT&T-Warner Media), Universal Pictures (dimiliki oleh Comcast-NBCUniversal), dan Paramount Pictures (dimiliki oleh Viacom CBS)-bukan studio Tiongkok, merajai "box office" [sukses komersial] secara global. Pada tahun 2019, box office Hollywood mencapai total \$42,5 milyar yang merupakan rekor tertinggi: Box office Amerika Utara meraih keuntungan \$11,4 milyar dan box office internasional menraih \$31,1 milyar. Pemerintah Tiongkok melindungi dan mendorong pertumbuhan industri hiburan nasional yang menguntungkan, dan kebanyakan film dan serial televisi terlaris di Tiongkok adalah buatan dalam negeri atau "buatan Tiongkok" (made in China). Tiongkok bukan korban dari imperialisme budaya AS namun hubungan perdagangan budaya antara Tiongkok dan AS tidak seimbang dan cenderung menguntungkan AS. Film Hollywood tiap tahun meraup keuntungan besar di Tiongkok sementara film Tiongkok jarang ditayangkan di teater AS dan pendapatannya pun tidak dapat dibandingkan. Pada tahun 2019, film terlaris- Avengers: Endgame-menciptakan rekor 30 box office di Tiongkok sementara film terlaris (blockbuster) utama Tiongkok- The Wandering Earth-tidak meraih sukses di AS. Singkatnya, industri hiburan global Tiongkok bukanlah tandingan keuntungan lintas negara dan daya tarik budaya Hollywood.

Tiap tahun, Silicon Valley dan Hollywood menambahkan milyaran pada PDB AS. Selain itu, platform media digital memenuhi kebutuhan kapitalisme untuk menciptakan konsumen dan merayu mereka untuk tetap membeli komoditas. Google adalah penjual iklan digital terbesar di dunia, mencakup 31,1% dari pembelanjaan iklan di seluruh dunia, atau \$103,73 milyar. Facebook ada di urutan berikutnya dengan pendapatan bersih \$67,37 milyar dari pemasukan iklan, diikuti oleh Alibaba yang berbasis di Tiongkok dengan \$29,20 milyar, dan kemudian Amazon, dengan sekitar \$14,1 milyar. Film Hollywood dan acara TV melayani pula kebutuhan kapitalisme akan iklan. Film dan acara TV tersebut, pertama dan terutama, merupakan komoditas pengalaman dan budaya, yang diproduksi oleh studio untuk dijual kepada distributor, dan didistribusikan untuk dijual kepada peserta pameran berbagai bentuk pasar pameran penayangan dan streaming. Antara \$20 juta sampai \$150 juta dihabiskan oleh Hollywood untuk memasarkan tiap produknya. Tetapi pengiklan global juga membayar Hollywood untuk menempatkan merek produknya dalam cerita. Dengan \$288 juta untuk promosi yang terikat dengan cerita, *Spider-Man: Far From Home* memecahkan rekor dalam penempatan merek: Spider Man bertarung melawan Mysterio, dan menikmati Audi, Pepsi, dan United Airlines! Masa tayang ketiga *Stranger Things* memperoleh iklan dari penempatan produk senilai \$15 juta, berkat sinergi antara Coca-Cola, Burger King, dan KFC.

Teknologi digital dan industri budaya AS dijalankan dengan logika kapitalisme, namun operasinya juga terkait dengan ambisi geopolitik AS. Departemen Luar Negeri AS mendorong perdagangan bebas budaya dan digital serta kebijakan kekayaan intelektual ketat untuk mendukung penciptaan keuntungan Silicon Valley dan Hollywood di setiap negara yang mereka sentuh. Badan Keamanan Nasional AS (US National Security Agency/NSA) memanfaatkan model "kapitalisme pengawasan" dari Big Tech [perusahaan teknologi utama] untuk memproduksi dan kemudian memantau populasi global sebagai profil data dan melakukan analisis prediksi tentang ancamannya terhadap Amerika. Untuk mendukung "kekuasaan lunak" AS, Kantor Diplomasi Publik dan Urusan Publik AS melakukan kampanye pro-Amerika di seluruh media, baik media lama maupun media baru. Departemen Pertahanan AS mengoperasikan Internet dan platform media sosial sebagai "senjata" dan "medan pertempuran" untuk "perang dunia maya" (cyberwarfare), dan menjalin kontrak dengan perusahaan seperti Amazon, Google, dan Microsoft untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan militer terhadap Internet of Things dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Semua cabang negara keamanan AS melekat pada industri budaya, dan mereka secara rutin membantu film dan televisi bertema pertahanan yang diproduksi Hollywood. CIA membantu produksi The Americans, drama televisi perang dingin: seorang mantan agen, Joe Weisberg, adalah salah satu penciptanya. Departemen Pertahanan bekerjasama dengan Hollywood dalam banyak "produk hiburan militer" (militainment products) seperti Tom Gun: Maverick, Captain Marvel, dan Transformers.

Pertemuan di abad dua puluh dan dua puluh satu antara logika kapitalis dari industri teknologi dan budaya AS, dan tindakan geopolitik dari negara keamanan AS, dikaji secara lebih rinci dalam buku saya: Hearts and Mines: The US Empire's Culture Industry (2016) dan edisi yang diedit bersama, Media Imperialism: Continuity and Change (2019). Singkatnya, badan-badan negara AS dan teknologi digital serta industri budaya membangun, melindungi dan mendorong suatu sistem global terdiri atas aliansi negara-negara terintegrasi yang ditekan oleh pencarian laba Silicon Valley dan Hollywood, diawasi oleh rezim keamanan militer AS, dan disusupi oleh budaya populer dan platform AS. Tiongkok memang memperluas sumber daya kekuasaan lunak dan persenjataan perang dunia mayanya, serta terlibat dalam kampanye pengaruh budaya. Namun Tiongkok belum menjadi suatu tandingan bagi imperium AS.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Tanner Mirrlees kanner.mirrlees@uoit.ca

) Pasar Bebas

untuk Kebebasan Pers Pasca-Sosialisme?

oleh **Mandy Tröger**, Universitas Ludwig Maximilian Munich, Jerman



Demonstrasi di Berlin, November 1989. Foto oleh Peter Zimmermann/Bundesarchiv.

ajalah serikat pekerja Jerman Barat, Publizistik & Kunst menyebutnya "demam emas," sementara surat kabar Die Tageszeitung menghubungkannya dengan "hari-hari awal kapitalisme." Keduanya merujuk pada perkembangan pasar pers pada musim semi tahun 1990 di bekas Republik Demokratik Jerman (RDJ). Kelompok politik dan ekonomi Jerman Barat waktu itu sedang membangun struktur pasar untuk kepentingan mereka sendiri, yang menghambat reformasi media demokratis secara luas [di bekas Jerman Timur].

Hanya lima bulan sebelumnya, pada November 1989, ratusan ribu orang Jerman Timur telah turun ke jalan-jalan untuk memprotes penindasan negara, menuntut media yang bebas dan demokratis. Protes-protes ini meruntuhkan Tembok Berlin dan memicu gelombang reformasi progresif, termasuk di bidang media. Akhirnya, pada 3 Oktober 1990, RDJ bergabung dengan Republik Federal, mempersatukan Jerman. Meskipun banyak yang telah menulis tentang reunifikasi tersebut, sejarah masa transisi tersebut telah terabaikan. Artikel ini menunjukkan bahwa pasar pers Jerman telah secara efektif terunifikasi pada bulan Mei 1990.

› Reformasi

Tujuan awal reformasi media pada November 1989 adalah untuk memecah monopoli informasi dari Partai Persatuan Sosialis (SED). SED memiliki sekitar 70% dari total produksi surat kabar RDJ. Sudah sejak Desember 1989 Dewan Menteri RDJ meratifikasi suatu resolusi yang mendukung kelompok oposisi dengan menjamin akses setara ke media bagi mereka. Tak lama setelah itu, pada 5 Februari 1990, Undang-Undang tentang Kebebasan Berpendapat, Informasi, dan Media melarang penyensoran dan menyatakan bahwa pers bebas dari monopoli politik dan ekonomi, dan dengan demikian, menjadi platform yang terbuka bagi debat publik. Setiap orang dan badan hukum dalam RDJ memiliki hak untuk menerbitkan, mencetak, dan mendistribusikan media.

Perkembangan ini diikuti oleh ledakan rintisan perusahaan surat kabar: dalam bulan Februari 1990 saja sudah didirikan enam belas surat kabar baru; pada Juli 1990, jumlahnya menjadi sekitar 100. Di sebuah negara dengan hanya tujuh belas juta orang, gelombang rintisan ini menunjukkan perkembangan reformasi struktural dan partisipasi demokratis. Sementara itu, surat kabar mapan mengklaim kemerdekaan politik dan menjalani reformasi internal; debat tentang apa yang membuat pers benar-benar bebas mulai dilakukan di ruang redaksi, surat kabar, dan surat kepada editor.

Pada saat yang sama, beberapa lembaga didirikan khusus untuk mereformasi media RDJ. Dewan Kontrol Media (MKR) dari akar rumput yang non-partisan dan Kementerian untuk Kebijakan Media (MfM), misalnya, sudah didirikan pada April 1990. Tujuan mereka, menurut Menteri Media Gottfried Müller pada Mei 1990, adalah untuk memastikan "transisi yang dikembangkan untuk kebebasan media", untuk "tidak hanya mengadopsi atau meniru model dan konsep Barat". Tujuannya adalah untuk menemukan model baru untuk pers yang bebas.

› Pengambilalihan pasar

Bersamaan dengan inisiatif reformasi politik ini, perusahaan media Jerman Barat telah mulai mengeksplorasi pasar Jerman Timur. Sudah sejak Desember 1989 para penerbit mendistribusikan publikasi mereka di RDJ. Ekspor sporadis segera berubah menjadi sistematis. Pada pertengahan Februari, Kementerian Dalam Negeri Jerman Barat (BMI) mengakui sudah adanya kebutuhan untuk regulasi: pajak tidak dibayarkan, harga tidak ditetapkan. Namun BMI "secara eksplisit mendukung" terhadap "kegiatan penerbit di bidang abu-abu hukum." Dengan cara ini, BMI bertujuan mengamankan aliran informasi untuk mempengaruhi pemilihan umum bebas pertama di RDJ pada bulan Maret 1990, yang didukung pembiayaan besar dari kepentingan pihak partisan di Jerman Barat. Hal ini meletakkan landasan politik bagi transisi pers yang dibentuk oleh kepentingan pasar Jerman Barat.

Pada tanggal 5 Maret 1990, penerbit utama Springer, Burda, Bauer dan Gruner + Jahr (G + J) mulai mengimpor secara sistematis produk-produk mereka ke RDJ. Mereka memasang sendiri sistem produksi milik mereka sendiri. Dengan membagi RDJ menjadi empat zona distribusi, mereka bersama-sama mendistribusikan publikasi terutama publikasi mereka sendiri, yang membanjiri pasar Jerman Timur. Secara hukum federal hal tersebut adalah ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran di antara semua badan politik dan pihak sipil RDJ. Namun, karena skema ini dimulai hanya dua minggu sebelum pemilihan umum, pemerintah RDJ tidak dapat bertindak. Upaya regulasi ditolak atau diabaikan.

Tak lama setelah pemilihan umum, penerbit-penerbit bertujuan mendapatkan keunggulan kompetitif satu sama lain dengan cara membanting harga. Tujuan bisnis yang siap merugi ini adalah untuk menarik pembaca di masa depan. Hal ini mengucilkan penerbit kecil Jerman Barat yang tidak mampu menjual dengan harga-harga seper-

ti itu, dan memberi tekanan tambahan pada surat kabar Jerman Timur: fasilitas percetakan yang sudah ketinggalan zaman, kelangkaan kertas, dan infrastruktur distribusi yang tidak dapat diandalkan membuat mereka sulit bersaing. Terlebih lagi, pada 1 April 1990, RDJ mengakhiri subsidi pers. Sebagian besar surat kabar menggandakan atau melipattigakan harga mereka dan dengan cepat beralih ke iklan, yang memerlukan keahlian pekerja Jerman Barat. Hal tersebut-di samping investasi modal-menciptakan awal ketergantungan bagi surat kabar Jerman Timur.

Dua negara, satu pasar

Pada April 1990, semua surat kabar Jerman Timur melakukan negosiasi usaha patungan dengan penerbit Jerman Barat yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di Timur. Sasaran utama dari usaha tersebut adalah empat belas bekas surat kabar wilayah SED, yang memiliki semi-monopoli di wilayah masing-masing. Secara resmi, surat-surat kabar tersebut menandatangani perjanjian niat kerjasama. Namun pada kenyataannya, penerbit Jerman Barat menerapkan hubungan bisnis yang mencakup akuisisi pengiklan, pencetakan surat kabar, dan termasuk investasi ekuitas. Namun baru pada bulan April 1991 usaha patungan ini diubah menjadi kontrak hukum oleh badan perwalian (Treuhandanstalt, THA) dari pemerintah Jerman. THA menyerahkan monopoli pers negara yang tidak diubah kepada penerbit-penerbit besar Jerman Barat yang segera makin mengkonsolidasikan pasar.

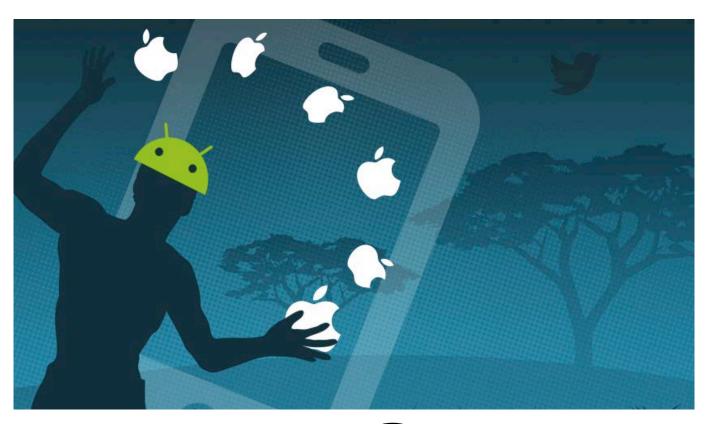
› Kematian sebuah mimpi

Hasilnya adalah sebuah konsentrasi pers: dari 120 surat kabar yang didirikan pada tahun 1990, dua tahun kemudian, hanya tersisa sekitar 65 surat kabar dari sekitar 50 penerbit. Pada November 1992, angka tersebut telah menurun lagi menjadi 50 surat kabar dari 35 penerbit. Bagi sejarawan Konrad Dussel, peristiwa tersebut adalah konsekuensi dari keputusan pemerintah federal yang "menentang eksperimen apapun." Hal ini berarti kematian impian demokrasi tahun 1989. Pengalaman, ide, dan inisiatif tentang bagaimana caranya memikirkan kembali pers yang bebas berdasarkan pengalaman GDR telah dilibas. Hal ini menjadikan masa transisi sebuah peluang yang terlewatkan, dan reunifikasi Jerman sebatas perluasan saja dari tatanan ekonomi-politik Barat. Suatu pers Jerman Timur yang berdaulat tidak pernah berkembang.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Mandy Tröger </br><Mandy.Troeger@ifkw.Imu.de>

TIK sebagai Juju: Inspirasi Afrika

oleh **Francis Nyamnjoh**, Universitas Cape Town, Afrika Selatan



Ilustrasi oleh Arbu.

aya dibesarkan di Afrika Barat dan Tengah di mana kami percaya, mengatur, dan menjalankan hidup di sekitar gagasan bahwa segala sesuatu di dunia dan dalam kehidupan tidaklah lengkap: alam tidak lengkap, kekuasaan supranatural tidak lengkap, manusia tidak lengkap, dan demikian pula tindakan serta capaian manusia. Kami percaya bahwa semakin cepat seseorang mengenali dan menghayati ketidaklengkapan (*incompleteness*) sebagai cara hidup yang normal, semakin baik bagi kami. Kami juga percaya bahwa karena ketidaklengkapan mereka, bentuk dan isi orang tidak menyatu, walaupun penampil-

an mereka mungkin memberi kesan demikian. Entitas yang ada pun tidak demikian. Kelenturan, perpaduan keberadaan (compositeness of being), dan kapasitas untuk hadir secara simultan dalam keberagaman yang menyeluruh ataupun terfragmentasi merupakan realitas dan ontologi dari ketidaklengkapan. Selain itu, Afrika Barat dan Tengah adalah wilayah di mana kesalingterhubungan dan kesalingtergantungan diakui dan dirayakan, dan digunakan sebagai ruang dominan dan yang diinginkan untuk mengatur hubungan antarmanusia, serta antara manusia dengan dunia alam dan supranatural.

> Tentang Ketidaklengkapan

Karena pengakuan mengenai adanya ketidaklengkapan inilah orang-orang di Afrika Barat dan Tengah berhasrat mencari jalan untuk meningkatkan diri mereka melalui hubungan dengan manusia lain, dan menggunakan kreativitas dan imajinasi mereka untuk memperoleh benda-benda gaib yang dapat memperluas hubungan tersebut, maupun dalam interaksi, bersama berbagai keunikan dan keeksentrikan kekuatan atau agen alam dan supranatural. Objek magis semacam itu, yang dalam istilah modern disebut sebagai teknologi, lebih dikenal di Afrika Barat dan Tengah dengan nama lokal yang telah saya terjemahkan sebagai juju. Kosmologi dan ontologi yang memungkinkan kepercayaan dan praktik tersebut di masa lalu-dan untuk sebagian besar masih berlanjut kini-disalahartikan dan diremehkan oleh para cendekiawan dan pengamat modern Afrika; dianggap sebagai sihir, klenik, penyembahan berhala, takhayul, dan primitivisme. Secara paradoks, bahkan penerimaan kebaruan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diprakarsai oleh revolusi digital tidak dipandang sebagai faktor pemulihan bagi kosmologi dan ontologi, kepercayaan dan logika praktik oleh mereka yang bersikukuh untuk memandang modernisasi dan pembangunan sebagai suatu upaya zero-sum [upaya dalam mana keuntungan satu pihak merugikan pihak lain].

Namun, terlepas dari ambisi dominasi dan superioritas melalui penaklukan dan penolakan untuk mengakui utang dan piutang, terbukti bahwa masa depan terpaut dengan kepercayaan dan praktik populer yang telah diabaikan, yang mengandung realitas mengenai ketidaklengkapan. Jika manusia biasa dalam keadaan alamiah bersifat tidak lengkap, maka semua upaya untuk meningkatkan diri melalui hubungan antara sesama manusia dan melalui peminjaman dan teknologi, alih-alih menjadikan mereka lengkap, mengarahkan mereka pada kerendahan hati atas keberadaan mereka sebagai hasil perpaduan (being composite) serta pada pengakuan utang budi mereka pada pihak-pihak lain - manusia, alam, dan kekuatan supranatural. Ketidaklengkapan adalah kondisi yang kekal, dalam artian bahwa pencarian perluasan (extension) untuk memperbaiki keadaan ketidaklengkapan seseorang hanya akan semakin menyadarkannya mengenai ketidaklengkapannya, bila dihadapkan dengan semua bentuk perluasan yang belum dikuasainya. Lagi pula, perluasan-perluasan cenderung hanya berlaku untuk sebagian dan hanya untuk waktu tertentu, dan beberapa di antaranya bahkan merongrong tingkat kelengkapan yang semula diduga telah tercapai. Fakta bahwa keadaan lengkap (completeness) adalah suatu ilusi yang hanya dapat memicu ambisi steril mengenai penaklukan dan permainan zero-sum mengenai superioritas, merupakan suatu ajakan untuk menjajaki, merenungkan, dan menyediakan sebuah dunia yang ditandai oleh ketiadaan batas, kesalingterhubungan, kecairan, dan keriangan; sebuah dunia dalam mana tidak seorangpun memiliki monopoli atas kekuasaan atau ketidakberdayaan, sebuah dunia di mana manusia dan wujud lain saling melengkapi.

Suatu penekanan pada kesalingterhubungan dan kesalingtergantungan mengundang kita untuk merangkul ketidaklengkapan sebagai suatu keadaan dan keberadaan yang normal, dengan jalan secara sistematis melucuti diri kita dari aspirasi zero-sum ke arah superioritas.

) Teknologi digital sebagai juju

Sebagaimana bunyi salah satu peribahasa dalam buku Chinua Achebe mengenai kekuasaan tak kasat mata berjudul Arrow of God (Panah Tuhan), "ketika kita melihat seekor burung kecil menari di tengah jalan, kita harus tahu bahwa penabuh genderangnya berada di balik semak-semak di dekatnya." Untuk dapat mengklaim atribut ilahiah berupa kemahatahuan, kemahakuasaan, dan kemahahadiran, manusia harus berusaha meningkatkan kapasitas diri mereka yang awam dengan aktivator luar biasa-juju. Oleh sebab itu, kepercayaan luas di Afrika Barat dan Tengah bahwa, meskipun kita manusia biasa, kemampuan kita untuk menjadi mahatahu, mahahadir dan mahakuasa dapat secara signifikan ditingkatkan oleh juju (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada jimat, sihir, racikan berkhodam, ramuan obat, dll). Juju semacam itu umumnya dipersiapkan secara khusus oleh dukun atau cenayang yang memiliki sebutan berbeda-beda tergantung pada konteksnya.

Dengan demikian, saya menyamakan TIK atau teknologi digital dengan apa yang oleh kami di Afrika Barat dan Tengah biasanya dirujuk sebagai juju. Saya mengundang Anda sebagai cendekiawan humaniora digital untuk melihat dalam kepercayaan di wilayah ini pada ketidaklengkapan dan kejamakan hakikat eksistensi insani, maupun dalam kapasitas untuk hadir di mana-mana pada saat yang bersamaan, sebuah indikasi bahwa kita harus banyak belajar dari masa lalu tentang cara terbaik untuk memahami dan memanfaatkan kemajuan TIK yang saat ini dianggap inovatif. Gagasan mengenai teknologi digital yang memungkinkan manusia dan benda-benda untuk hadir dalam ketidakhadiran dan tidak hadir di saat mereka hadir ini tidak sedemikian berbeda dengan keyakinan pada apa yang sering dicap dan ditolak sebagai klenik dan sihir. Keyakinan ini cocok untuk sebuah dunia dengan kemungkinan nirbatas-suatu dunia dengan kehadiran dalam multiplisitas simultan dan kekuasaan abadi untuk mendefinisikan kembali realitas. Dunia rakyat Afrika Barat dan Tengah-sebuah dunia dengan fleksibilitas, kecairan, dan ketidaklengkapan yang ditolak oleh kekuasaan kolonial dan terus diremehkan oleh para pelaku modernisasi-adalah sebuah dunia di mana waktu dan ruang tidak diperbolehkan menghalangi kebenaran serta kompleksitasnya yang bernuansa. Ini adalah sebuah dunia yang baru akhir-akhir ini saja dapat kita pahami secara jauh lebih baik dengan munculnya TIK baru seperti internet, telepon seluler, dan gawai, bersama dengan "kegaiban" dan "sihir" berupa ketersediaan dan keterjangkauannya secara instan, maupun kecenderungannya untuk memfasilitasi narsisme, kesenangan diri sendiri, dan pengutamaan penampilan. Alih-alih berpikir dalam dikotomi, tradisi perluasan diri Afrika Barat dan Tengah melalui imajinasi kreatif menganut sebuah ontologi kesalingterhubungan yang dapat menjadi pendekatan yang bermanfaat untuk mengembangkan teori tentang interseksi antara manusia dan TIK.

Saya memandang juju sebagai teknologi aktivasi diri dan eksplorasi diri-sesuatu yang memungkinkan kita untuk bangkit melampaui keseharian (ordinariness) diri kita, dengan memberikan kepada kita potensi untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat kita capai dengan hanya mengandalkan kapasitas atau kekuatan alami saja. Memang benar bahwa tubuh kita, jika diolah dengan baik, dapat menjadi juju yang fenomenal, yang memungkinkan kita untuk mencapai prestasi luar biasa. Namun bahkan raga yang terlatih secara teknis, terprogram, atau berdisiplin seperti itu mungkin akan menghadapi tantangan yang membutuhkan potensi tambahan. Dengan kata lain, meskipun tubuh kita memiliki potensi untuk menjadi juju pertama kita, pada akhirnya juju tambahan tetap kita butuhkan agar tindakan kita mencapai sasaran.

Fakta bahwa *juju* sering bergantung pada jaringan antarhubungan yang rumit agar dapat berfungsi dengan tepat adalah suatu komplikasi tambahan dan merendahkan hati serta penangkal terhadap tiap kecenderungan untuk angkuh. Melengkapi atau memperluas diri sendiri dengan *juju* yang konon lebih ilmiah dan teknis seperti komputer (meja atau jinjing), telepon seluler (dasar atau pintar), dan gawai lainnya (tablet, iPad) tetap bukan jaminan bahwa perangkat tersebut tidak akan gagal justru pada saat seseorang sangat membutuhkannya.

Mungkin karena alasan inilah juju pria dan wanita di Afrika Barat dan Tengah tidak menghindari penggunaan teknologi modern/ilmiah (ponsel pintar, tablet, iPad, dll.) bersama dengan apa yang oleh sebagian orang dijuluki sebagai "perangkat elektronik Afrika" mereka. Mereka menggunakan perpaduan juju tradisional dan modern untuk aktivasi dan perluasan diri, dan untuk memungkinkan mereka berjumpa dan melayani klien di berbagai lokasi di luar desa mereka, di kota-kota, dan bahkan di benua lain.

Ketergantungan pada juju, jimat, mantra, dan cenayang mungkin tampak primitif dan tidak rasional, tetapi ini merupakan bagian dari repertoar potensi dari mana kami memperoleh agensi mengingat fakta mengenai ketidaklengkapan kita. Dalam hubungan ini, sebagaimana dijelaskan di atas, juju tidak jauh berbeda dengan teknologi untuk memperluas diri yang kita kenal yang dianggap lebih ilmiah, rasional, dan modern (foto, komputer, internet, telepon seluler, gawai pintar, media massa, media sosial, buku, listrik, mesin cuci, kecerdasan artifisial, senjata nuklir, dll.). Pencarian Google sederhana untuk kata-kata seperti "marabout" di Prancis, Kanada, atau Belgia, misalnya, akan membawa Anda tidak hanya ke laman daring dan rincian kontak marabout di Senegal, Mali, atau Nigeria, tetapi juga ke kantor, agen, nomor telepon, dan jadwal mereka di seluruh dunia. Di Kamerun, misalnya, tidak jarang kita menemukan para cenayang memanggil orang-orang diaspora Kamerun di seluruh dunia melalui komputer, gawai pintar, dan tablet untuk hadir dan mempertanggungjawabkan penderitaan dan kesulitan dari kerabat prihatin yang ditinggalkan.

) Juju: Suatu aib yang diperlukan?

Kita sedang menyaksikan kekuasaan yang fenomenal, tumbuh, dan mengganggu dari para perancang perangkat lunak di era teknologi digital dan meningkatnya potensi algoritma. Tidaklah mustahil lagi bagi para peretas untuk memasang *spyware* dari jarak jauh di telepon seluler pintar kita, yang memungkinkan mereka untuk mengakses semua konten kita, termasuk data terenkripsi, serta mengontrol mikrofon dan kamera dari jarak jauh tanpa sepengetahuan kita. Perancang *spyware* semacam itu tidak berbeda dengan perantara roh di semak-semak Afrika Barat dan Tengah yang menggerakkan para langganan dan pengikutnya ke dalam hiruk-pikuk yang memabukkan saat secara berani melakukan kegiatan sukacita berlebihan di hadapan orang lain.

Seperti halnya kehidupan yang sarat dengan hirarki yang dibentuk dan ditopang oleh ketidaksetaraan, demikian pula ketidaksetaraan dan hirarki pada juju. Semakin kuat juju seseorang, semakin baik peluang untuk mengejawantah, melihat, melakukan, merasakan, dan mencium sesuatu, baik berwujud maupun nirwujud, serta memengaruhi dan mengendalikan orang lain, benda, peristiwa, dan fenomena. Sebuah juju dapat digunakan secara tunggal maupun dalam kombinasi dengan juju lain untuk memaksimalkan potensi mereka. Dengan sebuah juju yang baik (misalnya drone), seseorang tidak perlu hadir secara fisik untuk membuktikan kemampuan keberhasilannya pada pihak-pihak yang ia ingin pengaruhi secara baik atau buruk, karena cinta atau benci. Tidak ada yang dapat menjelaskan hal ini secara lebih baik daripada kemampuan sebuah gawai pintar bersumber lengkap (dengan aplikasi dan kontak) – salah satu juju paling sensasional yang kini menjadi mode – dengan akses pada Wi-Fi, hotspot, atau Bluetooth, di era media sosial, konektivitas supercepat, dan meningkatnya tuntutan akan keramahtamahan.

Namun, terlepas dari kontradiksi dan daya manipulatifnya, kehidupan akan bersifat sangat sehari-hari, diprediksikan terstandar, rutin tanpa adanya rasa petualangan dan ambisi yang dibawa oleh mekarnya keriangan kreatif dalam juju (teknis dan teknologi). Gagasan mengenai inovasi kreatif akan mati, manakala individu dan masyarakat akan kehilangan kemampuan untuk berimprovisasi dan menemukan ulang diri mereka sendiri. Hal ini menyorot peran krusial juju dalam masyarakat dan hubungan sosial. Individu dan kolektivitas menggunakan juju untuk memengaruhi, membujuk, dan mengendalikan situasi dan orang lain, dan untuk mengatasi dan mempersulit berbagai tantangan tersebut dengan cara-cara yang tidak akan dimungkinkan tanpa repertoar mereka tentang juju.

Kehadiran *juju* di mana-mana harus dikaitkan dengan ide bahwa kekuasaan-alih-alih terkonsentrasi di tangan segelintir orang-sebenarnya merupakan sesuatu yang datang dan pergi, seringkali tanpa peringatan. Betapapun saktinya seseorang, ia selalu berusaha meningkatkan dirinya dengan perpanjangan bagian tubuh dan indera tambahan di satu sisi, dan *juju* (teknik dan teknologi) di sisi lain. Hal ini seharusnya membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan untuk menumbuhkan dan memperjuangkan sebuah disposisi untuk memasukkan yang di luar dan mengeluarkan yang di dalam.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Francis Nyamnjoh <francis.nyamnjoh@uct.ac.za>

Mempraktikkan Sosiologi di Filipina

oleh **Filomin C. Gutierrez**, University of the Philippines, Filipina dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sosiologi Penyimpangan (RC29), dan Perempuan, Gender dan Masyarakat (RC32)



disi *Dialog Global* kali ini menghadirkan refleksi berbagai anggota Masyarakat Sosiologi Filipina (*Philippine Sociological Society*, PSS), menyorot berbagai isu seperti urbanisasi dan tata kelola, gerakan LGBT, kekerasan dalam perang melawan narkoba, mempraktikkan sosiologi publik di antara kaum miskin, dan marginalisasi wilayah Mindanao. Berlatar belakang tiga wilayah atau kelompok pulau yang berbeda, Luzon, Visayas, dan Mindanao, mereka mendiskusikan minat penelitiannya masing-masing dan merenungkan tantangan yang dihadapi para sosiolog Filipina saat ini.

Louie Benedict Ignacio mengangkat masalah urbanisasi di Filipina dengan merujuk pada dinamika metropolitanisasi Metro Manila, berupa jejaring urban dari beberapa kota yang membentuk Kawasan Ibu Kota Nasional. Pertumbuhan komunitas berpagar (gated communities) berkembang dari penyediaan keamanan ekonomi untuk penjaminan keamanan fisik bagi para penghuni yang berkecukupan, di saat kemiskinan perkotaan meningkat dan permukiman kumuh berkembang biak. Ignacio menyajikan krisis urbanisasi yang dibentuk tidak hanya oleh masalah-masalah bersama dalam pengelolaan sumber daya dan transportasi, tetapi juga oleh segmentasi sosial dan isu-isu tata kelola.

John Andrew Evangelista membahas bagaimana perspektif *queer* memandang perbedaan ideologis di balik kelompok-kelompok dalam gerakan LGBTQ di Filipina. Logika ideologis yang beraneka ragam menyajikan berbagai klaim, mulai dari klaim mereka yang mengadvokasi undang-undang anti-diskriminasi dan menyerukan transformasi sistem ekonomi yang berlaku, hingga ke klaim mereka yang menitikberatkan pada aspek pesta dari *Pride Parade* [pawai kebanggaan kaum LGBTQ]. Ia berpendapat bahwa ruang kontradiksi dan konflik dalam membangun sejarah gerakan LGBTQ menunjukkan bahwa perbedaan antara bagian-bagian gerakan tersebut lebih merupakan produk historis daripada perbenturan kepentingan.

Gutierrez menyajikan kekerasan dalam perang melawan narkoba yang menewaskan ribuan "orang narkoba" di Filipina, yang menampilkan disonansi antara berbagai narasi. Dukungan publik Filipina terhadap kampanye anti-narkoba bertentangan dengan keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan narasi para tahanan narkoba mengenai kekerasan polisi, namun mengkonfirmasi pandangan polisi tentang kampanye tersebut sebagai solusi untuk masalah narkoba. Saat topik ini terbuka untuk narasi berbeda tergantung pada fokus seseorang, para peneliti sosial dituntut untuk melihatnya dari sudut pandang yang melampaui batasan perdebatan antara populisme hukuman—sebuah pendekatan yang mengadvokasikan tindakan hukuman terhadap kejahatan berdasarkan pada sentimen publik—dan elitisme hukuman—pandangan yang mengistimewakan pendapat ilmiah atau ahli tentang kejahatan dan memandang sentimen publik sebagai hal yang simplistik.

Tulisan Phoebe Zoe Maria Sanchez mengkritik rezim populis otoriter Presiden Rodrigo Duterte sebagai suatu perpanjangan dari kegagalan revolusi *People Power* pada tahun 1986 untuk mencapai transisi demokrasi, dan merupakan kegagalan yang hanya memperbaharui, kalau tidak memperburuk, ciri-ciri fasisme negara yang ditampilkan selama kediktatoran Marcos. Sanchez berpendapat bahwa sosiologi publik dapat memperoleh manfaat dari dukungan terhadap organisasi kaum miskin dan menyingkap budaya diam mereka untuk memperkuat partisipasi mereka dalam masyarakat sipil dan berdampak pada kebijakan negara.

Terakhir, Mario Aguja menulis tentang marginalisasi Mindanao di Filipina Selatan terhadap hegemoni Metro Manila di Utara sebagai pusat *de facto* kekuasaan ekonomi, politik, militer, dan budaya. Ia mengangkat isu hubungan pusat-periferi tersebut untuk merangkum praktik sosiologi itu sendiri. Sementara isu-isu dari Mindanao, seperti konflik Muslim-Kristen, tingkat kemiskinan ekstrem, dan ekstremisme kekerasan merupakan topik yang menarik untuk analisis sosiologis, wacana sosiologi Filipina terbatas pada topik-topik yang menarik bagi Pusat. Untuk membalikkan bias ini, PSS baru-baru ini secara menentukan berputar arah ke Mindanao dengan menggelar konperensi-konperensi tahunannya ke wilayah tersebut dan menempatkan para sosiolog Mindanao di garis depan wacana nasional.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Filomin C. Gutierrez < fcgutierrez@up.edu.ph>

Studi Perkotaan di Filipina:

Sosiologi sebagai Jangkar

oleh **Louie Benedict R. Ignacio**, Universitas Santo Tomas, Filipina dan anggota dari Komite Penelitian ISA mengenai Sosiologi Pendidikan (RC04) dan Pengembangan Regional dan Perkotaan (RC21)



Metro Manila, di mana adanya warga hunian liar merupakan pemandangan biasa, merupakan salah satu kawasan metropolitan terpadat di dunia. Foto oleh Rhon Paolo C. Velarde.

tudi perkotaan di Filipina, dan secara khusus sosiologi perkotaan, melihat pertumbuhan yang cepat mulai tahun 1980-an dan seterusnya ketika ibu kota negara, Manila, dan kota-kota di sekitarnya mulai berkembang secara ekonomi dan politik. Sebelum adanya penataan komunitas dan kemajuan teknologi, daerah-daerah yang sekarang penuh dengan gedung-gedung tinggi, komunitas berpagar (gated communities), dan jalan-jalan yang sibuk dahulu tertutup oleh sawah-sawah hijau dan sistem pengairan dan sungai yang terhubung. Namun ketika penduduk di daerah-daerah ini bertambah, kebutuhan komunitas juga mengalami evolusi, sehingga perkembangan mereka tidak lagi dapat didukung dengan sumber daya mereka sendiri. Perubahan-perubahan ini memperlihatkan perlunya sebuah tata kelola kehidupan ekonomi, politik, dan sosial penduduk yang lebih

kompleks. Hal ini juga melahirkan berbagai diskusi mengenai kehidupan kota. Berbagai aspek kehidupan kota, termasuk perumahan dan lingkungan terbangun, segmentasi penduduk berdasarkan status ekonomi, kriminalitas, dan tata kelola semuanya membutuhkan lensa khusus dalam memahami kota.

Secara politis, untuk mengatasi masalah ini, negara menyerahkan sebagian fungsinya ke berbagai unit pemerintah lokal seperti administrasi urusan lokal. Di Filipina, proses desentralisasi diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Daerah tahun 1991. Menurut Pasal 24 Peraturan ini, negara mendelegasikan fungsinya kepada unit-unit pemerintah lokal sehingga setiap unit bertanggung jawab atas serangkaian layanan dan fasilitas minimum yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan,



Sungan Pasig mengalir di Metro Manila. Kualitas airnya dianggap tidak memenuhi standar lingkungan permukiman. Foto oleh Rhon Paolo C. Velarde.

pedoman, dan standar nasional yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 25 Peraturan ini, unit-unit pemerintah daerah sebaiknya menyediakan layanan dasar seperti fasilitas komunikasi dan transportasi yang memadai, layanan dan fasilitas pendukung untuk pendidikan, polisi dan perlindungan kebakaran, serta pengembangan masyarakat.

Di Filipina, konsep metropolitanisasi - wilayah dan tata kelola metropolitan -pertama kali disusun pada awal 1970an untuk mengkoordinasikan layanan kawasan metro ke tiga kota baru dan tiga belas kotamadya di sekitar Metro Manila yang terintegrasi. Badan pengelola metropolitan pertama di Filipina didirikan pada tahun 1975 berdasarkan Keputusan Presiden No. 824: Komisi Metro Manila, yang bertugas dari tahun 1975 hingga 1986. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan layanan seperti manajemen lalu lintas dan transportasi, kontrol penghuni liar, dan pelestarian lingkungan yang bersih dan hijau. Pada tahun 1995, berdasarkan Undang-Undang Republik No. 7924, Otoritas Pembangunan Metro Manila (MMDA) dibentuk, yang mencakup fungsi perencanaan, pengawasan, koordinasi, regulasi, dan integrasi tujuh belas kota dan kotamadya dalam hal menyediakan layanan dasar. Layanan dasar yang disediakan MMDA meliputi: kemacetan lalu lintas dan efisiensi transportasi; manajemen kerja; pemantauan polusi; pengelolaan banjir dan air limbah; pembaharuan perkotaan, zonasi dan perencanaan penggunaan lahan, kesehatan dan sanitasi; dan keselamatan publik, yang mencakup operasi penyelamatan

Jika abad dua puluh ditandai dengan dominasi urbanisasi, pada abad kedua puluh satu hal ini telah bergeser ke metropolitanisasi sebagai pendekatan komprehensif terbaru untuk tata kelola dan manajemen perkotaan. Urbanisasi lahir beriringan dengan meningkatnya kemiskinan perkotaan karena terbatasnya pendapatan dan kesempatan kerja di kota-kota, karena penduduk perkotaan terus tumbuh secara alami dan melalui migrasi dari pedesaan. Hal ini juga memunculkan penyebaran daerah kumuh di perkotaan. Kurangnya pasokan air minum dan sanitasi

serta pembuangan limbah juga merupakan masalah yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang cepat, yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Infrastruktur dan fasilitas transportasi yang tidak memadai di kota-kota menyebabkan kemacetan yang membatasi pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, semua masalah perkotaan ini menyebabkan keruntuhan tatanan sosial kota-kota sejak akhir 1970-an, yang mencapai puncaknya pada awal 1990-an sejak pemulihan demokrasi di Filipina, dan membawa konsekuensi hingga saat ini.

Penelitian saya telah mencoba melihat bidang studi perkotaan yang luas ini, khususnya di Metro Manila. Saya pertama-tama memusatkan perhatian pada bagaimana sebuah badan nasional, antarkota, seperti Metropolitan Manila Development Authority mengatasi masalah perkotaan berupa manajemen lalu lintas, dengan alasan bahwa dinamika politik antara pejabat unit pemerintah daerah dan pejabat lembaga nasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang sedemikian kompleks. Saya melanjutkan dengan memusatkan perhatian pada bagaimana komunitas berpagar di daerah perkotaan Metro Manila muncul, khususnya melihat bagaimana fungsi komunitas berpagar berubah dari bentuk keamanan ekonomi, menjadi bentuk keamanan fisik, dan lebih jauh menjadi keduanya. Baru-baru ini, saya mempelajari dinamika layanan keamanan di lingkungan perkotaan, mengingat bahwa komunitas berpagar, yang merupakan entitas milik pribadi yang dikelola oleh asosiasi pemilik rumah pribadi swasta, memberikan kepada penghuni rumah tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada yang diberikan oleh pemerintah lokal kepada masyarakat umum. Fenomena ini, dilihat melalui pendekatan neoliberalisme dan Manajemen Publik Baru, berakibat pada melemahnya legitimasi unit-unit pemerintah lokal dengan memonopoli sumber layanan sambil menarik lebih banyak penghuni kota dari kelas yang lebih tinggi untuk menggunakan pengaturan hunian seperti ini.

Mengingat pertumbuhan penduduk Metro Manila yang berlangsung terus-dengan peningkatan yang stabil sebesar 1,7% per tahun, sama dengan megalopolis lain di seluruh dunia-menjadi lebih penting bahwa perspektif yang digunakan dalam memahami daerah perkotaan perlu lebih beragam. Studi perkotaan di Filipina telah dikotak-kotakkan ke dalam berbagai bidang seperti kesehatan, perencanaan dan desain perkotaan, politik dan pemerintahan, kesenjangan antara kelompok sosial-ekonomi, dan bahkan risiko dan bencana. Untuk Metro Manila, dengan jumlah penduduk 12,8 juta jiwa dan salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, sosiologi dapat memberikan kerangka kerja menyeluruh untuk memahami hubungan antara individu dan lingkungan mereka. Sosiologi dapat menyediakan jangkar untuk menghubungkan masalah dan kemungkinan solusi yang disediakan oleh penelitian berbasis bukti dan keterlibatan di dalam kota.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Louie Benedict R. Ignacio < | rignacio@ust.edu.ph >

Navigasi Konflik

melalui Lensa Queer

oleh **John Andrew G. Evangelista**, University of the Philippines Diliman, Filipina, dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Perempuan, Gender dan Masyarakat (RC32)



etika pertama kali muncul sebagai kerangka melalui mana masyarakat dapat dianalisis, teori queer [mereka yg menolak identitas gender dan seksualnya didefinisikan dalam kerangka heteronormativitas] mengarahkan visi kita ke arah pemahaman, jika bukan pemujaan, terhadap hal-hal yang mengandung oposisi. Untuk melawan ortodoksi patriarki dan heteronormativitas, teori ini menggali peristiwa, momen, identitas, dan budaya yang menentang biner gender dan seksualitas yang kaku. Teori ini mencari logika yang menumbangkan hierarki yang ada. Dalam bingkai ini, menjadi queer berarti menjadi curiga terhadap apapun yang menyerupai normalitas.

Antropolog Martin Manalansan menggunakan konsepsi queerness (keadaan queer) ini dengan membumikannya dalam kekacau-balauan. Tugasnya bukan hanya merayakan tindakan dan pikiran subversif. Sebaliknya, misinya adalah untuk menggambarkan berbagai cara melalui mana penyimpangan bersilangan dan bertabrakan dengan yang normal. Keadaan queer, dengan demikian, dapat

Bagaimana Filipina nampak dari sudut pandang queer? Sumber: Wikimedia Creative Commons.

dipahami sebagai ruang-ruang kacau-balau di mana logika yang saling bertentangan bertemu satu sama lain. Ini memberikan kerangka yang layak untuk memahami kondisi sosial dan historis di mana para aktor menghadapi dan menegosiasikan makna, interpretasi, dan bahkan ideologi yang tampaknya saling bertentangan.

Dalam bukunya *Global Divas* (2003), Manalansan menceritakan sebuah kisah menarik tentang seorang lelaki *gay* Filipina yang tinggal di New York yang tampaknya telah menciptakan pembagian spasial di dalam apartemennya. Di satu sisi, terdapat altar dengan simbol-simbol agama Katolik sementara di sisi lain, terdapat foto-foto pria telanjang. Warisan agama kolonialisme Spanyol di Filipina melancong ke kota yang memberikan kebebasan relatif bagi orang-orang LGBTQ. Kasus ini menunjukkan keadaan *queer* tidak hanya dengan memetakan perjumpaan kacau-balau antara keadaan *gay* dan agama. Kasus ini juga menyoroti bagaimana kondisi sosial dan historis berkontribusi dalam membangun kekacauan semacam itu.

) Terjebak di tengah-tengah

Seperti apartemen kacau-balau yang disebutkan di atas, para peneliti keadaan *queer* sering menemukan diri mereka dalam ruang-ruang kontradiksi dan konflik. Seringkali, mereka merasa seperti terjebak di tengah-tengah interpretasi yang berlawanan. Dalam karya saya sendiri tentang sejarah gerakan LGBTQ di Filipina, saya mendapati diri saya berdiri di tengah-tengah ketegangan ideologis yang berbeda di antara para aktivis. Bukan rahasia lagi bahwa gerakan sosial tidak pernah monokromatik. Mengusung berbagai ideologi, para aktivis sering membaca dan menyusun klaim dengan beragam cara. Ketegangan seperti inilah yang dihadapi oleh para peneliti keadaan *queer* seperti saya dalam memahami gerakan LGBTQ.

Keterlibatan saya dalam mengorganisir LGBTQ Filipina baik sebagai peneliti maupun aktivis, membiasakan diri saya dengan ketegangan di antara berbagai segmen gerakan. Sementara beberapa mengedepankan kebutuhan akan undang-undang, yang lain mengaitkan gender dan pembebasan seksual dengan transisi sosialis. Yang lain mengakui homofobia dan misogini sebagai produk kesadaran individu, yang mendorong mereka untuk mendukung pendidikan yang responsif gender. Akhirnya, suatu segmen gerakan juga mengakui adanya titik temu antara berbagai isu. Dengan demikian, mereka menghindari argumen yang berpusat pada satu sebab dan satu solusi.

Ketegangan ini dapat dipahami dalam lensa *queer*. Keberadaan berbagai ideologi dalam gerakan secara esensial mencirikan gerakan itu sebagai kacau-balau, karena berbagai logika ideologis berhadapan satu sama lain. Ini khususnya dapat diamati selama pawai kebanggaan (*Pride marches*) di Metro Manila. Para peserta pawai membawa berbagai klaim yang terbentuk dalam ideologi tertentu. Sementara beberapa menyerukan pengesahan undang-undang anti-diskriminasi tertentu, yang lain juga mengedepankan keperluan adanya transformasi sistem ekonomi saat ini. Yang lain bahkan menyerukan untuk mengakhiri kontraktualisasi tenaga kerja (praktik kerja jangka pendek) sementara rombongan dari perusahaan tampak berpesta dan menari.

Seseorang dapat memahami ketegangan dan kekacauan semacam itu dengan memahami kondisi sosial dan historis di mana gerakan itu muncul. Organisasi LGBTQ mulai terbentuk beberapa tahun setelah jatuhnya rezim diktator Marcos pada tahun 1986 yang dihasilkan dari protes besar dan berkelanjutan. Tidak lagi sibuk dengan tujuan akhir menggulingkan rezim diktator, para aktivis mulai menjelajah ke berbagai advokasi. Institusi dari Konstitusi 1987 yang berpusat pada perlindungan hak-hak sipil mempercepat pembentukan organisasi-organisasi hukum yang menangani beragam masalah, termasuk antara lain keadilan seksual dan gender.

Bersamaan dengan kesempatan untuk berorganisasi adalah perpecahan ideologis di kaum Kiri Filipina. Di satu sisi, sebuah segmen menyatakan bahwa feodalisme tetap menjadi kekuatan yang memicu penindasan. Di sisi lain, beberapa kelompok menyimpang dari pemahaman

tersebut ketika mereka mengenali celah politik dan memanfaatkannya untuk memperjuangkan agenda progresif. Organisasi-organisasi yang menolak untuk melihat masalah dari analisis kelas murni juga muncul. Terletak dalam berbagai segmen dari kaum Kiri Filipina, para aktivis LGB-TQ disosialisasikan dalam berbagai aliran politik yang berbeda, yang mempercepat keragaman ideologis di dalam gerakan.

) Kelaziman dari keadaan queer

Di tengah suara-suara yang saling bertentangan ini, teori queer dapat membantu memfasilitasi percakapan dalam suatu gerakan yang terpolarisasi oleh ideologi. Kecenderungan beberapa organisasi LGBTQ adalah menolak berdiskusi dengan organisasi lain terutama ketika tidak terdapat keselarasan antara keyakinan masing-masing pihak. Sikap dan perilaku ini sebagian besar berasal dari logika bahwa perbedaan ideologis itu penting, alami, dan sudah demikian keadaannya. Beberapa bahkan menyatakan kepada saya bahwa upaya menjembatani akan lebih sering gagal karena ideologi begitu mengakar sehingga mereka akan selalu menghalangi persepsi positif tentang kelompok tertentu.

Saya berpendapat bahwa lensa *queer* merupakan suatu kerangka berpikir yang layak dalam konteks ini. Alih-alih memandang aliran politik sebagai kontradiksi alami, saya menafsirkan perbedaan mereka sebagai produk historis. Kelaziman dari pemikiran *queer* ini terletak pada kapasitasnya untuk mengembangkan empati terhadap para aktivis yang membawa ideologi berbeda. Memperhatikan seruan untuk menjadi *queer* adalah untuk bersikap taktis dalam tindakan. Kita perlu beralih dari pemahaman kontradiksi ideologis sebagai hal yang sudah demikian keadaannya ke cara memandangnya sebagai produk dari sejarah spesifik. Hanya dengan begitu kita dapat menggunakan suatu ideologi yang berfungsi untuk saat ini seraya tidak terhambat untuk memanfaatkan yang lain, jika diperlukan.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada John Andrew G. Evangelista < jgevangelista@up.edu.ph>

Narasi Sumbang

Perang Filipina Melawan Narkoba

oleh **Filomin C. Gutierrez**, University of the Philippines, Filipina dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sosiologi Penyimpangan (RC29), dan Perempuan, Gender dan Masyarakat (RC32)

■etika Rodrigo Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina pada Juli 2016, perang melawan narkoba seketika menjalar ke komunitas-komunitas Filipina. Kampanye ini melibatkan upaya anggota Polisi Nasional Filipina membujuk pengguna narkoba untuk menyerahkan diri secara suka rela dan berjanji mengakhiri kebiasaan mereka, dengan lebih dari satu juta "orang narkoba" (drug personalities) yang menyerahkan diri hanya dalam tempo enam bulan masa pemerintahan Duterte. Kampanye anti-narkoba ini dikenal luas sebagai Oplan Tokhang, suatu istilah yang berasal dari gabungan kata toktok dan hangyo, yang berturut-turut berarti "mengetuk" dan "mengaku" dalam Bahasa Cebuano. Sejak 2016, tokhang telah menjadi suatu eufemisme untuk extra-judicial killing (EJK) [pembunuhan di luar putusan pengadilan], baik oleh otoritas maupun oleh kelompok warga anti-narkoba yang main hakim sendiri (vigilantes).

Lonjakan angka kematian akibat perang melawan narkoba ini telah memicu kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Sumber resmi melaporkan bahwa hingga Juli 2019, sebanyak 5.375 orang narkoba telah terbunuh dalam operasi polisi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menaksir bahwa total angka kematian, yang mencakup EJK, telah mencapai lebih dari 25.000. The International Criminal Court (ICC, Mahkamah Pidana Internasional) mulai menginvestigasi Duterte pada Februari 2018 atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Survei opini publik oleh Social Weather Stations (SWS) pada akhir 2019 menunjukkan bahwa 75% warga Filipina percaya bahwa pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi akibat Oplan Tokhang.

Perang melawan narkoba telah memicu perhatian sangat besar di kalangan para peneliti ilmu sosial Filipina, yang sebagian besar tergerak oleh perspektif hak asasi manusia. Perkiraan angka kematian yang saling bertentangan, beserta penilaian yang saling bertentangan mengenai luasan dan keparahan problem narkoba, menandai perdebatan moral dan politik seputar anti kampanye ilegal melawan narkoba antara pihak-pihak berwenang, kelompok hak asasi manusia, dan para ahli, termasuk peneliti sosial.

Narasi-narasi mengenai penderitaan dari para tahanan dan para janda dari mereka yang terbunuh membentuk latar dari realitas baru Filipina yang penuh kekerasan. Realitas ini diikuti dengan paradoks hiper-stigmatisasi mengenai penggunaan narkoba oleh rezim politik dan peradilan pidana saat ini vis-à-vis "penyebaran yang dinormalkan" dari narkoba, seperti terungkap dalam istilah talamak (kronis) yang biasa digunakan oleh para tahanan, media dan publik pada umumnya.

Dalam studi saya sendiri, saya harus berjuang untuk memahami narasi-narasi sumbang dari para tersangka kasus narkoba, khususnya yang melibatkan penggunaan stimulan methamphetamine (dikenal dengan istilah lokal shabu). Saya mewawancarai 27 laki-laki di penjara, kebanyakan kelas pekerja yang berada pada awal dan menengah hingga akhir masa dewasa yang ditahan pada tahun pertama Oplan Tokhang atas tuduhan terkait narkoba. Mereka mengaku bahwa mereka merupakan korban salah tangkap, bahwa polisi merekayasa barang bukti, dan bahwa mereka diperlakukan buruk atau disiksa agar mengakui kesalahan mereka. Mereka menggambarkan nasib mereka sebagai walang kalaban-laban (tak mampu membela diri) terhadap polisi yang dengan paksa mendobrak ke dalam kediaman mereka. Terlepas dari nasib buruk pribadi yang dialami, kebanyakan di antara mereka masih mendukung kampanye anti-narkoba dari Duterte karena hal ini merupakan tindakan tegas terhadap memburuknya situasi narkoba yang telah sekian lama diabaikan.

Sudah jelas, para "pelanggar narkoba" di atas adalah bagian dari publik "penal populist" yang memberikan dukungan bagi terpilihnya Duterte sebagai presiden pada 2016. Kepanikan moral atas meningkatnya jumlah pecandu narkoba dan kerawanan lingkungan perumahan telah mendongkrak kebangkitan populisme hukuman (penal populism), suatu istilah yang diusulkan John Pratt sebagai sebuah pendekatan yang mengadopsi tindakan-tindakan lebih menghukum terhadap kriminalitas yang didasarkan pada sentimen publik ketimbang bukti-bukti empiris atau pertimbangan para ahli. Hal ini dapat dicermati pada jajak opini publik yang dikeluarkan SWS di akhir 2019 yang memperlihatkan bahwa Duterte memperoleh tingkat kepuasan sebesar 72% dari warga

"Persoalan narkoba di Filipina tidak dapat direduksi menjadi pertarungan antara orang baik versus orang jahat, para pecandu versus yang bukan pecandu, dan polisi baik versus polisi jahat"

Filipina, dan perangnya melawan narkoba memperoleh tingkat kepuasan sebesar 70%.

Sebelum Duterte menjabat presiden, studi-studi yang dilakukan Gideon Lasco telah menunjukkan bahwa anakanak muda Filipina di suatu komunitas pelabuhan menggunakan shabu sebagai pampagilas (pemacu kinerja) untuk pekerjaan mereka di sektor informal (seperti penjaja, tukang angkut, pekerja seks). Begitu pula, partisipan studi saya juga mengaku menggunakan shabu untuk memulihkan tenaga dari kelelahan, tetap terjaga, dan untuk menjalankan pekerjaan yang sulit diperoleh atau membutuhkan waktu panjang yang tidak dapat diprediksi (seperti sopir truk dan jeepney, pekerja konstruksi). Mereka menolak disebut "pecandu" karena, dalam keyakinan mereka, mereka dapat berhenti kapan saja mereka mau dan tidak membiarkannya menjadi kebiasaan yang buruk. Bahwa mereka membelinya dari pendapatan sendiri dan tidak dengan uang yang diperoleh dari pencurian, perampokan atau aksi kriminal lain membuat shabu memperoleh legitimasi sebagai barang konsumsi di pasar terbuka. Oleh karena itu, cakupan analisis atas pemakaiannya perlu bergerak melampaui pengertian-pengertian tentang kesenangan atau pengunduran diri dan juga teori-teori subkultural mengenai kecanduan, dan mengarah pada fungsinya sebagai suatu sarana arus utama untuk menghadapi tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi.

Terlepas dari pembelaan diri para partisipan terhadap konsumsi narkoba mereka, ujung pembicaraan saya dengan mereka adalah pengakuan mereka bahwa shabu adalah "perusak keluarga," "sumber kriminalitas," "pada akhirnya jahat," dan "masalah nasional" yang harus dibasmi. Salah satu aspek kunci dari narasi mereka adalah bahwa polisi yang mendapatkan informasi keliru telah melakukan kesalahan dengan menangkap mereka, alihalih menyasar pihak-pihak yang benar-benar bersalah: para pecandu yang dengan keji melakukan kejahatan untuk membiayai kebiasaan jelek mereka, para pemasok yang berburu uang dengan mengeksploitasi mereka, dan para polisi korup yang memeras uang dari para pecandu dan penjaja.

Wawancara awal saya dengan para perwira polisi mengenai Oplan Tokhang juga menyiratkan satu pengalaman yang disalahpahami oleh kelompok hak asasi manusia dan disalahsajikan oleh media. Mereka menyatakan keyakinan mereka dalam menjalankan mandat dan cita-cita melindungi negara dan penduduknya dari bahaya narkoba "yang tampak tidak ada akhirnya." Sementara mengakui bahwa narkoba mengisi ruang kosong yang diciptakan oleh kemiskinan dan bahwa para bandar narkoba secara ekonomi mengeksploitasi para pecandu dan penduduk miskin, mereka juga menganggap bahwa orang-orang narkoba ini sebagai pejuang bersenjata yang siap melakukan balas dendam. Lebih penting lagi, mereka secara reflektif melihat Oplan Tokhang ini sebagai kampanye yang mengungkapkan "kedalaman sebenarnya dari problem narkoba," dan bagaimana problem ini telah "secara parah mengkorup jajaran polisi." Apabila suatu kisah mendalam-satu pendekatan yang digunakan Arlie Hochschild untuk menangkap pengalaman kalangan [partai] Republik Amerika sayap kanan-dapat dituturkan dari narasi para "pelanggar narkoba," agaknya kisah tersebut akan menyajikan gambaran yang amat berbeda dengan realitas Filipina yang dirakit dari narasi pihak polisi.

Penelitian ilmu sosial tentang perang Filipina melawan narkoba dapat benar-benar berkontribusi pada penyediaan kebijakan yang berbasis bukti, baik dengan melibatkan keahlian metodologis untuk mengukur tingkat kecanduan, mengonseptualisasikan ulang berbagai tipologi pemakaian narkoba, atau menginterpretasikan opini publik mengenai kriminalitas. Tantangan bagi sosiologi adalah bahwa ia harus menjaga kehati-hatian terhadap kerangka yang menyodorkan aneka bentuk biner yang mereduksi persoalan narkoba di Filipina menjadi pertarungan antara orang baik versus orang jahat, para pecandu versus yang bukan pecandu, dan polisi baik versus polisi jahat. Yang lebih penting lagi, para sosiolog yang meneliti perang melawan narkoba harus sangat waspada untuk tidak mengistimewakan elitisme hukuman (penal elitism), suatu istilah yang digunakan Victor Shammas untuk merujuk penilaian berlebihan atas pendapat ilmiah atau ahli dan pengabaian pendapat publik yang dianggap emosional, irasional dan simplistis. Refleksi diri semacam ini pada gilirannya akan menuntut para sosiolog untuk merasa nyaman dengan berbagai narasi yang saling berkontestasi dalam kelompok-kelompok aktor sosial, dan antara apa yang dianggap sebagai kubu-kubu dalam spektrum politik dan moral yang membentuk publik.

 $Seluruh \ korespondensi \ ditujukan \ kepada \ Filomin \ C. \ Gutierrez < \underline{fcgutierrez@up.edu.ph} >

Memberlakukan Sosiologi Publik di Filipina

oleh **Phoebe Zoe Maria U. Sanchez**, SMAG/CriDIS, UC Louvain, Belgia, dan University of the Philippines Cebu, Filipina and anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sosiologi Politik (RC18)



Anggota organisasi agama, ilmiah dan masyarakat sipil bergabung dalam protes di jalan melawan peringatan Undang-undang Darurat Militer, pada tahun 2018.

umpukan jenazah telah membubung di bawah rezim Duterte sekarang ini (*Rappler*, Desember 2018). Lebih konkretnya, rezim ini telah mengawali suatu skema penyelesaian politik yang mengesankan bersama suatu jejaring keluarga politik feodal dan komprador di jabatan publik yang mendukungnya sebagai juru bicara yang tangguh, serta birokrasi negara dari polisi dan militer Filipina. Hal ini diperlihatkan tatkala Duterte mengerahkan bagian terbesar anggota Dewan Perwakilan Filipina dan menurunkan seorang Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2018.

Para ilmuwan menamakannya "populisme otoriter" mengingat bahwa, untuk sebagian, hal tersebut diselingi dengan program-program yang populer dan dari segi pembangunan bersifat progresif, meskipun secara terbuka menyerukan dilakukannya "pembunuhan" sebagai suatu strategi dalam kebijakan-kebijakan penanggulangan kejahatannya. Tetapi rezim tersebut menobatkan sejenis dinamika politik yang secara terang-terangan dan telanjang merupakan suatu bentuk otoritarianisme. Rezim tersebut

baru-baru ini telah meningkatkan pengawasan polisi, militer dan paramiliter terhadap komunitas-komunitas Filipina di kala rezim menanamkan politik kotor melalui kecurangan dalam pemilihan umum, penyalahgunaan kekuasaan, serta korupsi, dan terlibat dalam meluapnya secara drastis pembunuhan dengan jebakan gaya McCarthy [tuduhan tanpa disertai bukti] sebagai pembenaran untuk membunuh aktivis sosial, agamawan, pegiat advokasi hak asasi manusia, praktisi hukum, guru besar universitas, petani, pemuda dan golongan lain.

Suatu praktik substansial dalam sosiologi Filipina sejak kediktaturan pertama dari rezim Marcos adalah penerapan sosiologi publik sebagai suatu tanggapan yang diperlukan terhadap persepsi mengenai tidak dikenalnya sosiologi oleh publik Filipina. Hal ini bersumber pada sudut pandang bahwa masyarakat Filipina dihadapkan pada suatu krisis kediktatoran yang permanen, dari rezim Marcos sampai ke Duterte. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai sifat dari apa yang dinamakan Revolusi Rakyat EDSA (EDSA People Power Revolution) pertama di tahun

1986 yang menggulingkan kediktatoran Marcos dan apakah hal tersebut benar-benar telah membuka jalan bagi berlangsungnya suatu transisi demokratis. Sayangnya kini tampaknya telah ditarik kesimpulan bahwa Revolusi Rakyat EDSA pertama dahulu kekurangan perangkat yang diperlukan bagi demokratisasi sejati mengingat telah didirikannya suatu tatanan fasis 33 tahun kemudian. Hal ini menandakan adanya krisis berupa otoritarianisme permanen, yang menantang Sosiologi Cebu Filipina (Filipino Cebuano Sociology) untuk memikirkan ulang apakah tahun-tahun yang mengikuti Revolusi Rakyat EDSA pertama sungguh-sungguh merupakan tahun-tahun penyempurnaan suatu transisi demokrasi sepenuhnya, ataukah tahun-tahun pemantapan bentuk kediktatoran yang sekarang dihidupkan kembali. Kalau tidak, bagaimana praktik otoriter sebelumnya dapat hidup dalam bentuknya yang sekarang dan dengan dampak yang lebih mematikan? Karena, dibandingkan dengan pembunuhan-pembunuhan oleh Marcos yang berjumlah 3.000 lebih sedikit, jumlah kematian di masa kini adalah rata-rata 33 orang tiap hari, artinya, lebih dari 30.000 orang dalam tiga tahun pertama pemerintahan Duterte (Rappler, Desember 2018).

Sosiologi publik yang dipraktikkan di University of the Philippines Cebu menghubungkan: a) Sosiologi Profesional, b) Sosiologi Kritis, dan c) Sosiologi Kebijakan Publik. Ini sejalan dengan sosiologi publik Burawoy (2004) yang berdiri di atas pembagian kerja antara empat sosiologi, yaitu: a) sosiologi profesional, b) sosiologi kritis, c) sosiologi publik (publik majemuk), dan d) sosiologi kebijakan. Sosiologi profesional menyediakan mekanisme untuk keahlian sosiologi dalam desain penelitian yang sesuai dan penggunaan metode serta teknik yang tepat, misalnya: studi kasus, sosiografi, etnografi, pengamatan terlibat, integrasi massa dasar dan sebagainya. Ini memungkinkan sosiolog maupun mahasiswa untuk menguji tesis mereka dan terlibat dalam pembahasan mengenai kebijakan sosial dan publik, institusi sosial, kebudayaan, kelompok, organisasi, dan proses interaksi di antara orang-orang yang bekerjasama. Dengan cara yang sama, sosiologi profesional mengundang para ilmuwan sosial untuk melakukan imajinasi ulang terhadap masalah-masalah sosial di luar konstruktivisme sosial, memperluas wacana publik orang Filipina ke jalanan, dan menyediakan mekanisme untuk merekam dan menerbitkan pola-pola artikulasi kepentingan publik. Ini berdiri di atas praktik politik pribumi atau lokal dalam pemerintahan, dalam mana sosiologi kritis memungkinkan pemahaman perebutan kekuasaan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik mengenai sumber daya tertentu yang ketersediaannya terbatas. Sosiologi kritis mempertimbangkan struktur-baik yang dominan maupun yang didominasi, siapa yang mengendalikan dan siapa yang dikendalikan. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan suatu massa kritis Filipina yang dapat dimobilisasi untuk demonstrasi publik yang nyata yang diorganisasikan untuk menciptakan suatu gerakan sosial. Gerakan sosial ini, pada gilirannya, menjadi penggerak utama yang diperlukan untuk tautan terakhir yaitu penilaian dan evaluasi isi dan konteks kebijakan-kebijakan publik dalam bentuk sosiologi publik.

Rajutan dari tautan-tautan yang telah disebutkan membentuk campuran teknis yang konkret yang memungkinkan sosiologi publik bekerja sebagai suatu bidang ilmu. Sosiologi publik berlangsung manakala dinamika demokratisasi memungkinkan sektor-sektor yang termarginalisasi untuk mengakses sumber daya dan memainkan peran penting dalam masyarakat sipil dan di dalam negara. Sosiologi publik pada mulanya berbentuk suatu pelatihan akademik dalam imajinasi sosiologis, sebagai bahan pembahasan di antara para mahasiswa dan profesor. Kemudian meluas ke luar empat dinding ruang kelas, untuk bertugas sebagai suatu perangkat sosial dan mekanisme pendukung untuk membuka budaya bungkam di kalangan komunitas yang tertindas melalui diskusi-diskusi yang ekstensif, berteori, dan rekayasa sosial dengan mendukung organisasi-organisasi di kalangan individu dan komunitas miskin, terdeprivasi, tertindas, dan terzalimi. Kemampuan seorang sosiolog untuk mengerahkan suatu kekuatan atau jumlah orang merupakan suatu cara untuk membuka kedok cara-cara melalui mana negara secara terus terang dan dengan menggunakan kekerasan telah menjadi alat untuk melindungi dan melestarikan kepentingan kelas yang berkuasa.

Khususnya di Filipina masa kini, para sosiolog publik harus memberanikan diri untuk menjadi pelopor proses demokratisasi karena Filipina berhadapan dengan berakarnya defisit demokrasi dan ketiadaan supremasi hukum. Kali ini, seperti di era Marcos, Filipina memerlukan formasi masyarakat sipil yang mengorganisasi diri, sukarela, bangkit mandiri, secara tulus otonom dari negara, dan mampu mengartikulasi kepentingan umum, terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan yang dimiliki bersama. Oleh sebab itu tujuan akhir sosiologi publik dapat disebut sebagai sosiologi demonstrasi publik (sociology of public demonstration). Sosiologi demonstrasi publik ini terdiri atas bukti-bukti, perangkat bujukan, mekanisme transaksional dan koordinasi, perlengkapan kognitif dan rasional dalam bentuk komunikator kolektif yang terdidik dalam hal isu-isu atau advokasi, dan/atau mobilisasi dan persaingan antara aparat dalam bentuk massa rakyat atau bank suara. Sosiologi demonstrasi publik ini mengukur efisiensi dan efektivitas sosiologi publik yang sedang dikerahkan. Dan publik dalam demonstrasi merupakan isyarat bagi instrumentasi kebijakan publik karena menyediakan jalan bagi penilaian dan penjelasan efektivitas atau kegagalan dari kebijakan publik pemerintah.

Suatu tujuan utama sosiologi publik ialah untuk menyimpulkan dan berteori mengenai hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (Lascoumes and Le Galès, 2007; *The American Sociologist*, 2005). Dari perspektif Selatan Global, datanglah pemerintahan yang sebenarnya dalam kerangka suatu logika setempat atau berbagi dalam kolektif dalam komunitas dan hubungan dalam solidaritas. Kerangka ini kemudian dicakup dalam pembuatan makna, pengaturan, pengembangan pajak dan komunikasi massa dari lembaga pemerintah yang tunduk pada pengawasan publik oleh masyarakat sipil dan demonstrasi publiknya.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Phoebe Zoe Maria U. Sanchez <phoebe.sanchez@uclouvain.be>

Mengarusutamakan Mindanao dalam Sosiologi Filipina

oleh **Mario Joyo Aguja**, Mindanao State University, Filipina, Presiden Masyarakat Sosiologi Filipina dan Anggota Komite Penelitian ISA tentang Angkatan Bersenjata dan Resolusi Konflik (RC01), Sosiologi Usia Lanjut (RC11), Sosiologi Perkotaan dan Pembangunan Regional (RC21), Sosiologi Seni (RC37), and Sosiologi Bencana (RC39)



Para peserta konferensi Masyarakat Sosiologi Filipina 2019 di Mindanao. Kredit: Philippine Sociological Society.

epulauan Mindanao yang sering disebut sebaga Filipina Selatan, paling sering menderita marginalisasi dalam suatu sejarah nasional yang dipenuhi narasi-narasi mengenai marginalisasi. Mindanao, yang sebelumnya berada di bawah Kesultanan Maguindanao dan Sulu, telah mengembangkan sistem pemerintahan yang terpusat dan peradaban yang lebih maju dibandingkan daerah lain di negeri ini sebelum kedatangan orang Spanyol pada tahun 1521. Kesultanan-kesultanan tersebut berperang melawan penjajah selama 300 tahun dalam "Perang-perang Moro" yang pahit dan tidak pernah dijajah. Mindanao seketika menjadi bagian dari Filipina ketika Amerika menandatangani Perjanjian Paris dengan Spanyol pada

tahun 1898, dan sejak itu dijajah "secara legal." Namun AS selaku suatu imperium penguasalah yang mengawali kolonisasi destruktif terhadap Mindanao yang mengakibatkan marginalisasi ekonomi, politik dan budayanya. Ketidakadilan sejarah yang dilakukan terhadap rakyat Mindano telah terhubung dengan perjuangan getir berbagai kelompok separatis Moro dan menjelaskan buruknya keadaan kesejahteraan di Filipina Selatan. Ketidakadilan yang dilakukan terhadap rakyat Mindanao tetap merupakan pokok bahasan keadilan transisional hingga hari ini.

Kebangkitan Manila (yang kemudian disebut Metro Manila) di Utara sebagai pusat *de fakto* ekonomi, politik, militer, dan kekuasaan budaya rezim kolonial dan domestik melanjutkan hubungan yang tidak adil dalam relasi pusat-periferi di negeri ini. Langkah menuju perdamaian di Selatan dan desentralisasi pemerintahan menuju pemberdayaan ekonomi dan politik yang lebih otonom masih belum terwujud. Walaupun sumber daya alamnya berlimpah, Mindanao mempunyai angka kemiskinan yang tinggi dan dilanda separatisme yang dilandasi konflik Islam-Kristen. Upaya damai yang dicapai melalui *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* (CAB) pada tahun 2014, antara Pemerintah Filipina dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), di mana ancaman ekstremisme dengan kekerasan tetap membayangi, menambah status periferi yang termarginalisasi dari Mindanao dalam bangsa Filipina sebagai subyek dan obyek yang penting dari kajian sosiologi.

› Naratif Sentris dari Masyarakat Sosiologi Filipina

Narasi nasional tentang relasi pusat-periferi mengusik bidang kegiatan yang berbeda di negeri ini, termasuk narasi dari akademia, ilmuwan, dan kaum profesional. Narasi dari Masyarakat Sosiologi Filipina (*Philippine Sociological Society/PSS*) adalah salah satu contoh dari sekian narasi model ini. Berkembanganya sosiologi di Filipina dulunya merupakan insiatif pusat-metropolitan. Keanggotaan dan kepemimpinannya didominasi para sosiolog dari pusat. Publikasinya, *The Philippine Sociological Review*, biasanya mempunyai penulis-penulis dari pusat yang membahas topik yang sesuai dengan minat pusat. Konferensinya umumnya dilaksanakan di pusat. Namun akhir-akhir ini tren tersebut berubah.

Dulunya PSS terutama diorganisir oleh orang-orang dari pusat yang memiliki berbagai program sosiologi di universitas mereka. Daftar anggota pendiri dan afiliasi institusi mereka mencerminkan hal ini. Ketika PSS diorganisir tahun 1952, anggota pendirinya terafiliasi dengan institusi-institusi berikut, yang kesemuanya berada di Metropolitan Manila, seperti: De la Salle University, Phil. Women's University, Phil. Rural Christian Fellowship, University of the East, College of Holy Spirit, Union Theological Seminary, dan University of the Philippines.

Sebagai konsekuensinya, kepemimpinan PSS diatur dari metropolis. Selama 69 tahun keberadaannya, jabatan presiden dari organisasi ini dipegang oleh Metropolitan Manila sebanyak 54 kali, bagian lain dari Luzon 7 kali, dan Mindanao 8 kali. Kepulauan Visayas masih harus menanti untuk dapat memegang tampuk kepemimpinan organisasi. Selama 43 tahun University of the Philippines dan Ateneo de Manila saling bersaing untuk memimpin organisasi ini, sedangkan Mindanao hanya memegang pucuk kepemimpinan selama 8 tahun, atau 10.29%. Terakhir kali posisi tersebut mereka pegang adalah tahun 1980. Baru pada tahun 2019 dan 2020 Mindanao kembali memegang pucuk kepemimpinan dan mempunyai kesempatan untuk memberikan perspektif Mindanao yang kuat dalam wacana sosiologi di negeri tersebut.

) Perubahan Mandat

Dimulai sejak tahun 2000-an, PSS telah mengambil banyak insiatif dari Mindanao. Ini merupakan tanggapan terhadap tuntutan zaman, tetapi juga karena orang-orang Mindanao pada akhirnya menjadi bagian dari kepemimpinan. Ini menjadi kesempatan untuk PSS untuk tak hanya membawa anggotanya ke Mindanao, tetapi juga untuk mendekatkan anggotanya dengan wacana Mindanao sebagai bagian dari narasi nasional. Meskipun khawatir terhadap keamanan, Konferensi PSS pada tahun 2014 berhasil dilaksanakan dengan sukses di Kota General Santos, bagian kota paling Selatan dari Mindanao dengan temanya "Krisis, Ketangguhan, Komunitas: Sosiologi di Era Bencana." Belum puas, dan sebagai bagian dari organisasi keadilan transisional (transitional justice), pada Konferensi tahun 2015, dengan tema "Sosiologi Damai dan Konflik: Konteks dan Tantangan" kembali diadakan di Mindanao, di Iligan City di bagian Utara Mindanao. Tema ini sejalan dengan telaah terhadap harapan Perjanjian Bangsamoro pada tahun 2014 antara Pemerintah Filipina dengan MILF maupun dengan insiden Tragedi Mamasapano yang menelan korban jiwa 44 orang anggota Pasukan Khusus Polisi Filipina. Dengan naiknya Rodrigo Duterte ke tampuk kekuasaan populis di tahun 2016, ia menjadi Presiden Filipina pertama dari Mindanao, dan PSS menyelenggarakan konferensinya di kotanya, Davao City, dengan tema "Imagined Democracies: Transformation of Power and Knowledge in Philippines Society." Konferensi pada tahun 2017 dan 2018 diselenggarakan di Visayas Islands namun pada tahun 2019 kembali diadakan di Mindanao, di Provinsi Bukidnon, dengan tema "Engaged Citizenship and Identities."

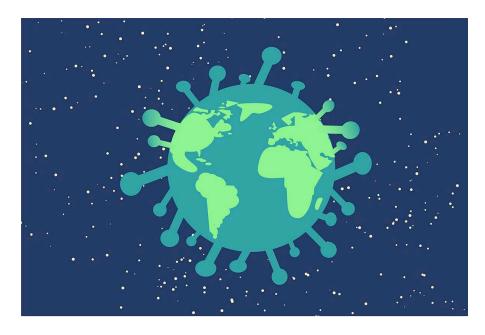
Konferensi-konferensi di Mindanao memberikan kesempatan kepada berbagai perguruan tinggi di Mindanao yang menawarkan gelar sosiologi untuk menjadi tuan rumah, dan ini menempatkan institusi-institusi mereka dalam narasi nasional tentang pendidikan para sosiolog baru yang berasal dari Mindanao. Mindanao State University (MSU)-General Santos City menjadi tuan rumah pada konferensi tahun 2014, dan diikuti MSU-Iligan Institute of Technology di tahun 2015, dan Ateneo de Davao University di tahun 2016. Pada tahun 2019 Central Mindanao University (CMU) dan Bukidnon State University menjadi tuan rumah Konferensi PSS. Ini turut memberikan kesempatan kepada orang Mindanao yang menekuni sosiologi untuk naik mimbar untuk presentasi hasil penelitian mereka, menjalin persahabatan, dan menjadi bagian dari transformasi PSS menuju sosiologi nasional yang sesungguhnya.

Saat ini, dijumpai rasa kepedulian lebih tinggi di antara para sosiolog Filipina tentang Mindanao-tentang orangnya, tempat-tempat, kekayaan budayanya, dan wacananya. Mindanao telah mulai mendobrak hegemoni metropolitan dan mengarusutamakan dirinya sebagai "Filipina yang lain" yang berhak atas wacana sosiologi kritis dan kepemimpinan. Dengan kerja keras yang telah dilakukan di Mindanao dalam tahun-tahun terakhir, Masyarakat Sosiologi Filipina telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap upaya sosiologi Filipina untuk menjadi sosiologi nasional yang sejati.

Korespondensi langsung ditujukan kepada Mario J. Aguja mario.aguja@msugensan.edu.ph>

Sosiologi Global dalam Pandemi

oleh **Geoffrey Pleyers**, Universitas Katolik Louvain, Belgia, Wakil Presiden ISA untuk Penelitian, Mantan presiden Komite ISA untuk Penelitian tentang Kelas Sosial dan Gerakan Sosial (RC47), dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Sosiologi Agama (RC22), Sosiologi Pemuda (RC34), and Gerakan Sosial, Tindakan Kolektif dan Perubahan Sosial (RC48)



Pandemi COVID-19 merupakan suatu krisis sosial, ekologi, dan politik di seluruh dunia yang menuntut adanya suatu sosiologi global. Sumber: Creative Commons.

lirus corona telah membawa kembali ilmu pengetahuan ke pusat ruang publik, bahkan di negara-negara di mana pemimpin populisnya biasanya melakukan delegitimasi terhadapnya. Para ahli epidemiologi, dokter dan ahli biologi mengemukakan fakta nyata bahwa pandemi berkembang setiap hari dan jauh lebih parah daripada sekadar "flu berat". Para ilmuwan sosial telah memunculkan fakta yang sama nyatanya dan tidak bisa dipertanyakan bahwa: sementara virus tersebut dapat menulari siapa saja, kita berada dalam kesenjangan yang lebar dalam menghadapinya. Kebijakan kesehatan masyarakat dan kesenjangan sosial setidaknya sama pentingnya dengan cara tubuh kita bereaksi, di kala kita berhadapan dengan konsekuensi mematikan dari virus ini. Para ilmuwan sosial telah menun-

jukkan bahwa pandemi COVID-19 bukan sekadar suatu krisis sanitasi, melainkan juga suatu krisis politik, ekologi dan sosial.

Pandemi telah menyebabkan kecenderungan "deglobalisasi". gara-negara telah menutup perbatasan mereka. Perjalanan telah menurun secara tajam. Acara internasional yang besar-seperti forum ISA-telah dibatalkan atau ditunda. Prioritas pemerintah nasional adalah untuk mengamankan akses ke peralatan kesehatan dan persediaan dasar bagi "rakyatnya sendiri". Ilmu-ilmu sosial telah seringkali mengikuti langkah ini dan fokus pada skala nasional. Para ilmuwan dan pakar telah melakukan kajian statistik nasional, menganalisis dampak virus lintas kelas dan ras di negara mereka, memantau tanggapan pemerintah terhadap krisis, dan berkontribusi terhadap debat publik nasional.

Kembalinya nasionalisme metodologi adalah sebuah paradoks karena pandemi COVID-19 adalah suatu fenomena global yang mendalam. Pandemi ini tidak berhenti di perbatasan yang ditutup dan mengungkapkan betapa dalamnya kita telah menjadi saling tergantung. Kolaborasi internasional merupakan hal yang krusial dalam menghadapi pandemi. Hal ini pasti benar di bidang kedokteran dan ilmu pasti untuk dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang virus itu sendiri, memperbaiki pengobatan medis, dan muncul dengan sebuah vaksin. Kolaborasi internasional juga sama krusialnya di bidang ilmuilmu sosial. Kita perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain dan wilayah dunia lainnya dengan pandemi. Perspektif global seperti ini tidak seharusnya menjadi "globalisme metodologis" dan hanya terbatas pada analisis makro. Agar berguna di masa pandemi, kita harus memfasilitasi dialog global di antara ilmuwan sosial dari berbagai wilayah, terlibat sepenuhnya dalam suatu realitas yang pada waktu yang bersamaan bersifat lokal, nasional, regional dan global.

Walaupun seringkali terpinggirkan oleh pembuat kebijakan, kontribusi ilmu-ilmu sosial dalam menghadapi pandemi virus corona sama pentingnya, dan dalam banyak hal menjadi pelengkap bagi ilmu-ilmu pasti dan alam. Kontribusi tersebut terutama berfokus pada empat perangkat debat berikut.

1. Pandemi sebagai suatu krisis sosial

Para ilmuwan sosial telah mengungkapkan bahwa, meskipun virus bisa menulari setiap manusia, namun dampak pandemi pada tiap orang berbeda-beda, dan cara virus ini ditangani terkait erat dengan faktorfaktor sosial. Pandemi COVID-19 telah mempertajam kesenjangan sosial dan mengungkap struktur sosial, terutama dalam kerangka kelas, ras dan gender. pendekatan inter-seksional sangat krusial untuk memahami bagaimana krisis ini dialami dan mengapa cara kita menghadapinya sangat tidak setara dan tidak adil. Di negara-negara dan daerah tanpa sistem kesejahteraan yang kuat, krisis sanitasi dengan cepat mengubahnya menjadi suatu krisis kemanusiaan, dengan konsekuensi yang mematikan, karena organisasi kemanusiaan nasional dan internasional tidak dapat bertindak seperti biasanya.

2. Tata kelola COVID-19

Seperangkat kontribusi kedua menganalisis cara pembuat kebijakan dan rezim politik mengatasi pandemi. Negara-bangsa memaksakan diri menjadi pemain utama dalam menangani pandemi. Institusi internasional telah menghilang dalam krisis global

termasuk PBB dan Uni Eropa. Pandemi telah mengungkap kekuatan dan keterbatasan sistem politik nasional. Kurangnya efisiensi pemerintah nasional atau wacana berulang-ulang oleh pemimpin nasional yang meremehkan pandemi serta menunda langkah karantina wilayah (lockdown) telah mengakibatkan ratusan kematian tambahan. Menghadapi pandemi, tiap pemerintah telah menetapkan politik kematian (necropolitics) masing-masing. Kebanyakan telah gagal menyediakan perlindungan dasar terhadap penyebaran virus pada tenaga kesehatannya. Melalui kebijakannya, pemerintah memberikan kesempatan yang lebih kecil pada sekelompok orang tertentu dalam menghadapi virus daripada kelompok lain, sementara para lanjut usia yang meninggal di panti wreda tidak muncul di kebanyakan statistik publik di banyak negara.

Pandemi dan karantina wilayah telah mengubah relasi antara warga negara dan pemerintah. Warga negara berpaling pada pemerintah untuk perlindungan, perawatan dan panduan menghadapi pandemi. Banyak warga menerima kontrol sosial yang lebih kuat dari negara dan teknologi pengawasan baru serta pengenalan wajah sebagai harga yang harus dibayar untuk mengendalikan pandemi.

3. Bagaimana masyarakat bereaksi

Perangkat kontribusi ketiga menganalisis cara individu dan masyarakat sipil mengatasi krisis. Sosiolog menggali dampak yang dalam dari karantina wilayah pada kehidupan masyarakat, subjektivitas, dan relasi sosial. Relasi antargenerasi membuat bentuk dan makna yang baru. Teknologi digital telah memainkan peranan penting dalam mempertahankan hubungan sosial. Pengaturan menjaga jarak sosial telah mengakibatkan risiko pada solidari-

tas dan bahkan seringkali menyusutkan batas komunitas di mana aturan tersebut diterapkan. Sementara jaringan solidaritas baru muncul pada lingkungan dan kota, kita juga menyaksikan keterbatasan solidaritas pada komunitas nasional atau pada keluarga.

4. Akankah suatu dunia baru bangkit dari krisis?

Perangkat analisis keempat membahas dampak jangka lebih panjang dari pandemi. Sebagai suatu krisis global, pandemi COVID-19 telah membuka cakrawala kemungkinan dan barangkali suatu kesempatan untuk menata ulang dunia dengan cara yang berbeda. Banyak ilmuwan sosial menekankan perlunya dunia yang lebih peka terhadap manusia, kepedulian, dan kesenjangan sosial, dan terhadap sistem layanan kesehatan masyarakat yang lebih kuat. Namun krisis dapat pula membuka jalan bagi model kemasyarakatan yang lain. Sejauh ini, peningkatan kompetisi telah melebihi solidaritas baru dalam manajemen krisis. Paket bantuan ekonomi secara masif justru difokuskan untuk menyelamatkan korporasi nasional daripada untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Pandemi juga dapat membuka jalan untuk suatu era otoriter yang baru, dengan biopolitik yang didasarkan pada teknologi baru.

Cara kemanusiaan mengatasi pandemi COVID-19 akan bergantung pada dunia medis dan ilmu pengetahuan, terutama untuk menemukan suatu vaksin. Namun hal ini juga akan bergantung pada bagaimana masyarakat, pembuat kebijakan dan warga negara menangani krisis ini dan menanamkan benih dunia yang akan dihasilkannya.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Geoffrey Pleyers < Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be>

> COVID-19:

Pelajaran Pertama dari Pandemi Saat Ini

oleh Klaus Dörre. Universitas Jena. Jerman



Pandemi sangat memukul usaha kecil, termasuk di antaranya restoran dan pengecer. Kredit: Russ Loar/flickr.com. Hak tertentu dilindungi.

ada April 2020, ketika saya menulis ini, ekonomi sedang menuju resesi. Tidak ada yang bisa membuat prediksi yang pasti mengenai perkembangan dalam beberapa bulan mendatang, karena tidak pastinya berapa lama pandemi akan berlangsung. Tetapi, ini mungkin bukan terlalu dibuat-buat untuk mengantisipasi kemerosotan ekonomi yang mendalam. Satu-satunya pertanyaan adalah seberapa dalam kemerosotan akan terjadi.

) Perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap tenaga kerja

Dalam skenario kasus terbaik, karantina wilayah (*shutdown*) di sebagian besar negara akan berakhir setelah satu bulan. Bahkan kemudian, Jerman, misalnya, harus memperhitungkan jatuhnya pertumbuhan seperti yang

terlihat selama krisis 2007-9. Menurut Institut Penelitian Ekonomi ifo, karantina wilayah selama tiga bulan dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 20%, dengan hingga 5,5 juta orang dalam pekerjaan jangka pendek (apa yang disebut Kurzarbeit di Jerman, karena karvawan di Jerman tidak diberhentikan selama resesi tetapi jam kerja mereka dapat dikurangi menjadi 0 sementara pemerintah membayar sebagian dari pendapatan mereka yang hilang). Tetapi banyak usaha-usaha kecil dan mikro tidak akan mampu bertahan lama tanpa bantuan keuangan langsung. Ini adalah masalah khusus untuk daerah-daerah dengan ekonomi skala kecil. Bagi juara dunia dalam hal ekspor seperti Jerman, pertumbuhan yang pesat setelah berakhirnya pandemi merupakan hal yang tidak pasti. Itu tergantung pada seberapa cepat negara-negara lain, seperti Tiongkok dan tetangga-tetangga

Jerman di Eropa, pulih. Tindakan pemerintah federal Jerman [pun] saling bertentangan: seharusnya tertarik pada bantuan cepat dalam EU, tetapi malah memblokir oblikasi euro sebagai sarana manajemen krisis.

Banyak yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang baik tentang krisis ini. Krisis mengancam ribuan orang dengan kematian, akan menyebabkan jutaan kehilangan pekerjaan, dan sementara waktu merampas miliaran orang dari hak-hak dasar yang penting. Semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin serius dampak destruktifnya terhadap budaya, masyarakat, dan ekonomi. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini harus berlaku untuk perusahaan besar dan kecil: jangan ada pengurangan tenaga kerja, tetapi sebaiknya pemutusan hubungan kerja sementara yang disubsidi. Secara umum, menyelematkan pekerjaan akan menjadi penting. Di Jerman

ada langkah-langkah yang dicoba dan teruji dalam bentuk kerja jangka waktu pendek berjangka panjang.

Proses produksi tergantung pada kerja sama, yang meliputi kontak antara orang-orang; kontak sosial di tempat kerja penting bagi banyak orang. Bahkan aktivitas yang secara fisik melelahkan dan monoton lebih mudah untuk ditoleransi ketika hubungan antara pekerja baik. Hal tersebut sekarang telah menghilang. "Jaga jarak Anda!" pada dasarnya berarti de-sosialisasi radikal atau bahkan de-komunitarisasi.

Di sisi lain, dalam pekerjaan yang saat ini dianggap relevan secara sistematik di rumah sakit, pasar swalayan, panti wreda, pertanian, dll., kontak fisik hampir tidak dapat sepenuhnya dihindari. Seseorang dapat mengikuti aturan dan melindungi asisten toko dengan lembaran Plexiglas (kaca akrilik), misalnya, tetapi bagi setiap orang yang tidak bekerja dari rumah, risiko terhadap kesehatan mereka jauh lebih besar secara tidak proporsional. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa pengemudi bus, staf kasir, tenaga perawatan, dan perawat sekarang menerima apresiasi lebih besar dari pelanggan dan masyarakat umum. Orang hanya dapat berharap bahwa ini akan berlanjut dan di masa depan juga akan tercermin dalam gaji yang lebih baik, lebih banyak staf, dan kondisi kerja yang lebih baik di bidang-bidang ini. Bagaimanapun juga, negara-negara yang akan melalui krisis terbaik adalah negara-negara dengan sistem kesehatan yang kokoh dan negara kesejahteraan yang tahan krisis. Ini juga memperjelas negara-negara mana di benua Eropa yang paling parah terkena dampak dari krisis ini – negara-negara di Selatan dan Tenggara. Tingkat kematian yang tinggi dari mereka yang terinfeksi virus corona di Spanyol dan Italia juga terkait dengan pemotongan di sektor kesehatan yang dipaksakan pada mereka oleh kebijakan penghematan Eropa.

) Melemahnya demokrasi?

AS saat ini merupakan pusat pandemi global. Kaum radikal kanan dengan sendirinya berusaha memanfaatkan situasi. Segala macam teori konspirasi sedang menyebar secara daring. Mereka yang mempercayainya tidak hanya mempertaruhkan kesehatan mereka sendiri, tetapi juga kesehatan orang lain. Tetapi orang-orang akan melihat bahwa di mana pun populis sayap kanan seperti Trump atau radikal sayap kanan seperti Bolsonaro berkuasa, manajemen krisis gagal total. Oleh karena itu, saya percaya bahwa krisis akan mengakibatkan kekalahan besar bagi para populis sayap kanan dan radikal.

Sebaliknya, ada keprihatinan yang berbeda dalam hal proses demokrasi: Perubahan iklim dapat menyebabkan sejumlah guncangan eksternal, yang juga membutuhkan manajemen krisis skala besar. Karena itu kita harus berhati-hati agar keadaan darurat tidak menjadi norma. Demokrasi membutuhkan diskusi publik, debat, demonstrasi, dan pemogokan. Hak-hak dasar ini harus dijaga selamanya – terlepas dari krisis

) Perubahan yang diperlukan

Setelah corona, dunia-dan dunia kerja-akan berbeda. Dogma-dogma kebijakan ekonomi yang selama ini dianggap tak terbantahkan dalam beberapa dekade terakhir telah tersapu: plafon utang-ketinggalan zaman! "black zero" [pembatasan hutang] dari anggaran pemerintah yang berimbangitu adalah hal kemarin: sekarang utang publik adalah segalanya. Pergeseran paradigma ini akan berlanjut setelah pandemi. Hal itu sudah terlambat dan krisis corona hanya mempercepatnya. Orang-orang juga akan bertanya-tanya bagaimana menafsirkan fakta bahwa untuk kedua kalinya dalam sepuluh tahun, ekonomi pasar kapitalis harus diselamatkan dengan metode yang termasuk dalam ekonomi non-pasar. Di masa depan tidak akan mungkin untuk mengabaikan peristiwa seperti itu sebagai suatu "black swan" [peristiwa langka yang berdampak besar]. Kita juga akan lebih mudah untuk memutuskan hal yang benar-benar kita butuhkan. Bahkan saya bisa hidup dengan sangat baik tanpa sepakbola Bundesliga. Tetapi kita tidak bisa hidup tanpa tukang roti, petani, asisten medis, pengemudi truk, dan tetangga yang membantu. Ini menunjukkan bahwa kita semua membutuhkan infrastruktur sosial yang berfungsi dengan baik. Ini harus menjadi aset publik yang didanai dengan baik. Jika Anda membandingkan penghasilan bulanan pesepakbola profesional Jadon Sancho dengan gaji seorang perawat usia lanjut, langsung menjadi sangat jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam masyarakat kita. Layanan-layanan sosial harus ditingkatkan secara sosial-secara finansial, tetapi juga dalam piramida pengakuan.

Mengenai tantangan perubahan iklim, krisis ini merupakan perlambatan pertumbuhan (degrowth) melalui bencana. Seperti pada 2009, emisi yang merusak iklim dan mungkin juga konsumsi sumber daya akan berkurang. Karena krisis, Jerman pada akhirnya mungkin dapat mencapai target iklimnya. Namun, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan revolusi dalam keberlanjutan yang sangat kita butuhkan. Kita dapat melihat sekarang dengan sangat jelas bahwa negara bersikap asertif dalam masa krisis. Negara dapat membatasi kebebasan yang kita lakukan dengan mengorbankan orang lain, melalui aturan-aturan wajib, untuk kepentingan semua! Tetapi seperti yang disebutkan di atas, selalu penting bahwa tindakan negara harus tunduk pada pengambilan keputusan yang demokratis. Kebebasan memiliki dimensi sosial yang mengikat dan ini juga berlaku untuk kebebasan wirausaha. Di masa depan, kebebasan ini harus secara ketat dikaitkan dengan tujuan keberlanjutan. Satu hal yang lebih baik daripada tidak mengendarai SUV adalah tidak memproduksinya! Dan yang lebih baik daripada tidak mengekspor peralatan militer adalah tidak memproduksinya. Contoh-contohnya memperjelas: setelah krisis, kita membutuhkan debat yang mendasar tentang tatanan ekonomi kita-dan debat ini tidak boleh hanya dilakukan oleh para ekonom dan politisi karier.

Seluruh koorespondensi ditujukan kepada Klaus Dörre <Klaus.doerre@uni-jena.de>

Sosiologi

dalam Dunia Pasca-Corona

oleh **Sari Hanafi**, American University of Beirut, Lebanon dan Presiden Asosiasi Sosiologi Internasional (2018-22)



uasana ganjil dari pandemi COVID-19 telah mengungkapkan keretakan-keretakan dalam kepercayaan di antara manusia, antara negara, dan antara warga dan pemerintah; hal tersebut mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan besar tentang diri kita sendiri, hubungan sosial kita, dan kehidupan secara umum. Krisis ini tidak hanya terbatas pada kesehatan masyarakat dan lingkungan atau perekonomian; yang kita saksikan adalah momen kebenaran mengenai krisis modernitas mutakhir dan sistem kapitalisnya dalam skala yang luas dan menyeluruh. Kita tidak akan dapat dengan mudah kembali ke "bisnis seperti biasa" setelah kita melewati krisis ini, dan ilmu-ilmu sosial harus berusaha untuk menganalisis dan

sekaligus terlibat secara aktif dalam menangani realitas baru ini.

Sosiologi akan menjadi seperti apa dalam dunia pasca-Corona? Saya ingin menekankan pada tiga tugas sosiologi: untuk membangun fokus tingkatan berjenjang (multilevel) yang bercabang dari komunitas ke kemanusiaan; untuk melakukan pendekatan aktif dalam memerangi penyakit Anthropocene dan Capitalocene; dan, terakhir, untuk menetapkan agenda yang lebih baik untuk pengakuan dan kewajiban moral.

) Fokus tingkatanberjenjang, dari komunitaske kemanusiaan

Pertama, situasi sehubungan de-

Karena virus corona dunia berubah, dan bersama itu teori dan analisis sosiologi berubah pula. Sumber: Creative Commons.

ngan virus corona telah dengan sangat jelas mengungkapkan betapa dunia ini benar-benar saling berhubungan, mengubah citra suatu desa global yang semula hanya metafora menjadi suatu kenyataan. Tetapi kita masih perlu menghasilkan lebih banyak solidaritas global dan lebih banyak globalisasi yang humanistik. Untuk dapat melakukannya dengan sukses diperlukan konseptualisasi skala berjenjang (multi-scale). Gilles Deleuze berpendapat bahwa kaum Kiri (termasuk sebagian besar ilmuwan sosial) memandang dunia dalam pengertian hubungan yang dimulai dari yang paling jauh, dan bergerak ke dalam. Ketidaksetaraan sosial, misalnya, telah dipahami sebagai suatu fenomena eksploitasi global besar yang dapat ditelusuri ke dalam, melalui imperialisme dan kolonialisme. Karena itu, sebagian besar ilmuwan sosial menyerukan untuk berhadapan dengan struktur imperialisme dan kolonialisme supaya dapat menangani dengan tepat penderitaan kelas-kelas sosial (abstrak) yang terdampak.

Bertentangan dengan hal tersebut terdapat beberapa gerakan politik identitas (misalnya beberapa gerakan Islam, dan gerakan sayap kanan dan konservatif) yang berpandangan bahwa hubungan itu dimulai dari titik dekat, dan bergerak ke yang paling jauh. Mereka percaya pada kerja komunitas, dan dalam hubungan keluarga dan bertetangga. Misalnya, pendukung Trump percaya pada kemampuannya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial yang dihadapi oleh komunitas Amerika kulit putih pedesaan yang terlupakan. Dan organisasi berbasis agama di Lebanon saat ini adalah organisasi nonpemerintah paling proaktif yang berurusan dengan keluarga yang kehilangan pekerjaan selama karantina wilayah (lockdown). Dalam kasus gerakan politik identitas lainnya (yang terfokus di seputar etnisitas, gender, seksualitas, dsb.), perjuangan mereka mungkin sangat bervariasi tergantung pada konteksnya tetapi sering berlabuh dalam perjuangan komunitas, yang dipersenjatai dengan doktrin hak asasi manusia universal. Namun, bagi Richard Rorty, ketika memajukan agenda pluralisme budaya, perjuangan "Kiri budaya" ini untuk keadilan kelas sosial kadang-kadang sangat minim (seperti kasus di AS).

Saya melihat sosiologi pasca-Corona sebagai sesuatu yang mampu menemukan kembali bagaimana sosiologi secara tradisional menentukan fokusnya (dari luar ke dalam, atau dari dalam ke luar) menuju terciptanya metode yang menggunakan fokus skala berjenjang: memikirkan kembali pentingnya keluarga, komunitas, dan tentang etika cinta, keramahtamahan, dan kepedulian, dan kemudian dinaikkan ke tingkat negara-bangsa dan kemanusiaan secara keseluruhan.

) Berjuang melawan Anthropocene/ Capitalocene

COVID-19 adalah penyakit yang muncul bukan hanya karena globalisasi tetapi juga *Anthropocene*. Kredo konsumerisme manusia me-

nguras sumber daya yang tidak dapat diperbaharui oleh planet Bumi kita, dan virus ini hanyalah salah satu (meskipun signifikan) episode konsumerisme semacam itu. Seperti kita ketahui, virus ini ditularkan dari hewan yang tidak dijinakkan (seperti musang, trenggiling, dan kelelawar) ke manusia melalui konsumsi hewan-hewan ini. Apakah mereka sedemikian lezat? Bourdieu mungkin akan menganggap ini sebagai tanda pembedaan (distinction), menunjuk pada sejumlah besar objek yang tidak perlu dan mewah yang dikonsumsi oleh kita, kelas menengah dan menengah bawah. Di sini, bagi banyak orang Lebanon, liburan menjadi sinonim dengan bepergian ke luar negeri.

Konsumerisme rakus ini disebabkan oleh apa yang disebut oleh sosiolog Prancis Rigas Arvanitis sebagai akses mitologis terhadap kebahagiaan, yang pada akhirnya berfungsi sebagai percepatan yang efektif bagi lebih banyak masalah kesehatan, epidemi, kematian, dan bencana. Meneliti hubungan skala berjenjang ini tidak dapat dilakukan tanpa menghubungkan kembali individu, masyarakat, dan alam. Misalnya, mengatasi perubahan iklim dan sistem ekonomi politik tidak dapat dilakukan tanpa meningkatkan kesadaran publik tentang hubungan manusia dengan bumi dan kemanusiaan. Jason Moore mengusulkan gagasan "Capitalocene" sebagai suatu bentuk provokasi kritis terhadap kepekaan Anthropocene. Baginya, kapitalisme mengatur alam secara keseluruhan: hal tersebut adalah ekologi dunia yang bergabung dengan akumulasi modal, pengejaran kekuasaan, dan produksi bersama alam dalam konfigurasi sejarah yang berurutan.

Pendekatan skala berjenjang ini membutuhkan penghubungan kem-

bali ekonomi dengan sosial, dan menautkan hal tersebut dengan politik, dan dengan budaya. Kita perlu menghidupkan kembali konsep kelekatan sosial (social embeddedness) Karl Polanyi. Polanyi memperkenalkan tiga bentuk pengintegrasian masyarakat ke ekonomi: pertukaran, redistribusi, dan resiprositas. Ilmuilmu sosial kita dengan demikian harus memikirkan kembali ketiga istilah tersebut dengan serius, karena pasar (tempat pertukaran) perlu dimoralisasi, termasuk penetapan kontrol sosial yang ketat terhadap semua bentuk spekulasi. Redistribusi tidak dapat dilakukan tanpa mengambil langkah-langkah signifikan untuk mencegah konsentrasi kekayaan ke dalam suatu minoritas perusahaan di masing-masing sektor, tanpa menetapkan pajak yang tinggi pada modal dan kekayaan berskala besar, dan tanpa bergerak ke ekonomi yang tumbuh lambat dan akibatnya (termasuk kebutuhan akan transportasi umum yang murah dan rendah karbon, memandang layanan publik sebagai investasi daripada sebagai kewajiban, dan meningkatkan keamanan pasar tenaga kerja). Saya akan menempatkan masalah resiprositas di bagian selanjutnya di artikel ini.

Kami sadar bahwa perjuangan untuk lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pilihan ekonomi politik kita, dan dari watak sistem ekonomi yang kita inginkan - dan hubungan antara manusia dan alam ini belum pernah terhubung secara sedemikian langsung atau intim seperti sekarang. Ada suatu krisis akut berupa pertumbuhan cepat yang diungkapkan dengan sangat jelas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, ketika dia berkata: "[di sini] tidak ada sesuatu yang bernama batas pertumbuhan, karena tidak ada batas pada kemampuan manusia dalam hal kecerdasan, imajinasi, dan kehebatan."

Dalam edisi Dialog Global sebelumnya James Galbraith dan Klaus Dörre menyampaikan bahwa sebenarnya memang ada batas pada pertumbuhan dan menggambarkan suatu perekonomian baru yang dengan disadari tumbuh lambat, dengan memasukkan fondasi biofisik dari ekonomi ke dalam mekanisme fungsinya.

) Politik pengakuan dan kewajiban moral

Sekarang saya akan membahas pertanyaan mengenai resiprositas dalam kelekatan sosial Polanyi. Polanyi mendefinisikannya sebagai pertukaran timbal balik barang atau jasa sebagai bagian dari hubungan jangka panjang, di mana resiprositas, kewajiban moral, dan kekhawatiran ditambahkan pada hubungan-hubungan kontrak. Resiprositas membutuhkan suatu politik pengakuan antarkelompok dan/atau jaringan yang menerima identitas orang lain, yang bekerja sejalan dengan paradigma pluralisme dan multikulturalisme.

Resiprositas yang berfungsi tergantung pada kekuatan atau kelemahan kewajiban moral dalam hubungan sosial. Hubungan sosial yang kuat dapat dilihat dalam jaringan solidaritas yang diajukan oleh Mark Granovetter, yang berpendapat bahwa kadang-kadang hubungan jaringan yang kuat adalah hubungan yang berbasis pemberian (gift-based). Terkait dengan hal ini, dan menjadikannya dasar untuk memperluasnya, adalah pandangan Alain Caillé yang mendorong suatu hipotesis anti-utilitarian, di mana keinginan manusia untuk dihargai sebagai pemberi berarti bahwa hubungan kita tidak didasarkan pada minat saja, tetapi juga dalam kesenangan, tugas moral dan spontanitas.

Sosiologi pasca-corona hanya akan bermakna jika dipersenjatai dengan suatu utopia yang, meskipun tidak sepenuhnya dapat diwujudkan, namun akan mengarahkan tindakan kita. Tidak ada kehidupan etis tanpa utopia, dan perbedaan antara

khotbah ulama dan utopia sosiolog adalah bahwa sosiolog tidak serta merta mencela visi anti-utopia orang lain, dan bahkan mungkin berusaha untuk bekerja dengan mereka. Sosiologi seperti itu dengan demikian harus menghargai dan memajukan hubungan pemberian menurut Mauss dan kewajiban moral yang menghubungkan ilmu-ilmu sosial dengan filsafat moral.

Krisis global ini mungkin telah mendorong strategi baru untuk memperkuat eksploitasi, perampasan, dan kapitalisme neoliberal, dan meningkatkan jangkauan keserakahan dan egoisme kita, tetapi krisis global juga memberi kita kesempatan untuk menjajaki dan menyediakan caracara baru untuk memahami dan merebut kembali keadilan sosial dan kemanusiaan kita.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Sari Hanafi <<u>sh41@aub.edu.lb</u>>

> Ruang Perkotaan Berbasis Gender di Bangladesh

oleh **Lutfun Nahar Lata**, Universitas Queensland, Australia dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Pengembangan kota dan Regional (RC21)



Kaum perempuan dari hunian kumuh Sattola sedang menjual sayur-mayur di hunian kumuh. Kredit: Lutfun Nahar Lata.

egakota (megacities) yang paling cepat tumbuh di dunia gagal memberikan dukungan pada mata penca-Iharian bagi kaum miskin perkotaan. Akibatnya, informalitas, yang mengacu pada kegiatan yang sebagian besar tetap tidak diakui oleh rezim "formal" dan mencakup praktik perumahan dan mata pencaharian, merupakan bagian besar dari ekonomi kota-kota di Selatan. Orang miskin bergantung pada sektor informal untuk mendapatkan penghasilan, seringkali dengan status hukum yang ambigu. Ekonomi informal menyediakan 60% hingga 80% pekerjaan di perkotaan dan hingga 90% pekerjaan baru di banyak kota. Dhaka, suatu megakota Selatan, tidak terkecuali. Kecuali bagi mereka yang bergerak di sektor garmen dan pekerjaan bergaji rendah lainnya, mayoritas penghuni daerah kumuh di Dhaka tidak memiliki akses ke peluang ekonomi formal. Penelitian

yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar perencanaan pemerintah dan strategi pembangunan di Dhaka lebih berfokus pada infrastruktur dan pengembangan lahan yasan (*real estate*) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi formal dan perumahan elit, dan lebih sedikit menangani kebutuhan perumahan dan pekerjaan kaum miskin perkotaan. Karena itu, sektor informal telah menjadi pilihan mata pencaharian paling penting bagi orang miskin. Namun, pedagang informal mengalami banyak tantangan dalam menggunakan ruang publik di Dhaka untuk mata pencaharian mereka.

Di antara banyak hambatan yang dibebankan informalitas terhadap peluang dalam mendapatkan penghasilan adalah hambatan untuk mengakses ruang publik untuk melakukan usaha, termasuk di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal dan pemukiman orang miskin.

Sejumlah penelitian di seluruh dunia telah mengeksplorasi pentingnya ruang publik untuk melakukan kegiatan penjualan dan mengungkapkan bahwa akses ke ruang publik untuk mata pencaharian sangat penting bagi kaum miskin perkotaan di Selatan Global. Namun, di sebagian besar kota-kota di Selatan Global, perencanaan kota dan praktik-praktik tata kelola belum memberikan ruang bagi meningkatnya jumlah kaum miskin perkotaan. Selain itu, karena pertumbuhan penduduk yang terus berkelanjutan, yang sebagian besar berasal dari migrasi desa-kota, dan permintaan lahan untuk pengembangan lahan yasan, tekanan terhadap tanah sangat tinggi. Akibatnya, akses ke ruang publik adalah salah satu tantangan utama bagi penelitian mengenai mata pencaharian di masa depan di megakota.

Ruang kota dikonstruksikan secara sosial: aktor yang berbeda memiliki kepentingan, kebutuhan, dan keinginan serta kekuasaan yang berbeda untuk mendominasi ruang. Karena penggunaan ruang publik untuk menjual produk secara resmi dilarang di Dhaka, kaum miskin kota secara berkala diusir dari ruang publik, yang melanggar keamanan mata pencaharian dan hak mereka atas kota. Hal lain yang menjadi masalah terus-menerus adalah penggunaan ruang berdasarkan gender. Wacana tentang ruang dan gender telah sangat berubah sejak tahun 1970-an, dengan runtuhnya konstruksi lama lakilaki publik dan perempuan privat, dikarenakan seringnya perempuan mengakses dan menggunakan ruang publik perkotaan. Namun demikian, akses ke ruang publik untuk mendapatkan penghasilan masih menjadi masalah bagi perempuan. Akses ke ruang publik bagi perempuan tergantung pada norma sosial, nilai-nilai, praktik keagamaan, dan pekerjaan gender yang ditentukan secara sosial dan budaya. Partisipasi perempuan miskin dalam ekonomi informal Dhaka penting untuk kelangsungan hidup rumah tangga miskin yang tinggal di daerah kumuh, karena pendapatan tunggal biasanya tidak cukup untuk menyokong keluarga. Sekalipun demikian, akses perempuan miskin ke ruang publik sering terhambat, karena ideologi gender dominan masih melihat bahwa tempat perempuan seharusnya di rumah.

Meskipun sebagian besar studi di kota-kota Asia Selatan mengungkapkan keterlibatan perempuan miskin dalam pekerjaan berbasis rumah, beberapa penelitian telah mengeksplorasi penggunaan ruang publik oleh perempuan untuk mata pencaharian. Saya melakukan studi etnografi di perkampungan kumuh Sattola di Dhaka untuk mengeksplorasi aspek-aspek gender dari pemanfaatan ruang publik perkotaan untuk mata pencaharian. Saya melaksanakan kerja lapangan selama empat bulan mulai dari November 2015 hingga Februari 2016 dan

mewawancarai 94 pekerja informal (18 perempuan dan 76 laki-laki). Temuan saya menggambarkan bagaimana perempuan menanggung tiga beban berupa stigma sosial, hambatan agama, dan patriarki dalam mengakses ruang publik untuk mendapatkan penghasilan.

Penelitian saya menemukan bahwa sebagian besar perempuan di Sattola tidak terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan; karena ini tidak dianjurkan oleh norma agama purdah – suatu kebiasaan orang Muslim yang membatasi gerak perempuan, pilihan pakaian, dan aktivitas kerja. Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan mencari pendapatan di luar rumah juga dianggap sebagai tanda kemiskinan ekstrem. Akibatnya, hanya 3% perempuan pedesaan yang bekerja dalam pekerjaan upahan dibandingkan dengan 24% laki-laki pedesaan; dan partisipasi perempuan dalam sektor non-pertanian berbayar adalah sebesar 18%. Ini terjadi karena tenaga kerja perempuan yang dibayar tidak dihargai sebanyak peran reproduksi mereka dalam pengasuhan dan tugas rumah tangga lainnya. Perempuan, bahkan perempuan lanjut usia, yang telah melanggar batas-batas gender ini dan pergi ke luar rumah mereka untuk mendapatkan penghasilan menghadapi pelecehan seksual dan verbal dan berbagai jenis pelecehan dan perlakuan tidak pantas lainnya. Laki-laki berbicara buruk tentang karakter mereka karena dianggap melanggar norma sosial. Sebagian besar peserta yang terlibat dalam perdagangan informal pernah mengalami hal tersebut meskipun mereka setiap hari duduk di dekat rumah mereka untuk menjual barang dan sayuran. Salah seorang peserta penelitian saya, misalnya, berkata, "karena saya seorang perempuan yang melakukan usaha, banyak orang berbicara buruk. Meskipun setelah itu saya harus menjalankan toko ini untuk mendidik anak-anak saya". Peserta lain berkata, "ketika saya menjual teh, beberapa pria membuat saya jengkel. Mereka terkadang menyentuh tubuh saya untuk melecehkan saya". Beberapa wanita mengabaikan pendapat orang lain karena mereka terlalu miskin dan rentan untuk mendengarkan mereka. Seperti yang dikatakan oleh penjual telur rebus, "Orang yang berbeda memiliki mentalitas yang berbeda dan saya tidak peduli tentang hal itu". Sangat sering perempuan miskin melakukan usaha di jalanan karena mereka tidak punya alternatif lain untuk mencari nafkah. Misalnya, suami Moyna sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan apapun, dan putranya adalah pecandu narkoba dan tidak tinggal bersama mereka, sehingga dia harus menjalankan usaha sendiri. Ketika para pejabat Dewan Penelitian Medis Bangladesh (BMRC) mengusir mereka dari trotoar yang berdekatan dengan kantor BMRC, dia kemudian mulai berjualan di jalan utama daerah kumuh Sattola di Dhaka.

Penelitian selanjutnya menemukan bahwa banyak perempuan menghadapi pelecehan seksual yang ekstrem oleh pria. Jika perempuan berkeliling di tempat tertentu untuk menjual barang atau makanan, terkadang laki-laki memperlakukan mereka sebagai "pekerja seks". Akibatnya, sebagian besar perempuan yang menjalankan usaha di luar daerah kumuh ditemani oleh kakak laki-laki mereka, tetangga, suami, atau anak-anak. Misalnya, ketika Tahera memulai usaha bunga, tetangganya Noakhali akan menemaninya sehingga dia tidak mengalami pelecehan lisan dan seksual oleh pria lain. Sering dikemukakan argumen bahwa pekerjaan perempuan dan penghasilannya akan memberdayakan mereka. Namun ini tampaknya merupakan mitos bagi perempuan termiskin di Dhaka di mana keamanan (fisik) mereka tergantung pada dipunyainya teman pria.

Pemerintah Bangladesh bangga atas capaiannya meraih peringkat ke-47 di antara 144 negara dalam Laporan Kesenjangan Gender Global 2017. Namun, pemerintah sebagian besar berfokus pada peningkatan kehidupan dan mata pencaharian perempuan miskin pedesaan dan telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan pelatihan yang menghasilkan pendapatan bagi perempuan pedesaan dan kota kecil. Hingga saat ini, pemerintah dan organisasi nonpemerintah menekankan pada "kepentingan gender strategis" perempuan, yang muncul dari identifikasi perempuan atas posisi subordinasi mereka terhadap laki-laki. Pemerintah dan organisasi nonpemerintah juga telah bekerja untuk membantu partisipasi perempuan dalam pekerjaan, memberikan mereka pinjaman kecil untuk memenuhi "kepentingan gender praktis" mereka. "Kepentingan gender praktis" muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh perempuan dalam konteks spesifik yang sesuai dengan peran mereka yang diterima secara sosial dalam masyarakat, daripada menghasilkan tujuan strategis jangka panjang seperti emansipasi perempuan. Namun, sangat penting untuk memperbaiki kondisi kerja perempuan perkotaan dan menyediakan fasilitas lain, seperti pusat penitipan anak, yang memungkinkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Lebih penting lagi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan fisik perempuan dan melakukan inisiatif untuk membangun kota yang aman terlebih dahulu. Jika pemerintah dan organisasi nonpemerintah gagal untuk memastikan keamanan fisik perempuan di ruang publik, semua upaya mereka - semua peraturan dan regulasi yang telah diperkenalkan pemerintah untuk pemberdayaan perempuan sejauh ini -akan gagal menghasilkan capaian yang berarti.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Lutfun Nahar Lata <l.lata@uq.edu.au>

> Internasionalisme Buruh

dan Sirkulasi Modal secara Bebas

oleh Raquel Varela, New University of Lisbon, Portugal



Foto oleh Nick Bastian/flickr.com. Hak tertentu dilindungi.

ada musim panas 2016, perusahaan multinasional asal AS, Dura Automotive-pemasok suku cadang otomotif dunia yang beroperasi di berbagai negara-berkomitmen untuk memasok komponen bagi Chrysler, Audi, dan BMW. Jumlah pesanan sedang meningkat dan Dura berisiko membayar denda tinggi bila buruhnya menolak untuk bekerja lembur di akhir pekan untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Para buruh Jerman di Dura Plettenberg memutuskan hanya mau lembur bila Dura menerima perjanjian kolektif dengan IG Metall, serikat buruh metal Jerman; pabrik itu terancam dipindah dari Jerman ke Portugal dan negara-negara lain, dan pengurangan pekerjaan dari 1000 menjadi 700. Manajer Dura bereaksi dengan melakukan dumping radikal-mereka meminta 260 buruh Portugis dari pabrik Dura Carregado untuk ke Jerman untuk bekerja pada bulan Juli 2016. Perjalanan itu awalnya dihalangi melalui tekanan lokal: para buruh Jerman mengancam untuk menutup pabrik. Tetapi pada bulan Oktober 2016, setelah terjadi beberapa kali negosiasi, sekitar 300 orang buruh Portugis datang ke Jerman untuk mengerjakan pesanan tersebut pada hari Sabtu dan Minggu selama hampir 2 bulan.

Banyak buruh menyambut mereka dengan protes. Sementara itu IG Metall telah membawa kasus itu ke pengadilan. Pengadilan mengambil suatu keputusan yang belum ada preseden: proses itu sah karena selama hari kerja biasa Dura di Jerman adalah Jerman, dan selama akhir pekan, perusahaan itu adalah Portugis! Dalam sebuah wawancara, seorang buruh Portugis mengatakan bahwa ketika mereka datang suasananya "tegang" dan sebagian mesin sudah disabotase oleh buruh setempat.

) Migrasi buruh di pusaran restrukturisasi buruh Eropa

Dalam suatu masyarakat yang terkomodifikasi-di mana tenaga kerja merupakan komoditas-para buruh berkompetisi bukan hanya dalam satu sektor, tetapi juga di pasar tenaga kerja nasional dan internasional untuk menjual tenaga mereka. Migrasi buruh terhubung dengan sebuah faktor objektif; nilai upah dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Tiadanya partai politik kuat yang mewakili kepentingan kelas buruh internasional telah membuat persoalan ini tersandera oleh dua varian kebijakan nasional: satu yang sifatnya rasis/pelarangan (ekstrem kanan) dan satu yang mendukung pergerakan bebas buruh (partai-partai liberal, konservatif, dan sosial demokrat), kadang-kadang termasuk mendukung beberapa hak sosial (khusus untuk partai-partai sosial demokrat). Saat ini tak ada politik radikal internasionalis yang punya pengaruh konkret nyata pada persoalan ini di masyarakat Eropa. Kebijakan-kebijakan migrasi negara-negara Eropa terutama berupa tanggapan terhadap kewajiban manajemen tenaga kerja saja, dan bukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan atau multikultural. Tanpa adanya ikatan solidaritas efektif antara mereka yang berpenghasilan lebih demi mereka yang berpenghasilan kurang, rasisme dan xenofobia akan mempunyai landasan sosial untuk tumbuh.

Globalisasi telah menciptakan kompetisi di antara para buruh dengan menurunkan upah di seluruh dunia, tetapi mungkin juga telah menciptakan kondisi bagi peristiwa sebaliknya: internasionalisme. Jika sekelompok buruh di Dura Carregado bisa menghentikan pemogokan di Jerman, para buruh pela-

buhan seluruh Eropa, dengan ongkos minim, bisa mogok bagi buruh pelabuhan di Portugal, membantu mereka memenangkan perjuangan.

) Mendukung pemogokan lintas perbatasan

Serikat Buruh Pelabuhan Internasional (IDF), dengan 140.000 orang anggota saat ini, dibentuk 20 tahun lalu di Liverpool, Inggris. Pada yang tanggal 29 September 1995, 500 orang buruh pelabuhan dengan kontrak permanen dari Liverpool menolak menerobos garis batas pemogokan (*cross a picket line*) yang dibuat oleh sekitar 50 orang buruh rentan. Mersey Docks and Harbour Company (MDHC) memecat mereka semua, mengawali perselisihan yang nantinya mendunia antara 1995 dan 1998.

Perselisihan di Liverpool itu bisa dianggap sebagai gerakan internasional pertama dari para buruh di Eropa melawan neoliberalisme-dan perlawanan semacam itu sangat jarang. Itu juga merupakan konflik yang akan mempersatukan para buruh rentan dan fleksibel dengan para buruh mapan dalam perjuangan yang sama melalui tindakan kolektif yang menggerakkan solidaritas aktif di antara kedua kelompok tersebut. Strategi dan prinsip yang sama kemudian pada tahun 2013 membawa António Mariano, buruh pelabuhan Portugis yang paling aktif berpartisipasi mendukung gerakan untuk Liverpool tersebut, memenangkan pemilihan pimpinan serikat di Lisbon. Sejak awal, Serikat Buruh Pelabuhan Internasional dicirikan oleh sikap solidaritas internasional sejati yang melampaui kata-kata diplomasi-yang biasanya terlalu sering terjadi di konfederasi-konfederasi lainnyadengan melakukan pemogokan-pemogokan solidaritas yang aktif di tingkat regional atau internasional, strategi bersama dalam rapat-rapat, dan pertemuan-pertemuan lokal dan global.

Antara tahun 2013 dan 2016, serikat ini mengembangkan serangkaian pemogokan dan perlawanan yang berhasil mempekerjakan para buruh yang semula rentan di Pelabuhan Lisbon, bertentangan dengan hukum yang telah meliberalkan proses penyewaan pelabuhan ke pihak lain atas permintaan Troika (Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF) saat terjadi krisis keuangan di Portugal.

Pada tanggal 1 Agustus 2012, pemerintah Portugis menyetujui undang-undang perburuhan baru yang membatalkan Perjanjian Kerja Kolektif dan menggantikannya dengan satu usulan tentang hubungan industrial yang baru; mengakhiri pembatasan penggunaan buruh kontrak; membatalkan kategori-kategori buruh paling trampil; menambah jam kerja dan mengurangi tingkat upah dari 1.700 euro menjadi sekitar 550 euro; dan pemutusan hubungan kerja. Jajaran pimpinan serikat menanggapinya dengan satu strategi yang jelas: mereka mensubsidi buruh-buruh rentan yang dipecat dengan memakai dana pemogokan yang dimiliki para buruh tetap, dan berusaha meyakinkan Dewan Buruh Pelabuhan Internasional (IDC) agar mengorganisir pemogokan di seantero Eropa pada bulan Februari 2014.

Pada tanggal 4 Februari 2014, atas inisiatif IDC, dibuatlah pertemuan-pertemuan di berbagai pelabuhan di Eropa untuk memberitahu semua buruh tentang apa yang sedang terjadi di Lisbon. Selama pertemuan tersebut, kerja dihentikan di semua pelabuhan untuk menunjukkan solidaritas mereka.

Pemogokan selama dua jam tersebut berakhir dengan kemenangan untuk para buruh pelabuhan di Lisbon-dijanjikan bahwa 47 orang buruh rentan akan dipekerjakan kembali, sebagian dengan kondisi kerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Pemogokan dengan solidaritas internasional ini dan pemogokan Ryanair di seluruh Eropa pada bulan Juni 2018, sejauh kami ketahui, merupakan satu-satunya pemogokan internasional yang menunjukkan solidaritas seluruh Eropa setelah krisis 2008. Dalam kasus-kasus lain yang lebih banyak terjadi adalah pendekatan nasionalistik dari serikat di negara-negara masing-masing.

Dalam pandangan saya, yang paling menentukan dalam kekalahan di Dura dan kesuksesan buruh pelabuhan Lisbon adalah evolusi dari serikat buruh dan kepemimpinan politik dan serikat. Akan tetapi kesimpulan ini tidak dengan sendirinya jelas. Pertanyaannya: kondisi sejarah macam apa yang telah menghasilkan program internasionalis di satu tempat dan ideologi nasionalis di tempat lain? Untuk menjawab ini, kita akan memerlukan analisis kasus demi kasus terhadap setiap faktor.

) Solidaritas: Tak sekadar kata-kata

Globalisasi telah menciptakan model produksi seluas dunia-belum pernah kita setergantung ini pada satu sama lain. Dalam abad ke sembilan belas, jika terjadi pemogokan di sebuah pabrik dan majikan mau menghentikannya, ia akan membayar polisinya sendiri-preman bayaran lokal. Tetapi di abad ke sembilan belas, yang lokal bukan hanya penindasannya; demikian pula halnya dengan produksi harian: bahan mentah, buruh, suku cadang, pemeliharaan, semuanya terdapat dalam pabrik yang sama atau di dekatnya. Ini tidak lagi berlaku. Kapal kontainer bisa dibangun di Korea, dengan baja dari Spanyol, mesin berasal dari Finlandia, tinta dibuat di Jerman, dan didesain di universitas di Amerika.

Para buruh pelabuhan cepat menyadari bahwa kerentanan para buruh kontrak baru itu akan segera jadi bom waktu bagi mereka sendiri, dan menjadi sadar akan kekuatan mereka. Karena masyarakat yang kompleks ini berjalan saling terhubung seperti rantai, menghentikan rantai ini untuk waktu tertentu akan menghalangi seluruh produksi dengan biaya yang besar. Jadi, seluruh negara bisa dihentikan dan semua produksi bisa benar-benar terganggu. Bukan hanya buruh transportasi yang punya kuasa potensial ini. Hal sama berlaku juga bagi para dokter, guru, pegawai administrasi, dan hakim.

Meningkatnya peluang untuk menentukan nasib sendiri bagi para buruh di seluruh dunia sangat terkait dengan usaha mengenali keperluan dan kesempatan yang beragam di antara "gerakan sosial secara keseluruhan." Analisa terhadap dinamika akumulasi modal dan pemanfaatan secara strategis dari perbatasan di pasar dunia niscaya akan membawa kita pada metodologi internasionalis yang sejati. Perspektif internasionalis semacam itu perlu dibangun atas dasar pengorganisasian buruh, tanpa tergantung pada modal. *Verba non sufficiunt ubi opus est factum*. Kata-kata saja tidak cukup; harus diikuti tindakan konkret.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Raquel Varela raquel_cardeira_varela@yahoo.co.uk

› Portugal Menghadapi

Kelompok Ekstrem Kanan

oleh **Elísio Estanque**, Universitas Coimbra, Portugal, dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Kelas Sosial dan Gerakan Sosial (RC47)



Demonstrasi selama periode Troika di Lisbon, 2012. Foto oleh Elísio Estanque.

alam bukunya On Extremism and Democracy in Europe yang terbit pada tahun 2017, Cas Mudde menekankan bahwa perjuangan utama dari partai populis sayap kanan radikal ialah untuk menonjolkan pentingnya isu-isu "mereka," seperti korupsi, imigrasi, dan keamanan. Dengan menyangkal keberadaan berbagai kepentingan dalam suatu masyarakat, dan dengan memaksakan konsepsi monolitik serta esensialis tentang "rakyat" melawan "elite" yang korup, populisme ekstrem sayap kanan berujung pada pandangan Manichean dan terpolarisasi tentang budaya politik. Ia juga memobilisasi para pemilih agar melawan elite politik dengan menyalahkan mereka karena tidak mencegah "ancaman-ancaman" eksternal, yang direpresentasikan oleh "yang liyan," "orang asing," "orang kulit hitam," "gipsi," atau "imigran." Dalam konteks kian berkurangnya tenaga kerja industrial, defisit pengakuan yang dialami oleh sebagian kelas pekerja yang tidak dapat mengklaim kepentingan ekonominya sendiri mungkin berujung pada subjektivitas yang penuh amarah. Sebagaimana dijelaskan Klaus Dörre (2019), pengalaman spesifik kelas bersangkutan dapat menjadi "bahan dari formasi blok populis sayap kanan."

Kendati Portugal hingga hari ini dianggap sebagai kasus tersendiri di Eropa karena tidak memiliki partai atau gerakan fasis, hal ini bisa saja berubah. Saya akan memperlihatkan tiga dimensi sosiologis penting yang dapat menjelaskan watak dari perubahan ini: sejarah kediktatoran yang panjang; revolusi demokratis yang diradikalisasi pada April 1974; dan dampaknya berupa restrukturisasi kerangka kelas yang beriringan dengan lestarinya ketimpangan sosial.

) Latar Belakang Sejarah

Di bawah rezim konservatisme integralis "Estado Novo," yang dilembagakan sejak 1933 namun kelahirannya merentang balik sejak kudeta militer 1926, gerakan kelas pekerja akar rumput yang dipicu oleh lengsernya rezim monarkis pada 1910 menjadi sasaran utama serangan. Di bawah selubung Gereja Katolik, yang ingin membalas serangan para republikan, sosialis, serta anarkis terhadap hak-hak istimewa lamanya sepanjang 1920-an, gagasan moralistis Salazar membuat Portugal terbelakang dalam hal pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan industri, dengan terutama menghukum kelas-kelas bawah serta mempersekusi, menangkap, dan menyiksa oposisi selama lebih dari empat dekade. Walaupun terdapat aparatus yang represif dan penyensoran, pada awal dekade tujuhpuluhan aksi-aksi pemogokan berlangsung dan struktur serikat yang klandestin mengalami konsolidasi, sebagian besar di bawah pengaruh Partai Komunis Portugis dan beberapa kalangan progresif yang bertaut dengan gereja. Perang Kolonial di Afrika dan unjuk rasa mahasiswa di Lisbon,

Coimbra, dan Porto pada 1960-an yang dipengaruhi oleh tren mancanegara, meningkatkan ketidakpuasan (terutama di antara kawula muda, korban pertama dari peperangan), yang mencuatkan harapan atas demokrasi di Portugal.

Kudeta Militer pada 25 April 1974 oleh sekelompok kapten yang menolak untuk melanjutkan peperangan dan berjuang untuk negara yang lebih demokratis dan maju adalah hal yang penting, namun yang menjadi "sekolah" besar untuk demokrasi adalah fase mobilisasi rakyat (pemogokan dan pendudukan, debat ideologis, serta celah politik yang mendalam). Sekolah pembentukan demokrasi dan kewarganegaraan ini, sayangnya, diliputi dengan kontras, ilusi, serta konflik terbuka di mana "sosialisme" menjadi jantung dari pertikaian dan penolakan terhadap "fasisme" menjadi faktor pemersatu utama. Kesatuan anti-fasis tidak menghambat kebencian struktural terhadap para komunis dan sosialis, kebencian yang bertahan hingga 2015, dan hanya berakhir mengikuti munculnya persekutuan yang dinamai geringonça (alat).

) Erosi demokrasi

Dalam 46 tahun demokrasi dan 35 tahun setelah bergabung dengan UE (sejak 1986), Portugal memperlihatkan kemajuan sosial serta kelembagaan yang berarti. Dalam ranah politik, pemerintah senantiasa didukung oleh mayoritas parlementer yang berayun di antara partai politik berspektrum kanan-tengah (PSD dan CDS) dan kiri-tengah (PS), di mana kubu kanan di parlemen direpresentasikan utamanya oleh CDS (Pusat Sosial dan Demokratis, diinspirasi oleh demokrasi Kristen). Ekspresi elektoralnya mencapai 16% pada 1976 (di bawah pemimpin moderat Freitas do Amaral, pendiri partai, yang pada tahun-tahun akhirnya mendekati Partai Sosialis), namun sejak saat itu menyusut, dan saat ini hanya memperoleh 4,25%.

Wacana paling radikal, dengan referensi ke Salazarisme dan praktik xenofobia, sampai saat ini hanya terbatas pada kelompok yang sangat kecil: PNR (Partai Pembaruan Nasional), didirikan pada 2000 (menggabungkan sejumlah kelompok radikal kecil), yang tidak pernah mendapatkan suara di atas 0,2%, dan sempat dibawa ke pengadilan karena kekerasan, xenofobia, serta kepemilikan senjata ilegal; dan Orde Sosial Baru, didirikan pada 2014, dan dipimpin oleh Mário Machado, seorang disiden PNR yang sebelumnya diadili untuk kekerasan xenofobia. Pada Agustus 2019, sebuah pertemuan yang sempat diumumkan sebagai "ajang nasionalis paling akbar di Portugal," mempertemukan beberapa lusin orang, termasuk di antaranya perwakilan dari partai-partai neo-fasis Eropa. Pertemuan ini menjadi sasaran unjuk rasa tandingan ratusan aktivis di depan hotel di mana pertemuan berlangsung.

Sebagaimana kita ketahui, program politik UE, terlepas dampak positifnya bagi Portugal, berangsur-angsur menyerah pada orientasi lebih umum ke kapitalisme neoliberal dan pemakaian mata uang bersama. Hal ini telah sangat mengguncang ekonomi Portugal. Dengan krisis yang baru-baru ini terjadi, ketimpangan sosial meningkat dan, dengannya, kerentanan, kemiskinan, serta stagnasi gaji pada umumnya secara terus-menerus (gaji rata-rata pada 2018 sejajar dengan

gaji rata-rata pada 2008). Seiring dengan luruhnya harapan dari kelas menengah dan sebagian besar dari angkatan kerja, masyarakat Portugal yang tenggelam dalam kepasrahan dan kemarahan senyap, berangsur-angsur merasa terpisah dari tindakan dan asosiasi politik. Hal ini bisa dijumpai dari meningkatnya ketidakhadiran dalam pemilihan umum parlementer, dari 8,3% pada 1976 menjadi 51,4% pada 2019. Ketidakamanan, kerentanan, dan ketakutan mengarahkan orang-orang ke kecenderungan untuk taat pada kekuasaan sosial serta pemimpin yang oportunistis, lahan yang paling subur untuk bertumbuhnya populisme sayap kanan.

Ancaman populis

Kehidupan demokratis di Portugal karenanya tidak kebal terhadap narasi populis. Liputan media terhadap politik, jurnalisme tabloid sensasional, dan menanjaknya popularitas dari sosok-sosok televisi (beberapa karena kehadiran konstannya di dunia hiburan dan/atau program diskusi sepak bola, misalnya) telah membawa dividen politik untuk beberapa orang protagonis. Presiden Marcelo Rebelo de Sousa merupakan contoh yang baik-ia mempunyai program televisi mingguan selama lebih dari sepuluh tahun, dan menghimpun ketenaran di seantero negeri. Salah satu dari protagonis yang paling kontroversial dari populisme ekstrem sayap kanan masa kini, André Ventura, muncul dari tengah-tengah spektrum politik hegemonik (mantan anggota PSD, Partai Demokratis Sosial, yang berafiliasi dengan kelompok Liberal di Parlemen Eropa). la mulai menonjol ketika, sebagai kandidat partai untuk suatu kotamadya di pinggiran Lisbon, ia mengusulkan untuk melawan komunitas Roma dengan kekerasan polisi dan bahkan berjanji akan mensterilisasi perempuan Roma, dengan mengklaim bahwa komunitas bersangkutan pada hakikatnya gemar kekerasan, hidup dari aktivitas-aktivitas ilegal, dan diuntungkan dengan kebijakan sosial yang menggunakan sumber daya publik. Selanjutnya, ia meninggalkan PSD, dan pada pemilihan umum terakhir ia mendirikan partai baru bernama "Chega" ("Cukup," dilegalisasi pada 2019), yang berusaha masuk ke parlemen; ia terpilih sebagai deputi tunggal, memperoleh 1,3% dari suara. Partai Ventura juga mengandalkan bantuan dari kader-kader lama dan para ideolog yang terhubung dengan kelompok serta kawanan neo-fasis yang akrab dengan kekerasan dan merindukan Salazar.

Wacana nasionalis, xenofobia, serta anti-imigran sudah diradikalisasi dan bahasa radikal serta moralistis terhadap negara sudah berulang kali melecehkan aturan demokrasi serta martabat parlemen. "Chega" mempromosikan pertarungan gerilya lisan dan sikap viktimisasi terhadap para elite politik. Selain meningkatnya liputan media karena kehadirannya di parlemen, jajak pendapat terakhir sudah menunjukkan partai ini memperoleh 6% suara (Expresso/SIC poll, 14 Februari 2020). Memang terdapat tanda-tanda mengkhawatirkan yang menunjukkan bahwa Portugal tak bisa lagi dianggap sebagai pengecualian terkait kehadiran partai-partai neo-fasis.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Elísio Estanque < elisio.estanque@gmail.com>